DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR LAMPIRAN xiii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN xvi
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN xviii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB xxi
LAPORAN KEUANGAN
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
2. LAPORAN PERUBAHAN SAL 3
3. NERACA 4
4. LAPORAN OPERASIONAL 7
5. LAPORAN ARUS KAS 9
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 11
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 12
7.1. Pendahuluan 12
7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 12
7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan. 14
7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 15
7.2. Ekonomi Makro dan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 18
7.2.1. Gambaran Ekonomi Makro Kabupaten Takalar 18
7.2.1.1. Tingkat Kemiskinan 20
7.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka 22
7.2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio) 22
7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 23
7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi 24
7.2.1.6. Inflasi 25
7.2.1.7. Struktur Perekonomian 26
7.2.1.8. Potensi Unggulan Daerah 27
7.2.1.9. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 34
7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 36
7.4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 43

7.4.1.Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 43
7.4.2.Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 45
7.4.3.Kebijakan Akuntansi 46
7.4.3.1.Kebijakan Akuntansi Aset 47
7.4.3.2.Kebijakan Akuntansi Kewajiban 87
7.4.3.3.Kebijakan Akuntansi Ekuitas 92
7.4.3.4.Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA 92
7.4.3.5.Kebijakan Akuntansi Belanja 94
7.4.3.6.Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 95
7.4.3.7.Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO 96
7.4.3.8.Kebijakan Akuntansi Beban 98
7.4.3.9.Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan 101
7.4.3.10.Perubahan Kebijakan Akuntansi 105
7.4.3.11.Perubahan Estimasi Akuntansi 106
7.4.3.12.Operasi Yang Tidak Dilanjutkan 106
7.4.3.13.Peristiwa Luar Biasa 107
7.5. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN 109
7.5.1.Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 109
7.5.1.1.Pendapatan LRA 109
7.5.1.1.1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) 109
7.5.1.1.1.1.Pendapatan Pajak Daerah 110
7.5.1.1.1.2.Pendapatan Retribusi Daerah 111
7.5.1.1.1.3.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 114
7.5.1.1.1.4.Lain lain PAD yang Sah 115
7.5.1.1.2.Pendapatan Transfer 115
7.5.1.1.2.1.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 116
7.5.1.1.2.2.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya 120
7.5.1.1.2.3.Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 120
7.5.1.1.3.Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 122
7.5.1.1.3.1.Pendapatan Hibah 122
7.5.1.1.3.2.Pendapatan Dana Darurat 123
7.5.1.1.3.3.Pendapatan Lainnya 123
7.5.1.2.Belanja dan Transfer LRA 123

7.5.1.2.1.Belanja Operasi 124
7.5.1.2.1.1.Belanja Pegawai 124
7.5.1.2.1.2.Belanja Barang dan jasa 129
7.5.1.2.1.3.Belanja Bunga 131
7.5.1.2.1.4.Belanja Subsidi 131
7.5.1.2.1.5.Belanja Hibah 131
7.5.1.2.1.6.Belanja Bantuan Sosial 132
7.5.1.2.2.Belanja Modal 132
7.5.1.2.2.1.Belanja Modal Pengadaan Tanah 133
7.5.1.2.2.2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133
7.5.1.2.2.3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134
7.5.1.2.2.4.Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 135
7.5.1.2.2.5.Belanja Aset Tetap Lainnya 136
7.5.1.2.2.6.Belanja Aset Lainnya 137
7.5.1.2.3.Belanja Tidak Terduga 137
7.5.1.3.Transfer 138
7.5.1.3.1.Transfer/Bagi Hasil ke Desa 138
7.5.1.3.2.Transfer Bantuan/ Keuangan 139
7.5.1.3.2.1.Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 139
7.5.1.3.2.2.Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota ke Provinsi 139
7.5.1.3.2.3.Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 139
7.5.1.4.Pembiayaan LRA 140
7.5.1.4.1.Penerimaan Pembiayaan 140
7.5.1.4.1.1.Penggunaan SiLPA 140
7.5.1.4.1.2.Pencairan Dana Cadangan 141
7.5.1.4.1.3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 141
7.5.1.4.1.4.Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 141
7.5.1.4.1.5.Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 142
7.5.1.4.1.6.Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 142
7.5.1.4.1.7.Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 142
7.5.1.4.1.8.Pinjaman Dalam -Negeri - Obligasi 142

7.5.1.4.1.9.Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 142
7.5.1.4.1.10.Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 142
7.5.1.4.1.11.Penerimaan Piutang Daerah 142
7.5.1.4.1.12.Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 143
7.5.1.4.2.Pengeluaran Pembiayaan 143
7.5.1.4.2.1.Pembentukan Dana Cadangan 143
7.5.1.4.2.2.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 143
7.5.1.4.2.3.Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 143
7.5.1.4.2.4.Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Daerah Lainnya 143
7.5.1.4.2.5.Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 144
7.5.1.4.2.6.Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 144
7.5.1.4.2.7.Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 144
7.5.1.4.2.8.Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 144
7.5.1.4.2.9.Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 144
7.5.1.4.2.10.Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 144
7.5.1.4.2.11.Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 144
7.5.2.Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) 146
7.5.2.1.Saldo Anggaran Lebih Awal 146
7.5.2.2.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 146
7.5.2.3.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 146
7.5.2.4.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 146
7.5.2.5.Saldo Anggaran Lebih Akhir 146
7.5.3.Penjelasan Akun-akun Neraca 147
7.5.3.1.ASET 147
7.5.3.1.1.Aset Lancar 147
7.5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah 148
7.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran 149
7.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan 150

7.5.3.1.1.4. Kas di Bendahara FKTP 150
7.5.3.1.1.5. Kas di BLUD 151
7.5.3.1.1.6. Kas Dana BOS 152
7.5.3.1.1.7. Kas Lainnya 152
7.5.3.1.1.8. Investasi jangka pendek 153
7.5.3.1.1.9. Piutang Pajak 153
7.5.3.1.1.10. Piutang Retribusi 154
7.5.3.1.1.11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah 156
7.5.3.1.1.12. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 157
7.5.3.1.1.13. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 157
7.5.3.1.1.14. Piutang Transfer Pemerintah Pusat 158
7.5.3.1.1.15. Piutang Pendapatan Lainnya 158
7.5.3.1.1.16. Belanja di Bayar di muka 158
7.5.3.1.1.17. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 158
7.5.3.1.1.18. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 158
7.5.3.1.1.19. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 158
7.5.3.1.1.20. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 159
7.5.3.1.1.21. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 159
7.5.3.1.1.22. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 159
7.5.3.1.1.23. Piutang Lainnya 160
7.5.3.1.1.24. Persediaan 161
7.5.3.1.2.Investasi Jangka Panjang 161
7.5.3.1.2.1.Investasi Non Permanen 161
7.5.3.1.2.2.Investasi Permanen 163
7.5.3.1.3.Aset Tetap 165
7.5.3.1.3.1. Tanah 166
7.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin 170
7.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan 173
7.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 177
7.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya 179
7.5.3.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan 180
7.5.3.1.3.7. Konstruksi dalam Pengerjaan 182

7.5.3.1.4.Dana Cadangan 183
7.5.3.1.5.Aset Lainnya 183
7.5.3.1.5.1.Tagihan Penjualan Angsuran 184
7.5.3.1.5.2.Tuntutan Ganti Rugi 184
7.5.3.1.5.3.Kemitraan dengan Pihak Ketiga 185
7.5.3.1.5.4.Aset Tak Berwujud 185
7.5.3.1.5.5.Aset Lain-Lain 186
7.5.3.1.5.6.Ketekoran Kas Bendahara Pengeluaran 187
7.5.3.1.5.7.Kas yang dibatasi Penggunaannya 187
7.5.3.2.KEWAJIBAN 188
7.5.3.2.1Kewajiban Jangka Pendek 188
7.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 189
7.5.3.2.1.2 Utang Bunga 189
7.5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 189
7.5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka 189
7.5.3.2.1.5 Utang Belanja 189
7.5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya 190
7.5.3.2.2Kewajiban Jangka Panjang 190
7.5.3.2.2.1 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan 190
7.5.3.2.2.2 Utang Dalam Negeri - Obligasi 190
7.5.3.2.2.3 Premium (Diskonto) Obligasi 190
7.5.3.2.2.4 Utang Jangka Panjang Lainnya 190
7.5.3.3EKUITAS 190
7.5.4Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO) 191
7.5.4.1 Pendapatan 191
7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah 191
7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 191
7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 192
7.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan 193
7.5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 194
7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer 195

7.5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan..... 195
7.5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 197
7.5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah..... 197
7.5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... 198
7.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah 199
7.5.4.1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 199
7.5.4.1.3.3 Pendapatan Lainnya..... 199
7.5.4.2 Beban 199
7.5.4.2.1Beban Operasi 200
7.5.4.2.1.1 Beban Pegawai 200
7.5.4.2.1.2 Beban Persediaan..... 201
7.5.4.2.1.3 Beban Jasa 202
7.5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan 202
7.5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas..... 203
7.5.4.2.1.6 Beban Bunga 203
7.5.4.2.1.7 Beban Subsidi 203
7.5.4.2.1.8 Beban Hibah 203
7.5.4.2.1.9 Beban Bantuan Sosial 204
7.5.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang 204
7.5.4.2.1.11 Beban Lain-lain 204
7.5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi 204
7.5.4.2.3 Beban Transfer 205
7.5.4.2.4 Beban Tak Terduga 205
7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 205
7.5.4.4 Surplus Non Operasional..... 206
7.5.4.5 Defisit Non Operasional 206
7.5.4.6 Pos Luar Biasa 206
7.5.4.7 SURPLUS/DEFISIT LO 206
7.5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)..... 207
7.5.5.1Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 207
7.5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 207
7.5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 208

7.5.5.2Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 208
7.5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi 209
7.5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi 209
7.5.5.3Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 210
7.5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan 210
7.5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan 210
7.5.5.4Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 211
7.5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris 211
7.5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris 211
7.5.5.5Kenaikan/ (Penurunan) Kas Bersih Selama Periode Berjalan 211
7.5.5.6Saldo Awal Kas 212
7.5.5.7Saldo Akhir Kas 212
7.5.6Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 213
7.5.6.1.Ekuitas Awal 214
7.5.6.2.Surplus/Defisit-LO 214
7.5.6.3.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 214
7.5.6.3.1.Koreksi Saldo Awal Kas 214
7.5.6.3.2.Koreksi Nilai Persediaan 214
7.5.6.3.3.Koreksi Nilai Piutang 214
7.5.6.3.4.Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 215
7.5.6.3.5.Koreksi Nilai Utang Belanja 215
7.5.6.3.6.Koreksi Nilai Aset Tetap 216
7.5.6.3.7.Koreksi Nilai Aset Lainnya 217
7.5.6.3.8.Koreksi Investasi Non Permanen 217
7.5.6.3.9.Koreksi Nilai Penyisihan Investasi 217
7.5.6.3.10.Koreksi Nilai Penyusutan 217
7.5.6.3.11.Selisih Revaluasi Aset Tetap 219
7.5.6.3.12.Koreksi Investasi Permanen 219
7.5.6.3.13.Lain-Lain 220
7.5.6.3.14.Ekuitas Akhir 220
7.6.PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA 221
7.7.PENUTUP 223

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

7.1. Pendahuluan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama satu periode pelaporan (satu tahun anggaran). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Takalar dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan Keuangan Pemerintah Kaupaten Takalar tahun anggaran 2022. Selain laporan pokok di atas, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 ini disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik *(good governance*).

Catatan atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak secara khusus hanya ditujukan untuk pembaca tertentu ataupun Pemerintah Kabupaten Takalar semata. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

a. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Secara spesifik, tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

   1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,

dan ekuitas pemerintah;

2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

c. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
   1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
   2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

d. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
   1. Aset;
   2. Kewajiban;
   3. Ekuitas;
   4. Pendapatan-LRA;
   5. Belanja;
   6. Pembiayaan;
   7. Saldo Anggaran Lebih;
   8. Pendapatan-LO;
   9. Beban; dan
   10. Arus Kas.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

a. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
b. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
d. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
e. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
h. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan undang–undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Basis Akrual;
t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
w. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
x. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
y. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022;
z. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022;
aa. Peraturan Bupati Takalar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022;
bb. Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
cc. Peraturan Bupati Takalar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
dd. Peraturan Bupati Takalar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.1 Pendahuluan

7.1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2. Ekonomi Makro dan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

7.2.1 Gambaran Ekonomi Makro di Kabupaten Takalar

7.2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.4.3 Kebijakan Akuntansi Akun
7.4.3.1 Kebijakan Akuntansi Aset
7.4.3.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
7.4.3.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas
7.4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA
7.4.3.5 Kebijakan Akuntansi Belanja
7.4.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
7.4.3.7 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
7.4.3.8 Kebijakan Akuntansi Beban
7.4.3.9 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan
7.4.3.10 Perubahan Kebijakan Akuntansi
7.4.3.11 Perubahan Estimasi Akuntansi
7.4.3.12 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
7.4.3.13 Peristiwa Luar Biasa

7.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

7.5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

7.5.1.1 Pendapatan - LRA

7.5.1.2 Belanja

7.5.1.3 Pembiayaan

7.5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

7.5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

7.5.3.1 Aset

7.5.3.2 Kewajiban

7.5.3.3 Ekuitas

7.5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)

7.5.4.1 Pendapatan - LO

7.5.4.2 Beban

7.5.4.3 Kegiatan Non Operasional

7.5.4.4 Akun Luar Biasa

7.5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

7.5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

7.6. Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

7.7. Penutup

7.2. Ekonomi Makro dan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

7.2.1. Gambaran Ekonomi Makro Kabupaten Takalar

Perekonomian Kabupaten Takalar berdasarkan besaran Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2022 mencapai Rp. 12,257 Milyar dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp7.228,40 Milyar. Dengan pertumbuhan ekonomi senilai 4,64% pada Tahun 2022 atau mengalami penurunan senilai 0,41% dari tahun sebelumnya senilai 5,05%. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Takalar yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Tahun 2022, diarahkan untuk "Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Alam Untuk Pemulihan Ekonomi Menuju Takalar Yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat" dengan prioritas meliputi: Peningkatan mutu tenaga pendidik dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; Peningkatan mutu tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan serta keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu, Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja, pencari kerja dan wirausahawan; Optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan dengan Sistem Pertanian Terpadu; Penajaman target penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu; Pengembangan sektor pariwisata guna menunjang iklim investasi yang sehat dan berkualitas; Pengintegrasian perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten ke tingkat desa yang berkelanjutan; Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kualitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat; Penegakan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja aparatur serta penatakelolaan pemerintahan daerah dan desa.

Kabupaten Takalar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan dan nasional diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Takalar merupakan salah satu wilayah penyangga Kota Makassar yang tergabung dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Selain bisa meningkatkan peran Takalar pada sektor jasa serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi. Potensi sumber daya alam khususnya pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi sektor unggulan, serta pengembangan kawasan pariwisata yang dapat membantu peningkatan peran pada sektor jasa. Rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar juga diharapkan mampu berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja produktif. Optimalisasi potensi-potensi tersebut, diharapkan mampu menjadi motor di dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Takalar selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Takalar, secara

tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Takalar. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Takalar 2022, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, Indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran yang ditekan peningkatannya. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Kabupaten Takalar.

Perekonomian Kabupaten Takalar pada perubahan Tahun 2022 dititikberatkan pada menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan berusaha (penyederhanaan proses perijinan dan digitalisasi perijinan, mempermudah akses ke penyedia modal, dll)
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil;
3. Mendorong investasi seluruh bidang usaha;
4. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dsb);
6. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam rangka peningkatan pendapatan;
7. Mengembangkan ketenagakerjaan;
8. Peningkatan infrastruktur jalan yang menghubungkan titik-titik strategis perekonomian rakyat.

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang memengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangkameningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kota Takalar yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan senilai 8,25 % atau 25,168 ribu jiwa dari 305.077 ribu jiwa penduduk Kabupaten Takalar;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) senilai 3,93% atau 11.989 jiwa dari 305.077 ribu jiwa penduduk Kabupaten Takalar;

c. Gini Ratio senilai 0,368%;
d. Indeks Pembangunan Manusia senilai 67,72%;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai 5,05%;
f. Tingkat Inflasi senilai 2,26%;
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2021 senilai Rp. 11,126 Milyar

7.2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Seperti halnya dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, dengan melandainya pandemi Covid-19 serta dibukanya aturan pengetatan kegiatan masyarakat secara nasional, maka sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Takalar pada Tahun 2022 tidak mengalami peningkatan dibandingkan dari Tahun 2021 yang mencapai 8,25 persen (meningkat senilai 0,00 persen), namun masih lebih rendah dari capaian provinsi Tahun 2021 senilai 8,78 persen dan Tahun 2022 senilai 8,63 persen dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat akan semakin membaik, maka pemerintah Kabupaten Takalar menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin setiap tahunnya dibawah target Provinsi dan Nasional.

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Takalar

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	8.25	8.25	0%
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	24.6	24.75	0.61%
3	Provinsi (%)	8.78	8.63	-1.71%
4	Nasional (%)	10.14	9.54	-5.92%

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
5	Peringkat Provinsi	10	10	
6	Peringkat Nasional	17	18	

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Persentase penduduk miskin kabupaten Takalar pada tahun 2022 senilai 8,25% tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 atau persentasenya sama senilai 8,25%. Perhitungan penduduk miskin di masa pandemi terjadi perubahan pola penduduk miskin. Penduduk miskin yang lekat dengan daerah pedesaan, di masa pandemi justru peningkatannya lebih tinggi terjadi di daerah perkotaan, dan diharapkan pada tahun berikutnya terus menurun. Persentase penduduk miskin kabupaten Takalar dibawah dengan provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Takalar

No.	Tingkat	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1.03	0.88	-14.56%
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1.49	1.36	-8.72%
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1.71	1.59	-7.02%
4	Peringkat Provinsi	6	6	
5	Peringkat Nasional	17	17	

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Tabel 3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Takalar

No.	Tingkat	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0.17	0.15	-11.76%
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0.37	0.32	-13.51%
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0.42	0.39	-7.14%
4	Peringkat Provinsi	5	2	
5	Peringkat Nasional	16	16	

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

7.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT**)** adalah persentase jumlah pengangguranterhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka**,** terdiri dari:

(i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
(ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
(iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
(iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Takalar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Takalar

No.	TPT (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun(%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3.93	2.63	-33.08%
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5.72	4.51	-21.15%
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6.49	5.86	-9.71%
4.	Peringkat Provinsi	10	10	
5.	Peringkat Nasional	20	14	

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Kabupaten Takalar menurut data BPS pada tahun 2022 menunjukkan angka senilai 2,63%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah senilai 3,93%. TPT Provinsi /Nasional yang senilai 4,51% dan senilai 5,86%.

7.2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;

b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi dan Kabupaten, koefisien gini ratio Kabupaten Takalar Tahun 2018-2022 dapat dilhat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Gini Ratio Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ turun(%)
1.	Tingkat Kab/Kota	0.358	0.482	0.36	0.368	0.375	-
2.	Tingkat Provinsi	0.397	0.389	0.389	0.382	0.377	-
3.	Tingkat Nasional	0.389	0.382	0.381	0.384	0.384	-
4.	Peringkat Provinsi	9	24	12	15	18	-
5.	Peringkat Nasional	30	28	28	28	28	-

Sumber Dokumen:BPS Nasional/Prov/Kab

Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar wilayah di dalam kabupaten Takalar tidak terlalu lebar ataupun sempit jaraknya. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Stagnansi ini mengindikasikan perkembangan antar wilayah cenderung stagnan pada angka 0,35 – 0,37 selama periode 2018 - 2022.

7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60≤IPM<70);
c. Tinggi (70 ≤IPM<80);
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi dan Kabupaten, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Takalar Tahun 2022 adalah senilai 68,31 poin dengan kategori sedang sebagaimana dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6
Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(turun) (%)
1.	Kabupaten/Kota	67.72	68.31	0.87%
2.	Provinsi	72.24	72.82	0.80%
3.	Indonesia/Nasional	72.29	72.91	0.86%
4.	Peringkat Provinsi	22	22	-
5.	Peringkat Nasional	11	11	-

Sumber Dokumen BPS Nas/Prov/Kab

Angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Takalar merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk Kabupaten Takalar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga Indeks yang menjadi penyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten Takalar pada Tahun 2021 senilai 67.72 dan Tahun 2022 senilai 68.31. Dari tahun ke tahun, nilai IPM kabupaten Takalar terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Takalar Tahun 2022 adalah senilai 68,31 poin, dibandingkan Tahun 2021 senilai 67.72 poin mengalami kenaikan senilai 0,59 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan/atau Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB perkapita.

IPM di Kabupaten Takalar pada saat ini berada pada urutan 22 dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab

masyarakat pemilik faktor produksi.Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Kabupaten Takalar			Provinsi	Nasional
		2020	2021	2022	2022	2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyar Rp)	6,575.76	6,908.05	7,228.40	360,874.18	11,710,397.80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0.61	5.05	4.64	5.09	5.31
3	Peringkat Provinsi	19	13	15	11	
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	7	18			

Sumber Dokumen BPS Nas/Prov/Kab

Selama kurun waktu Tahun 2020-2022 perekonomian Kabupaten Takalar tumbuh rata-rata 3,02%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Takalar menempati urutan ke-11 dari laju pertumbuhan kota/kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

7.2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Nasional, Provinsi Takalar dan Kabupaten Takalar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapakomoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

(i) Inflasi ringan (*creeping inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;

(ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;

(iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan

(iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya

karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi dan Kabupaten Takalar, Tingkat Inflasi Kabupaten Takalar Tahun 2022 menunjukkan angka senilai 5 , 81%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8
Tingkat Inflasi Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	2.26	5.81	157.08%
2.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2.4	5.77	140.42%
3.	Tingkat inflasi Nasional (%)	1.87	5.51	194.65%
4.	Peringkat Provinsi	-	-	-
5.	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Tingkat inflasi di Kabupaten Takalar Tahun 2021 menurut data BPS mengacu menunjukkan angka senilai 2,26%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah senilai 5,81% lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021.

7.2.1.7. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kabupaten Takalar dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam rupiah)

	Lapangan Usaha/*Industry*	2018	2019	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	4 686,07	5 033,40	5 019,28	5 699,39	6 320,33
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining andQuarrying*	166,02	178,39	185,98	194,26	208,08
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	467,91	527,48	518,24	534,69	604,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	10,19	11,52	11,49	12,26	12,86
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage,Waste Management, and Remediation Activities*	3,89	4,08	4,52	4,82	5,29
F	Konstruksi/*Construction*	686,89	755,31	749,41	776,83	865,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	1 135,58	1 260,83	1 264,65	1 340,95	1 475,83
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	246,15	271,98	265,67	279,50	314,71

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	30,24	33,56	31,99	33,52	37,08
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	337,51	369,24	410,77	426,28	455,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	153,32	165,68	177,11	198,32	214,10
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	504,09	538,85	540,02	546,61	595,75
M,N	Jasa Perusahaan/*BusinessActivities*	0,54	0,59	0,58	0,59	0,67
O	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence;Compulsory Social Security*	635,96	724,10	734,49	748,12	788,53
P	Jasa Pendidikan/*Education*	124,36	134,24	141,35	147,85	152,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and SocialWork Activities*	113,65	123,53	142,38	159,04	180,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other ServicesActivities*	22,44	24,56	22,38	23,06	25,64
	Produk Domestik RegionalBruto/*Gross Regional Domestic Product*	9 324,82	10 157,35	10 220,31	11 126,11	12 257,05

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar atas dasar harga berlaku tahun 2022 sekitar Rp. 12.257 miliar dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian yakni senilai 51,56 persen. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar atas dasar harga konstan (2010) tahun 2022 sekitar Rp 7.228 miliar

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha yang ada.

7.2.1.8. Potensi Unggulan Daerah

A. Potensi Komoditi Pertanian

Kabupaten Takalar memiliki komoditi pertanian yang potensial untuk dikembangkan. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan dan memegang peranan penting dalam perekonomian daerah ini. Dengan meningkatnya produksi pertanian dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar. Kondisi komoditi pertanian dapat di lihat pada tabel di bawah.

Tabel 10
Kondisi Komoditi Pertanian Tahun 2018-2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Padi			
	- Luas (ha)	27.665,00	27.708,0	37,476,00
	- Produksi (ton)	137.339,00	142.854	138,480,69
	- Produktivitas (ton/ha)	4,91	5,35	4,80
2	Jagung			
	- Luas (ha)	11.922,00	13.959,0	12,519,00
	- Produksi (ton)	69.710,00	83.825,37	66,356,16
	- Produktivitas (ton/ha)	5,83	6,01	6,21
3	Ubi Kayu			
	- Luas (ha)	87,00	115.0	163,00
	- Produksi (ton)	1.682,20	2.356,07	2,314,70
	- Produktivitas (ton/ha)	19,34	20,49	20,85
4	Ubi Jalar			
	- Luas (ha)	87,70	98.05	165,00
	- Produksi (ton)	1.547,20	1.743,96	2,673,44
	- Produktivitas (ton/ha)	17,64	17,79	18,06
5	Kacang Tanah			
	- Luas (ha)	53,10	54.00	31,00
	- Produksi (ton)	73,60	60,29	18,69
	- Produktivitas (ton/ha)	1,39	1,12	0,60
6	Kacang Kedelei			
	- Luas (ha)	260,30	193.00	150,00
	- Produksi (ton)	210,02	155,26	113,67
	- Produktivitas (ton/ha)	0,81	0,80	0,78
7	Kacang Hijau			
	- Luas (ha)	1.152,30	1.054.95	1,219,00
	- Produksi (ton)	1.525,70	1.391,33	1,745,89
	- Produktivitas (ton/ha)	1,32	1,32	1,44

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar 2020 dan Kabupaten Takalar dalam Angka 2021

Produksi padi di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan, ditahun 2018 produksinya senilai 137.339 ton yang dipanen dari lahan seluas 27.665,00 ha, meningkat menjadi 142.854,00 yang dipanen dari lahan seluas27.708 ha pada tahun 2019. Produksi jagung pada tahun 2018 mencapai 69.710 ton dari lahan seluas 11.922 ha meningkat menjadi 83.825,37 ton dari luas lahan seluas 13.959,00 ha pada tahun 2019. Begitupun dengan produksi ubi jalar, mengalami peningkatan produksi dibanding dengan produksi tahun 2018. Namun, untuk produksi kacang tanah, kedelai dan kacang hijau pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah produksi tahun 2018.

Kawasan hutan di kabupaten Takalar memiliki luas 9.724 Ha. Dari luas tersebut terdapat 7.635,62 ha yang perlu direhabilitasi. Namun demikian sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan rehabilitasi hutan senilai 4.599 ha. Belum diperoleh data kondisi luas kawasan hutan Kabupaten Takalar per 2017 s.d 2019. Adapun rincian berikut ini:

Tabel 11
Kondisi Luas Kawasan Hutan Kabupaten Takalar Tahun 2015-2016

No	Luas Kawasan Hutan	2015 (ha)	2016 (ha)
1	Hutan Lindung	86	86
2	Hutan Produksi	3.482	3.482
3	Hutan Mangrove	1.460	1.460
4	Hutan Konservasi	4.696	4.696
	Jumlah	9.724	9.724
	Hutan yang perlu direhabilitasi	7.845,62	7.635,62
	Hutan yang telah direhabilitasi	4.389	4.599

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Takalar 2016

B. Potensi Perikanan

Kabupaten Takalar dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 108 km dengan kawasan area perikanan budidaya laut sekitar 3.046 ha serta 3.978 ha kawasan area perikanan budidaya tambak. Produksi perikanan di Takalar meliputi produksi perikanan tambak, perikanan darat dan perikanan laut. Produksi ikan laut di Kabupaten Takalar pada tahun 2019 mencapai 30.587 ton mengalami peningkatan bila dibandingkan ditahun 2018 yang mencapai 28.096 ton atau senilai 8,87 persen. Jika dilihat menurut jenis ikan laut terdapat 6 jenis yang utama yaitu: Ikan Layang, Ikan Selar, Ikan Terbang, Ikan Gulama, Ikan Kembung dan Ikan Tembang, sedangkan untuk perikanan darat adalah Ikan Bandeng dengan produksi 3.204,4 ton pada Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019 yang hanya mencapai mencapai 2.231,77 ton. Jika dibandingkan dengan produksi rumput laut dari 5 jenis secara total juga ada penurunan produksi pada tahun 2018 mencapai 538.680,4 ton menjadi 455.198,38 ton pada tahun 2019. Dengan melibatkan pelaku usaha perikanan sekitar 14.824 orang, dengan jumlah perahu/motor temple/kapal motor berkisar 3.741 buah dan terdapat 14 jenis alat penangkapan ikan dengan jumlah 1.162 unit armada penangkapan berukuran 1-30 GT.

C. Potensi Pariwisata dan Budaya

Kabupaten Takalar merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang didukung dengan keadaan alam, kehidupan masyarakat, kondisi sosial budaya dan dunia usaha. Untuk menunjang pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Takalar, pihak pemerintah dan pengelola terus memacu dalam pengembangan objek-objek wisatanya dalam upaya merangsang perekonomian daerah serta menciptakan lapangan kerja.

Potensi wisata Kabupaten Takalar dapat dibagi atas tiga, yaitu yang sudah dipasarkan, sudah dikembangkan dan belum dikembangkan. Objek wisata yang telah dipasarkan adalah Pantai Topejawa, merupakan kawasan wisata pantai yang terletak di Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang.

Potensi wisata yang sudah dikembangkan adalah; (1) kawasan wisata bahari di Pulau Sanrobengi dan Pulau Palenggu; (2) kawasan permandian alam di Permandian Alam Baruga; (3) kawasan wisata budaya berupa rumah adat Karaeng Galesong dan Maudu Lompoa di Cikoang.

D. Pesta Nelayan

Kawasan wisata yang belum dikembangkan adalah kepariwisataan di Kabupaten Takalar yang dapat dikembangkan adalah: (1) kawasan wisata pantai Pasir Putih Mangarabombang, Pantai Pokko dan Pantai Parappa; (2) taman wisata alam Pulau Tanakeke; dan (3) kawasan wisata budaya berupa pesta adat Gaukang Karaeng Galesong, Benteng Sanrobone dan makam ibu Sultan Hasanuddin.

Selain potensi wisata tersebut di Kabupaten Takalar juga terdapat kawasan agrowisata. Sebenarnya Kabupaten Takalar memiliki potensi Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang besar tetapi belum dikembangkan/dipromosikan secara optimal, sehingga kurang dikenal oleh para wisatawan asing maupun lokal.

E. Potensi Investasi

Secara garis besar potensi investasi kabupaten Takalar yang terdapat di Wilayah Kabupaten Takalar mencakup:

Tabel 12
Potensi Investasi Kabupaten Takalar

No	Sektor	Komoditi	Lokasi
1	Pertanian	Tebu, Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Kedelai, Kacang Hijau, Sayur-sayuran,dan buah-buahan serta ternak	Seluruh wilayah kecamatan se-kab. Takalar
2	Kelautan dan Perikanan	Perikanan laut, perikanan budidaya, dan rumput laut, telur ikan terbang	Kec.Marbo, Kec. Mapsu, Kec. Sanrobone, Kec. Galesong, Galsel, dan Galut
3	Industri	Briket batubara, Etanol, Gerabah,Meubel, Pembuatan batu bata, Pengolahan rumput laut,pengolahan ikan, garam, konveksi, anyaman bambu, serat lontara dan daun pandan, pertenunan dan lain sebagainya	Tersebar disembilan kecamatan
4	Perdagangan dan Jasa	Transportasi darat dan laut, swalayan/ minimarket, Koperasi dan UKM, property,	Tersebar disembilan kecamatan
5	Pariwisata	Hotel Pantaiwisata, Penginapan, rumah makan,Travel, BPLH Puntondo, dan objek wisata pantai, pulau, budaya dan agama	Tersebar disembilan kecamatan

Sumber: Kabupaten Takalar Dalam Angka 2022.

Didalam Pengembangan investasi Pemerintah Kabupaten Takalar berupaya mengembangkan investasi terpadu, untuk lebih memudahkan investor dalam menciptakan peluang usaha. Proyek investasi yang ditawarkan adalah :

a) Pengembangan Kawasan Kota Mandiri/Kawasan Industri Takalar yang dipusatkan di Kecamatan Mangarabombang dengan luas untuk tahap pertama 5.000 ha. Kawasan ini sudah dilakukan kerjasama dengan pihak PT Jababeka.

b) Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Kabupaten Takalar dengan luas 3.500 ha di Kecamatan Mangarabombang Desa Punaga, Desa Laikang dan Desa Cikoang untuk tahap pertama 350 ha .

c) Pengembangan bendungan Pammukkulu yang sementara berlangsung pembebasan lahan untuk kebutuhan irigasi persawahan dan pusat listrik khusus kabupaten Takalar.

d) Pusat pengembangan agribisnis perikanan dan rumput laut sampai dengan tahun 2019 memproduksi rumput laut Kabupaten Takalar baik jenis euchema cottoni dan jenis gracillaria serta jenis eucheuma spinosum mencapai lebih dari 455.198,38 ribu ton basah, sehingga tidak dapat dipungkiri Kabupaten Takalar adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki produksi terbesar, walaupun harus diakui kualitas kedua jenis rumput laut tersebut yang perlu terus didorong untuk ditingkatkan.

e) Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Takalar memiliki potensi objek wisata yang cukup beragam, antara lain objek wisata pantai yang terbentang sepanjang 74 km garis pantai mulai dari kecamatan Galesong Utara, Galesong, Galesong Selatan, Sanrobone, Mappakasunggu, dan Mangarabombang. Objek wisata gunung dan pulau serta objek wisata budaya seperti Maudu Lompoa di Cikoang dan Pesta Nelayan di Galesong.

f) Pengembangan Pusat Pelelangan Ikan yang ditempatkan di Pelabuhan Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara.

g) Pengembangan kawasan perkebunan tebu di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan.

F. Potensi Pengembangan Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Pembinaan di bidang koperasi dan UMKM diarahkan pada bimbingan, pengawasan, pemberdayaan koperasi dan UMKM. Selain itu fasilitasi permodalan dan pengesahan lembaga hukum dalam rangka peningkatan produktifitas pengusaha, membangun motivasi disiplin dan etos kerja yang profesional mengarah pada proses produksi efisiensi efektif yang mengembangkan pola kemitraan dan kewirausahaan.

Pada tahun 2019 terdapat 18 jenis koperasi di Kabupaten Takalar, sebanyak 361 kopersai dengan jumlah anggota sebanyak 47.448 orang, dari jumlah

koperasi yang ada terdapat 243 kopersai yang aktif, 76 yang tidak aktif dan bahkan ada yang dibekukan sebanyak 42 koperasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel keragaman koperasi di Kabupaten Takalar dibawah ini:

Tabel 13
Rekapitulasi Keragaman Koperasi Kabupaten Takalar Tahun 2021

NO	KELOMPOK/JENIS	KOPERASI (Unit)				ANGGOTA/ (Orang)	
		JML	AKTIF	T. AKTIF	BEKU	LK	PR
1	KOPERASI UNIT DESA (KUD)	19	17	2	0	7.282	3.746
2	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)	41	33	7	1	32.405	1.238
3	PRIMER KOPERASI POLISI (PRIMKOPOL)	1	1	0	0	489	158
4	PRIMER KOPERASI ANGKATAN DARAT (PRIMKOPAD)	2	2	0	0	312	18
5	PRIMER KOPERASI VETERAN INDONESIA (PRIMKOVERI)	1	0	0	1	32	-
6	KOPERASI WANITA (KOPWAN)	14	9	4	1	-	1.330
7	KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)	36	27	6	3	2.853	1.833
8	KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR)	5	4	1	0	382	181
9	KOPERASI PASAR (KOPPAS)	3	1	0	2	646	544
10	KOPERASI SERBA USAHA (KSU)	87	58	18	11	5.507	3.705
11	KOPERASI PERTANIAN (KOPTAN)	26	12	7	7	1.881	824
12	KOPERASI PERIKANAN (KOPIN)	21	13	5	3	2.023	354
13	KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN)	7	4	2	1	990	456
14	KOPERASI INDUSTRI DAN KERAJINAN (KOPINKRA)	1	0	0	1	16	7
15	KOPERASI PERKEBUNAN	5	2	2	1	290	100
16	KOPERASI PETERNAKAN	2	0	2	0	69	-
17	KOPERASI LAINNYA	99	67	22	10	3.751	2.049
18	KOPERASI SEKUNDER	1	1	0	0	286	72

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Takalar 2021

Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Takalar cukup memberikan peranan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan karena industri ini mandiri dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kabupaten Takalar dikenal

sebagai sentra pengembangan industri Kerajinan Gerabah dan berbagai bentuk anyaman dari serat daun lontar dengan kualitas yang sudah diakui tingkat nasional serta berbagai bentuk kerajinan lainnya yang dikelola dalam bentuk industri rumah tangga. Keberadaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Takalar layak mendapatkan perhatian yang lebih, dalam pengembangan dan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk bisa bersaing dalam persaingan pasar modern.

Dari Sepuluh Kecamatan di Kabupaten Takalar terdapat sejumlah kelompok Industri Kecil dan Menengah yang menghasilkan aneka produk khas, yang diantaranya menjadi produk unggulan Kabupaten Takalar, seperti:

a) Industri Kerajinan Serat Lontar

Kerajinan serat lontar adalah salah satu kerajinan yang terkenal di Kabupaten Takalar yang bahan bakunya berasal dari serat pelepah pohon lontar. Kerajinan serat lontar ini merupakan kerajinan yang sudah dikenal sejak dulu dan sudah menjadi kerajinan warisan nenek moyang yang tersebar dibeberapa desa, sentra dari kerajinan ini terletak di Desa Bontokassi dan Sawakong Kecamatan Galesong Selatan. Hasil kerajinan serat lontar antara lain songkok guru dan sejenis topi lainnya, kipas anyaman, hiasan-hiasan meja, gelang, gantungan kunci dan berbagai kerajinan lainnya.

b) Industri mebel

Salah satu pusat industri meubelair di Sulawesi Selatan terletak di Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar. IKM mebel di Manongkoki memproduksi berbagai jenis mebel dengan jumlah tenaga kerja yang sangat banyak. Bahkan hampir tiap rumah yang ada di Kelurahan ini membuat mebel. Namun sayangnya jenis mebel yang diproduksi kebanyakan masih dalam bentuk setengah jadi yang kemudian dijual didaerah lain untuk diproduksi lebih lanjut.

c) Industri Gerabah

Gerabah adalah salah satu kerajinan tangan tradisonal yang berkembang lama di Kecamatan Pattalassang dan Mappakasunggu sejak tahun 1980. Usaha Kerajinan Gerabah kebanyakan adalah industri kecil atau bahkan termasuk Industri Rumah Tangga. Hasil Kerajinan Gerabah antara lain seperti guci, kursi gerabah, vas bunga, tungku, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Sentra gerabah terletak di Kecamatan Pattalassang dan beberapa di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

d) Industri Garam

Takalar merupakan penghasil garam terbesar kedua setelah Kabupaten Jeneponto di Sulawesi Selatan dengan luas lahan ±320 ha dan tahun 2018 produksi garam di Kabupaten Takalar sekitar 10.451,80 ton. Karena itu industri garam beryodium sangat potensial berkembang di Takalar dan diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan garam lokal. Industri garam beryodium terdapat di 3 kecamatan yakni Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Mangarabombang, dan Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar.

e) Industri Rumput Laut

Kondisi wilayah Takalar yang berbatasan langsung dengan selat dan laut, memungkinkan penduduk di sekitarnya dapat mengembangkan budidaya rumput laut terutama di Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Sanrobone. Namun industri pengolahan jumlahnya masih cukup terbatas dan kebanyakan masih skala Industri Rumah Tangga sehingga kebanyakan rumput laut kering langsung dijual tanpa pengolahan lebih lanjut.

f) Aneka industri kecil lainnya

Di Kabupaten Takalar selain dikenal dengan sentra serat lontar dan gerabah juga masih banyak IKM yang mempunyai hasil produksi tak kalah dengan daerah lainnya, seperti makanan dodol yang terdapat di Kecamatan Mangarabombang, Selain itu juga tak kalah menariknya produksi cemilan lainnya yang merupakan ciri khas Kabupaten Takalar, seperti bipang yang terletak di Kecamanatan Pattalassang. Bipang ini merupakan produksi IKM yang paling diminati masyarakat yang berkunjung di Takalar, karena mempunyai aneka macam rasa dan sangat cocok dijadikan oleh-oleh atau buah tangan.

7.2.1.9. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan, yang diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Idealnya Pemerintah Kabupaten Takalar mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan hanya bertumpu pada PAD.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi dan tujuan yang telah ditetapkan berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah berkaitan pendapatan diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah kabupaten termasuk mengembangkan BUMD.

Program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

yang berada di wilayah Kabupaten Takalar. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan target PAD yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten setiap tahunnya belum terpenuhi. Selama ini PAD bertumpu pada Pajak dan Retribusi Daerah, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa juga diperoleh dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Upaya untuk memaksimalkan PAD dari hasil perusahaan daerah bisa dilakukan dengan pemberdayaan BUMD yang dapat ditempuh melalui strategi reformasi BUMD, restrukturisasi BUMD dan profitisasi BUMD.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah yaitu kemampuan Pemerintah Daerah agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mengingat kontribusi PAD terhadap pendapatan yang masih relatif kecil terhadap pendapatan daerah maka PAD senantiasa harus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat mengimbangi pendapatan daerah dari dana perimbangan.

b. Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemenkeuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik *(public accountability)* dengan berdasar pada prinsip *value for money*.

Untuk itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja *(performance bugdet)* yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang mencerminkan adanya efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pengeluaran daerah juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta *memperhatikan* prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari kegiatan yang dilakukan.

Penggunaan belanja juga direncanakan untuk lebih berfokus kepada kegiatan-kegiatan yang lebih aspiratif dan kreatif yang merangsang perkembangan masyarakat dan pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan hendaknya yang merupakan pengembangan potensi masyarakat dan potensi pemerintah dengan tetap

mempertimbangkan efisiensi dengan membandingkan antara nilai ekonomis dan manfaat kegiatan itu sendiri.

c. Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan berkaitan dengan pembiayaan yang dilakukan dalam hal terjadi defisit anggaran adalah menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penggunaan dana cadangan dan penjualan aset daerah yang dipisahkan untuk menutupi defisit tersebut.

Hal tersebut diambil agar kebijakan fiskal dapat berjalan sehingga dapat mendorong dan mengembangkan perekonomian daerah serta menjalankan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

d. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaran pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Takalar terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis semakin meningkat. Angka melek huruf yang semula tercatat senilai 80,80% menjadi 100%. Keberhasilan lain terlihat di Bidang Kesehatan dengan dijalankannya Program Kesehatan Gratis akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Wujud dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercakup dalam Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar 68.31% pada tahun 2022. (Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Takalar Tahun 2022).

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab. Takalar Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022, Guna memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

Kinerja Pendapatan Pemerintah Kab. Takalar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.192.912.350.127,00, yang terdiri dari anggaran pendapatan untuk urusan wajib senilai Rp345.763.041.000,00 anggaran pendapatan untuk urusan pilihan senilai Rp9.304.853.000,00, anggaran pendapatan untuk penunjang dan pendukung senilai Rp3.415.057.886.303,82 dan senilai Rp789.773.730.127,00.

Tabel 14
Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan Pemerintah Daerah
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	152.665.924.000,00	138.319.383.215,00	90,60
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	161.655.125.000,00	135.274.008.351,40	83,68
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.441.992.000,00	30.934.279.375,00	98,39
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	369.695.000,00	359.005.000,00	97,11
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlin	4.692.519.000,00	4.314.574.599,00	91,95
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	7.798,900,000,00	7.650.850.000,00	98,10
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1.414,577,000,00	1.439.362.470,00	101,75
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	127,500,000,00	144.650.000,00	113,45
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Meneng	1.115,000,000,00	1.199.500.500,00	107,58
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	22.552,535,000,00	1.670.389.334,00	7,41
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	10.000,000,000,00	9.995.230.160.00	99,95
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	9.304,853,000,00	9,227,680,416.00	99,17

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			
4.01	Sekretariat Daerah	2.316.000.000,00	2.301.130.779,54	99,36
5.02	Keuangan	787.457.730.127,00	781.214.439.852,42	99,21
	TOTAL	1.192.912.350.127,00	1.124.044.484.052,36	94,23

Sumber: LRA Tahun Anggaran 2022

b. Belanja Daerah

Kinerja belanja Pemerintah Kab. Takalar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.534.891.281.980,00 yang terdiri dari anggaran belanja untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan dan unsur pemerintahan umum dengan realisasi senilai Rp1.405.212.795.285,00 atau senilai 91,55%.

Tabel 15
Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah
TA. 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	5	6
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**1,060,767,348,837.00**	**969,114,036,127.00**	**91.36**
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	341,387,789,984.00	316,614,499,450.00	92.74
1.01.2.22.0.00.01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	341,387,789,984.00	316,614,499,450.00	92.74
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	472,483,137,555.00	429,283,697,050.00	90.86
1.02.0.00.0.00.02	Dinas Kesehatan	352,425,559,343.00	327,065,303,084.00	92.80
1.02.0.00.0.00.35	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	120,057,578,212.00	102,218,393,966.00	85.14
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	216,750,886,401.00	195,014,544,493.00	89.97
1.03.1.04.0.00.03	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	216,750,886,401.00	195,014,544,493.00	89.97
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	16,188,626,738.00	15,373,071,769.00	94.96

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.05.0.00.0.00.04	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10,456,516,680.00	9,926,271,983.00	94.93
1.05.0.00.0.00.34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,732,110,058.00	5,446,799,786.00	95.02
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	13,956,908,159.00	12,828,223,365.00	91.91
1.06.2.13.0.00.08	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	13,956,908,159.00	12,828,223,365.00	91.91
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	122,653,074,785.00	110,179,914,968.00	89.83
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	6,802,095,455.00	5,688,749,494.00	83.63
2.07.2.18.3.32.09	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0	0	0
2.07.2.18.3.32.09	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,802,095,455.00	5,688,749,494.00	83.63
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlin	9,805,426,068.00	8,506,142,094.00	86.75
2.08.2.14.0.00.10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9,805,426,068.00	8,506,142,094.00	86.75
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	34,053,210,628.00	32,019,887,022.00	94.03
2.09.3.27.0.00.11	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	0	0	0
2.09.3.27.0.00.11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	34,053,210,628.00	32,019,887,022.00	94.03
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	17,615,548,185.00	16,610,315,534.00	94.29
2.10.2.11.0.00.12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	17,615,548,185.00	16,610,315,534.00	94.29
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pen	5,131,066,200.00	4,717,725,456.00	91.94
2.12.0.00.0.00.13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5,131,066,200.00	4,717,725,456.00	91.94

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	7,271,626,426.00	6,297,554,614.00	86.60
2.15.0.00.0.00.14	Dinas Perhubungan	7,271,626,426.00	6,297,554,614.00	86.60
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	5,257,229,922.00	4,852,166,492.00	92.30
2.16.2.20.2.21.15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	5,257,229,922.00	4,852,166,492.00	92.30
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Meneng	9,788,453,214.00	8,301,375,235.00	84.81
2.17.3.30.3.31.16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	0.00	42,391,100.00	0
2.17.3.30.3.31.16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9,788,453,214.00	8,258,984,135.00	84.37
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	12,733,770,342.00	9,566,652,945.00	75.13
2.19.3.26.0.00.17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	12,733,770,342.00	9,566,652,945.00	75.13
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	14,194,648,345.00	13,619,346,082.00	95.95
2.23.2.24.0.00.18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	14,194,648,345.00	13,619,346,082.00	95.95
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**23,760,366,787.00**	**21,792,429,905.00**	**91.72**
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	15,479,380,587.00	14,571,124,886.00	94.13
3.25.0.00.0.00.19	Dinas Perikanan	15,479,380,587.00	14,571,124,886.00	94.13
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6,912,851,274.00	6,258,967,991.00	90.54
3.27.0.00.0.00.37	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	6,912,851,274.00	6,258,967,991.00	90.54
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1,368,134,926.00	962,337,028.00	70.34
3.31.3.30.0.00.38	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1,368,134,926.00	962,337,028.00	70.34
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**74,581,029,291.00**	**67,513,601,805.00**	**90.52**
4.01	Sekretariat Daerah	40,113,697,852.00	37,099,978,542.00	92.49

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.01.0.00.0.00.00	Sekretariat Daerah	40,113,697,852.00	37,099,978,542.00	92.49
4.02	Sekretariat Dprd	34,467,331,439.00	30,413,623,263.00	88.24
4.02.0.00.0.00.21	Sekretariat DPRD	34,467,331,439.00	30,413,623,263.00	88.24
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**196,403,727,924.00**	**186,503,787,635.00**	**94.96**
5.01	Perencanaan	6,016,833,027.00	5,364,306,182.00	89.15
5.01.5.05.0.00.17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6,016,833,027.00	5,364,306,182.00	89.15
5.02	Keuangan	184,200,293,698.00	175,336,222,212.00	95.19
5.02.0.00.0.00.02	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0
5.02.0.00.0.00.02	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	180,467,227,448.00	172,070,579,217.00	95.35
5.02.0.00.0.00.36	Badan Pendapatan Daerah	3,733,066,250.00	3,265,642,995.00	87.48
5.03	Kepegawaian	6,186,601,199.00	5,803,259,241.00	93.80
5.03.5.04.0.00.22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,186,601,199.00	5,803,259,241.00	93.80
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**11,513,959,641.00**	**9,336,115,906.00**	**81.09**
6.01	Inspektorat Daerah	11,513,959,641.00	9,336,115,906.00	81.09
6.01.0.00.0.00.23	Inspektorat	11,513,959,641.00	9,336,115,906.00	81.09
7	**Unsur Kewilayahan**	**40,389,634,194.00**	**36,550,747,292.00**	**90.50**
7.01	Kecamatan	40,389,634,194.00	36,550,747,292.00	90.50
7.01.0.00.0.00.25	Kecamatan Pattallassang	8,683,107,323.00	7,968,738,980.00	91.77
7.01.0.00.0.00.26	Kecamatan Polongbangkeng Utara	8,102,058,576.00	7,450,133,144.00	91.95
7.01.0.00.0.00.27	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	5,962,056,896.00	5,624,489,543.00	94.34
7.01.0.00.0.00.28	Kecamatan Mangarabombang	3,604,352,426.00	3,126,573,795.00	86.74
7.01.0.00.0.00.29	Kecamatan Mappakasunggu	2,887,948,065.00	2,617,380,501.00	90.63
7.01.0.00.0.00.30	Kecamatan Sanrobone	1,672,597,132.00	1,487,580,976.00	88.94
7.01.0.00.0.00.31	Kecamatan Galesong Selatan	2,218,428,764.00	1,902,075,895.00	85.74

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
7.01.0.00.0.00.32	Kecamatan Galesong	2,164,112,857.00	1,904,369,712.00	88.00
7.01.0.00.0.00.33	Kecamatan Galesong Utara	3,477,247,270.00	3,103,482,671.00	89.25
7.01.0.00.0.00.34	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	1,617,724,885.00	1,365,922,075.00	84.43
8	**Unsur Pemerintahan Umum**	**4,822,140,521.00**	**4,222,161,647.00**	**87.56**
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	4,822,140,521.00	4,222,161,647.00	87.56
8.01.0.00.0.00.24	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4,822,140,521.00	4,222,161,647.00	87.56
	Total	**1,534,891,281,980.00**	**1,405,212,795,285.00**	**91.55**

Sumber: LRA Tahun Anggaran 2022

7.4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

7.4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas di Pemerintah Daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

a) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
b) Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Takalar secara keseluruhan, sedangkan entitas akuntansi meliputi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah lainnya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Setiap Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Takalar berkewajiban menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yang dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan Entitas Akuntansi akan menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kabupaten Takalar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat 5 OPD yang mengalami perubahan nomenkelatur dan 3 OPD mengalami pemekaran. dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 16
Rincian Penambahan dan Perubahan Nomenklatur SKPD

No	Nomenklatur SKPD Lama	Nomenklatur SKPD Baru	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perubahan
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Perubahan
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perubahan

No	Nomenklatur SKPD Lama	Nomenklatur SKPD Baru	Keterangan
4	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Perubahan
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perubahan
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Perubahan
7		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penambahan
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Perubahan
9		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penambahan
10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan
11		Badan Pendapatan Daerah	Penambahan
12	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Perubahan

Adapun entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah kab. Takalar sesuai Perda Nomor 05 Tahun 2022 pada tabel berikut:

Tabel 17
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Kab. Takalar

No.	OPD	Alamat
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan Khaeruddin Dg. Ngampa No.3 Takalar
2	Dinas Kesehatan	Jalan H. Padjonga Dg. Ngalle No.1 Takalar
3	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	Jalan H. Ince Husain Dg. Parani Takalar
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Diponegoro No.78A Takalar
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Ranggong Dg. Romo Takalar, Kel. Pappa
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jalan Syech Yusuf No.03 Takalar
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jalan Jenderal Sudirman No.28 Takalar
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jalan Jenderal Sudirman No.30 Takalar
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Jalan Fitrah No.14
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	Jalan Syech Yusuf No.2B Takalar
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jalan H. Padjonga Dg. Ngalle No.7 Takalar
13	Dinas Perhubungan	Jalan Mappajalling Dg.Kawang

No.	OPD	Alamat
14	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jalan H. Ince Husain Dg. Parani No.63 Takalar
16	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Jalan Syech Yusuf No.16 Takalar
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jalan H.M. Suaib Pasang No.3 Takalar
18	Dinas Perikanan	Jalan Firah No.12 Takalar
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jalan Syech Yusuf No.3B Takalar
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jalan Kompleks Pasar Sentral Kel. Kalabbirang
21	Sekretariat Daerah	Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar
22	Sekretariat DPRD	Jalan Jenderal Sudirman Takalar
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jalan Syech Yusuf No.02 Takalar
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar
25	Badan Pendapatan Daerah	Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar
27	Inspektorat	Jalan Firah No.4 Takalar
28	Kecamatan Pattallassang	Jalan Diponegoro No.49 Takalar
29	Kecamatan Polongbangkeng Utara	Jalan H. Syamsuddin Dg. Ngerang Kel. Palleko
30	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	Jalan Chaeruddin Dg.Ngampa Kel. Bulukunyi
31	Kecamatan Mangarabombang	Jalan Poros Takalar-Jeneponto Km.47
32	Kecamatan Mappakasunggu	Jalan Pendidikan No.2 Cilallang
33	Kecamatan Sanrobone	Jalan Benteng Sanrobone Takalar
34	Kecamatan Galesong Selatan	Jalan Sidayu Bontokassi Takalar
35	Kecamatan Galesong	Jalan Kr. Bontomarannu No.2 Boddia Takalar
36	Kecamatan Galesong Utara	Jalan Bauru Dg. Gau Bontolebang Takalar
37	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	Jalan Maccinibaji Kep. Tanakeke
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Jalan H. Padjonga Dg. Ngalle No.3 Takalar

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan istilah Sisa (lebih/kurang)

Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan..

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

Adapun penerapan basis akuntansi akrual ini baru diterapkan Pemerintah Kabupaten Takalar pada tahun anggaran 2015 untuk pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi laporan keuangan tahun 2014 berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.3. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar ditetapkan melalui Peraturan Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan defenisi, pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan akun-akun. Kebijakan akuntansi adalah inplementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka PSAP akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi *(accountancy treatment)* atas transaksi yang terjadi.

Kebijakan Akuntansi Akun dan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri atas:

a. Kebijakan Akuntansi Aset
b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
c. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA
e. Kebijakan Akuntansi Belanja
f. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

g. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
h. Kebijakan Akuntansi Beban
i. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan
j. Perubahan Kebijakan Akuntansi
k. Perubahan Estimasi Akuntansi
l. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
m. Peristiwa Luar Biasa

Penjelasan atas Kebijakan Akuntansi Pemda adalah sebagai berikut:

7.4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

- **Aset Lancar**

a. Defenisi Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari:
(1) kas di Kas Daerah;
(2) kas di Bendahara Penerimaan;
(3) kas di Bendahara Pengeluaran;
(4) kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
(5) kas lainnya.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:
1. simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
2. investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam BAS.

b. Pengakuan Kas dan Setara Kas

Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan:
1. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

   Atas dasar angka 1 tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

c. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain :

1. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
2. rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

- **Investasi Jangka Pendek**

a. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
   b. nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai **dana** yang ditempatkan.
2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan,
3) Jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.
4) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

b. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilainominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
   Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

(a) apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(b) apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat senilai nilai nominalnya.

c. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar

b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

(1) kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

(2) jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;

(3) perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);

(4) penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan

(5) perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset Lain-Lain dan sebaliknya (jika ada).

- **Piutang**

1) Pengakuan Piutang

a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

(1) terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan

(2) terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

(1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan

(2) jumlah piutang dapat diukur.

c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen

penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku senilai hak daerah yang belum dibayarkan.

d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya senilai jumlah yang belum ditransfer.

f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
   (1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
   (2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

g) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2K)/ Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM)/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

2) Pengukuran Piutang

a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

(1) disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
(2) disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
(3) disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
(1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
(2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.
(3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
(4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
(1) Dana Bagi Hasil disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
(2) Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
(3) Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

(1) Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
(2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

e) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan(write-off) dan penghapusbukuan (write down).
g) Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 5 (lima) dengan klasifikasi sebagai berikut:
(1) kualitas Piutang Lancar;
(2) kualitas Piutang Lancar dengan perhatian khusus;
(3) kualitas Piutang Kurang Lancar;
(4) kualitas Piutang Diragukan; dan
(5) kualitas Piutang Macet.
i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
(1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
(2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).
j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
(b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
(c) Wajib Pajak kooperatif;
(d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
(e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
(2) Kualitas Lancar dengan perhatian khusus, dengan kriteria:
(a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
(b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
(c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
(d) Wajib Pajak mengajukan keberpiutaatan/banding.
(3) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
(b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;

(c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
(d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
(a) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun;
(b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
(c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
(d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(5) Kualitas Macet, dengan kriteria:
(a) Umur piutang diatas 4 tahun;
(b) Wajib Pajak tidak ditemukan;
(c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
(d) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

k) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
(b) Wajib Pajak kooperatif;
(c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
(d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Lancar dengan perhatian khusus, dengan kriteria:
(a) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
(b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
(c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
(b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
(c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(4) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
(a) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun;
(b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
(c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(5) Kualitas Macet, dengan kriteria:
(a) Umur piutang diatas 4 tahun;
(b) Wajib Pajak tidak ditemukan;
(c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
(d) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

l) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

(1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
(2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;

(3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
(4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

m) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
(1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
(2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
(3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
(4) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

n) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
(1) 1.0% (satu perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
(2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar dengan perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
(3) 25% (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
(4) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
(5) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

o) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

p) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

3) Pemberhentian Pengakuan

a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).
c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
   (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
      (a) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
      (b) Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas.
      (c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
   (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
   (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
g) Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
h) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima milyar rupiah oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas lima milyar rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
i) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
   (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

(2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
(3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
(4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
(5) Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
(6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan /peraturan write off di negara lain.
(7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan,kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (write down maupun write off) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

4) Pengungkapan Piutang

(1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
   (a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
   (b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
   (c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
   (d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
(2) TP-TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
(3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
(4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterimapembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan

perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

- **Beban Dibayar Dimuka**

1) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka
   Beban diabayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
2) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka
   Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/dibayarkan.
3) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka
   Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

- **Persediaan**

1. Pengakuan Persediaan
   a. Persediaan diakui:
      (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
      (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
   b. Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
2. Pengukuran Persediaan
   a. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir untuk selain obat dan alat kesehatan, sedangkan untuk obat dan alat kesehatan menggunakan FIFO.
   b. Persediaan disajikan senilai:
      (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
      (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

3. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
   a. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
   b. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
      1. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
      2. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

- **Aset Untuk Dikonsolidasikan**

1) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan
   Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.
2) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan
   Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
3) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan
   Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

- **Aset Non Lancar**

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Investasi Jangka Panjang
   1) Pengakuan Investasi Jangka Panjang
      a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
         (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
         (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
      b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
         (1) deviden tunai;
         (2) deviden saham; dan

(3) bagian laba.

c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-Lain PAD yang Sah).

d) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

e) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.

(2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

2) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

(1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.

(2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

(3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah senilai biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan

menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.

e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
(1) metode biaya;
(2) metode ekuitas; dan
(3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

h) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat senilai biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

i) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi senilai bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan

terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

3) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
   a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir
      (1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding).
      (2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
      (3) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir mengacu pada Peraturan Bupati.
      (4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan angsuran pengembalian adalah sebagai berikut:
      (5) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

Tabel 18
Penyisihan investasi non permanen

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Angsuran				
		Tidak melampaui jatuh tempo	Jatuh tempo 0-3 Bulan	Jatuh Tempo 4-9 bulan	Jatuh Tempo 10-12 bulan	Jatuh Tempo Lebih dari 12 bulan
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0%	20%	50%	75%	100%

b. Aset Tetap
   1) Pengakuan Aset Tetap
      a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
      b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
         (1) Berwujud;
         (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
         (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
         (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
         (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

(6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

f) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

g) Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2) Pengukuran Aset Tetap

a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 19
Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluara nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

3) Penilaian Awal Aset Tetap
   Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
4) Perolehan Secara Gabungan
   Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
5) Aset Tetap Digunakan Bersama
   a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
   b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.
6) Aset Perjanjian Kerja sama Fasos Fasum
   a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
   b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
7) Pertukaran Aset (Exchange of Assets)
   a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
   b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
   c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas.

Dalam kondisiseperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

8) Aset Donasi

a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

b) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

c) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

9) Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya senilai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

a) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

(a) bertambah ekonomis/efisien;

(b) bertambah umur ekonomis;

(c) bertambah volume; dan/atau bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (capitalization thresholds).

b) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

c) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 20
Batasan minimal kapitalisasi aset tetap

(dalam rupiah)

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALISASI
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan Mesin		
	Pembelian selain angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak Bermotor	Harga per barang Satuan	300.000,00
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin (over haul)	Selain angkutan Darat bermotor beroda dua	5.000.000,00
	Perbaikan menyeluruh Termasuk turun mesin (over haul)	Angkutan bermotor dua darat beroda	1.000.000,00
	Pembelian angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per barang Satuan	500.000,00
3	Gedung dan Bangunan		50.000.000,00
	Rehabilitasi total atau menambah ruang		10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		50.000.000,00
	Jalan, Jembatan dan jaringan air		Tidak dibatasi
	Penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon		300.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan Kepustakaan		Tidak dibatasi
	Bercorak kesenian/kebudayaan		300.000,00

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALISASI
	Hewan/ternak/ tanaman	Sepanjang bukan dalam rangka untuk diperjualbelikan dan/atau pemberian bantuan	Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalam pengerjaan		Tidak dibatasi

10) Penyusutan
   a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method) berdasarkan tahun perolehan.
   b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
      (1) Nilai residu 0;
      (2) Ada nilai residu konsekuensi dengan peraturan bupati penilaian barang
   c) Untuk aset yang diperoleh pada tahun berjalan penyusutan dilakukan pada penyusunan Laporan Keuangan tahun berkenaan.
   d) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 21
Masa manfaat aset tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**				**ASET TETAP**	
1	**3**	**2**			**Peralatan dan Mesin**	
1	**3**	**2**	**01**		**Alat Besar**	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	**3**	**2**	**02**		**Alat Angkutan**	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	**3**	**2**	**03**		**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	**3**	**2**	**04**		**Alat Pertanian**	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	**3**	**2**	**05**		**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	**3**	**2**	**06**		**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	**3**	**2**	**07**		**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	**3**	**2**	**08**		**Alat Laboratorium**	
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	**3**	**2**	**09**		**Alat Persenjataan**	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
1	**3**	**2**	**10**		**Komputer**	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	**3**	**2**	**11**		**Alat Eksplorasi**	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	**3**	**2**	**12**		**Alat Pengeboran**	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	**3**	**2**	**13**		**Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian**	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1	**3**	**2**	**14**		**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	**3**	**2**	**15**		**Alat Keselamatan Kerja**	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat Sar	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	**3**	**2**	**16**		**Alat Peraga**	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	**3**	**2**	**17**		**Peralatan Proses/Produksi**	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	**3**	**2**	**18**		**Rambu – Rambu**	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	**3**	**2**	**19**		**Peralatan Olah Raga**	

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	3
1	**3**	**3**			**Gedung dan Bangunan**	
1	**3**	**3**	**01**		**Bangunan dan Gedung**	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	**3**	**3**	**02**		**Monumen**	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	**3**	**3**	**03**		**Bangunan Menara**	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara / Perambuan	40
	3	**3**	**04**		**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	
1	3	3	04	01	Tugu / Tanda Batas	50
1	**3**	**4**			**Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	
1	**3**	**4**	**01**		**Jalan dan Jembatan**	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	**3**	**4**	**02**		**Bangunan Air**	
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	**3**	**2**	**19**		**Peralatan Olah Raga**	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	3
1	**3**	**3**			**Gedung dan Bangunan**	
1	**3**	**3**	**01**		**Bangunan dan Gedung**	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	**3**	**3**	**02**		**Monumen**	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	**3**	**3**	**03**		**Bangunan Menara**	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara / Perambuan	40
	3	**3**	**04**		**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	
1	3	3	04	01	Tugu / Tanda Batas	50
1	**3**	**4**			**Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	
1	**3**	**4**	**01**		**Jalan dan Jembatan**	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	**3**	**4**	**02**		**Bangunan Air**	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	**3**	**4**	**03**		**Instalasi**	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	**3**	**4**	**04**		**Jaringan**	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30
1	**3**	**5**			**Aset Tetap Lainnya**	
1	**3**	**5**	**02**		**Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	4

e) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan ternak, dan Tanaman.

f) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

g) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
   (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
   (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

h) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	6
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi / Overhaul dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan Pertanian	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Alat Kantor dan Rumah			
Tangga Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi / Overhaul dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Radiation Application & Non Destructive Testing	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi / Overhaul dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
laboratory		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi / Overhaul dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses /Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Monumen			
Candi/ Tugu	Renovasi	>0% s.d. 30%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peringatan / Prasasti		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Pengaman Sungai/Panti & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi / Overhaul dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi / Overhaul dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d 100%	25
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
BarangBercorakKesenian / Kebudayaan/Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalamrenovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam renovasi	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi / Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

11) Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)
    a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
    b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.
12) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
    Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.
    Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
13) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap
    a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
    b) Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
        (1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
        (2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
            (a) penambahan;
            (b) pelepasan;
            (c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
        (3) mutasi aset tetap lainnya.
        (4) informasi penyusutan, meliputi:
            (a) nilai penyusutan;
            (b) metode penyusutan yang digunakan;
            (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan

(d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

(1) aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(2) jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

(3) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

(4) Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.

(5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.

(6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

(7) Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

(8) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying amount).

(9) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

c. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
   (1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

2) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
   a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
   b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
      (1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
      (2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
      (3) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
   c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
      (1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
      (2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
      (3) biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
      (4) biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan
      (5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
   d. Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
      (1) asuransi;
      (2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
      (3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

3) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
   Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
   rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

a) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
b) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
c) uang muka kerja yang diberikan; dan
d) retensi.

d. Dana Cadangan
   1) Pengakuan Dana Cadangan
      Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
   2) Pengukuran Dana Cadangan
      a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
      b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
      c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
      d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
   3) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan
      a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
      b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai senilai hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK.

e. Aset Lainnya
   1) Pengakuan Aset Lainnya
      a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
      b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan Lain-Lain.
      c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
         (1) telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
         (2) telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
   (1) aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
   (2) aset kerja sama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
   (3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu senilai nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
   (4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
   (5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
   (6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
   (7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:
   Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

f) Pengakuan Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset Lain-Lain.

2) Pengukuran Aset Lainnya
   a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau senilai nilai wajar pada saat perolehan.
   b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
   c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
   (1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan senilai nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
   (2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
   (3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat senilai nilai bersih yang tercatat atau senilai nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

f) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
   (1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
   (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
   Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
      (a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
      (b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
      (c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

g) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
   (1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui senilai biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
   (2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.

(3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan senilai nilai wajar.

i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain menurut nilai tercatatnya.

j) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang- undangan.

3) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

e) Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
   (1) masa manfaat dan metode amortisasi;
   (2) nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud; dan
   (3) penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

f) Aset Lain-Lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

g) Berdasarkan masa manfaat, Aset Tidak Berwujud dapat dibedakan menjadi:
   (1) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (finite life) yaitu Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, Software, Lisensi, Hasil

Kajian, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan dengan;

(2) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life) yaitu Goodwill.

f. Amortisasi

1) Pengakuan Amortisasi

Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

2) Pengukuran Amortisasi

a) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

b) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 22
Masa manfaat Aset Tidak Berwujud

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TIDAK BERWUJUD	
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	20
Royalti	20
Software	5
Lisensi	10
Hasil Kajian	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	5

3) Pengungkapan Amortisasi

Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai "Beban Amortisasi".

4) Penyajian Amortisasi

Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari "Aset Tidak Berwujud", dengan format sebagai berikut:

NERACA
Per 31 Desember 20X1

ASET		KEWAJIBAN		
ASET LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
ASET TETAP				
……		EKUITAS		
ASET LAINNYA	XXX			
ASET TIDAK BERWUJUD	XXX	EKUITAS		XXX

7.4.3.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- **Kewajiban Jangka Pendek**

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

(b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

(2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

(3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah senilai kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

(b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan senilai jumlah yang masih harus disetorkan.

b. Utang Bunga (Accrued Interest)

(1) Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest)
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

(2) Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah senilai kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

(3) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrued Interest) Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

(1) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

(2) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

(3) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

(1) Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

(2) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan
   (a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
   (b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

(3) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(1) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

(b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand).

(2) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah senilai jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah senilai saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

(3) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

f. Pendapatan Diterima Dimuka

(1) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

(2) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah senilai bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

(3) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

g. Utang Beban

(1) Pengakuan Utang Beban Utang Beban diakui pada saat:

(a) beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(b) terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan

barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

(c) barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(2) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah senilai beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

(3) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

h. Utang Jangka Pendek Lainnya

(1) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

(2) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah senilai kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

(3) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

a. Utang Dalam Negeri

(1) Pengakuan Utang Dalam Negeri

(a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

(b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

(2) Pengukuran Utang Dalam Negeri

(a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah senilai jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

(b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah senilai total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

(c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat senilai nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

(3) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Utang Jangka Panjang Lainnya

(1) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

(b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

(2) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG senilai nilai yang belum dibayar.

(b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

(3) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.

(b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

7.4.3.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Definisi Ekuitas

(1) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
(2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.
(3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan Lain-Lain yang tersaji dalam LPE.
(4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
(5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
(6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.
    a. Pengakuan Ekuitas
       Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.
    b. Pengukuran Ekuitas
       Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.
    c. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas
       Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

7.4.3.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

a. Pengakuan Pendapatan LRA
   Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
   Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
   (a) kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
   (b) kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
   (c) kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

(d) kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

(e) kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Pengukuran Pendapatan LRA

(1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

(1) Pendapatan – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

(2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

(a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

(b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

(c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

(d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

(1) Pendapatan Asli Daerah – LRA (PAD – LRA)

a. Pengakuan PAD – LRA

PAD – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

b. Pengukuran PAD – LRA

PAD – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

c. Penyajian dan Pengungkapan PAD – LRA

PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

(2) Pendapatan Transfer –LRA

a. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

(1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

(2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh SKPKD.

b. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA
Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LRA

a. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
(1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
(2) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh SKPKD.

b. Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

c. Penyajian dan Pengungkapan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

7.4.3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Pengakuan Belanja Belanja diakui pada saat:
(1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
(2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil.
(3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

b. Pengukuran Belanja
(1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
(2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja
(1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
(a) Belanja Operasi;
(b) Belanja Modal;

(c) Belanja Tidak Terduga; dan
(d) Belanja Transfer.
dan dijelaskan dalam CaLK.

(2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

d. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
b. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
c. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.
b. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
c. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
d. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir
(1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
(2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
(4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
(5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Pengakuan SAL
(1) Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
(2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

b. Penyajian dan Pengungkapan SAL
SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan LPSAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (face) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

7.4.3.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO

a. Pengakuan Pendapatan-Lo
(1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
(a) timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau
(b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
(2) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
(a) tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
(b) ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
(c) dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
(d) sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
(e) sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun.

Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

(3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

(4) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

(a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

(b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:

i. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah.Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

ii. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

b. Pengukuran Pendapatan-Lo

(a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi

terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-Lo

(a) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

(b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

i. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

ii. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

iii. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

iv. informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.3.8. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Pengakuan Beban

(1) Beban diakui pada:

(a) Saat timbulnya kewajiban;

(b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

(c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

(2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

(3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

(4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

(5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

(a) beban diakui sebelum pengeluaran kas;

(b) beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

(c) beban diakui setelah pengeluaran kas.

(6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban

dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

(7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

(8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

(9) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

(10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

(11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

(12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

   (a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.

   (b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

(c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
(d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
(e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan peLaporan Keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
(f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

b. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

(1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
(2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Penyajian Dan Pengungkapan Beban

(1) Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    (a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban lain- lain;
    (b) Beban Non Operasional; dan
    (c) Beban Tidak Terduga.
(2) Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
(3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
    (a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
    (b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
    (c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.3.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

(1) Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

(2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

(1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

(2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

(3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

(4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

(5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

(6) Laporan Keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

d. Koreksi Kesalahan

(1) Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

(2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

(3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

(a) kesalahan yang tidak berulang; dan

(b) kesalahan yang berulang dan sistemik.

(4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   (a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
   (b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

(5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

(6) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

(7) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

(8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

(9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

(10) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

(11) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan Lain-Lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.

   Contoh koreksi kesalahan belanja:

   (a) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan Lain-Lain.
   (b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan Lain-Lain-LRA.

(c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi denganmengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

(d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

(12) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

(a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

(b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

(13) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan Lain-Lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

(a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO.

(b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban Lain-Lain-LO dan mengurangi saldo kas.

(14) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

(a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

(b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

b. pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.
c. pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah SAL.

(15) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
(a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
(b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
d. pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
e. Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

(16) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.
Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
(a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.
(b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
(a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.
(b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun SAL.

(17) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

(a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

(b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

(18) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi

(19) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

(20) Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

7.4.3.10. Perubahan Kebijakan Akuntansi

a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian Laporan Keuangan entitas.

d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
   (1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
   (2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

7.4.3.11. Perubahan Estimasi Akuntansi

a. Agar memperoleh laporan keuangan yang handal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

7.4.3.12. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.
c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan Lain-Lain.
e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
   (1) penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
   (2) fungsi tersebut tetap ada.

(3) beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.
(4) menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

7.4.3.13. Peristiwa Luar Biasa

a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah stermasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa lanjutan lampiran peraturan bupati kebijakan Akuntansi daerah luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkat pemerintah yang lain.
c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran Lain-Lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu.Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa , terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut tidak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran Lain-Lain untuk kebutuhan darurat.
e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
   (1) Tidak merupakan kegiatan yang normal dari entitas;
   (2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

(3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
(4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

g. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang dikibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

7.5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

7.5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

7.5.1.1. Pendapatan LRA

TA 2022	TA 2021
Rp1.124.031.273.007,36	**Rp1.101.691.965.624,49**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi anggaran SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.

Pemerintah Kabupaten Takalar untuk Tahun Anggaran 2022 menganggarkan target Pendapatan senilai Rp1.192.912.350.127,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp166.206.470.195,00, Pendapatan Transfer Rp981.430.579.932,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah senilai Rp45.275.300.000,00. Dari target tersebut telah direalisasikan senilai Rp1.124.031.273.007,36 atau senilai 94,23%. Pencapaian target Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp115.649.286.063,36 atau senilai 69,58%, Pendapatan Transfer Rp966.134.348.584,00 atau senilai 98,44% dan untuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp42.247.638.360,00 atau senilai 93,31% dari jumlah anggaran. Penjelasan pada pos-pos pendapatan sebagai berikut:

7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TA 2022	TA 2021
Rp115.649.286.063,36	**Rp121.888.622.964,49**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan murni yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya yang berasal dari Daerah Kabupaten Takalar. Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp166.206.470.195,00, dan terealisasi senilai Rp115.649.286.063,36 atau senilai 69,58%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp6.239.336.901,13 atau 5,12% dari realisasi TA 2021 yang mencapai nilai senilai Rp121.888.622.964,49. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar meliputi:

Tabel 23
Rincian Penerimaan PAD per Jenis Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Pajak Daerah	50.236.582.395,00	23.417.169.232,00	46,61	24.785.643.748,50

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.901.100.000,00	3.129.372.144,00	39,61	1.899.627.570,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.563.787.800,00	10.178.141.839,00	69,89	8.238.598.134,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	93.505.000.000,00	78.924.602.848,36	84,41	86.964.753.511,99
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**166.206.470.195,00**	**115.649.286.063,36**	**69,58**	**121.888.622.964,49**

7.5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

TA 2022	TA 2021
Rp23.417.169.232,00	**Rp24.785.643.748,50**

Pajak daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Takalar dari Wajib Pajak dalam TA 2022. Pada TA 2022, Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan senilai Rp50.236.582.395,00 dan terealisasi senilai Rp23.417.169.232,00 atau senilai 46,61%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.368.474.516,50 atau 5,52% lebih rendah dari realisasi TA 2021 yang mencapai nilai realisasi senilai Rp24.785.643.748,50. Realisasi jenis pajak yang dipungut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar selama Tahun Anggaran 2022 rincian pada tabel berikut:

Tabel 24
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis pajak	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Hotel	100.000.000,00	80.256.200,00	80,26	51.345.600,00
2	Pajak Restoran	20.760.000.000,00	788.489.401,00	3,80	374.991.326,00
3	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	111.610.333,00	11,16	72.220.388,00
4	Pajak Reklame	250.000.000,00	237.820.168,00	95,13	231.255.619,00
5	Pajak Penerangan Jalan	11.000.000.000,00	11.875.541.720,00	107,96	9.577.507.447,00
6	Pajak Air Tanah	600.000.000,00	504.981.000,00	84,16	411.424.800,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	526.582.395,00	88.999.250,00	16,90	4.294.171.250,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	6.000.000.000,00	4.790.688.275,00	79,84	4.393.729.025,00

No	Jenis pajak	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000,00	4.938.782.885,00	49,39	5.378.998.293,50
	Jumlah	**50.236.582.395,00**	**23.417.169.232,00**	**46,61**	**24.785.643.748,50**

Pada tahun 2022, pendapatan Pajak Restoran terealisasi senilai Rp788.489.401,00 atau 3,80% dan realisasi Pajak Hiburan senilai Rp111.610.333,00 atau 11,16%. Rendahnya realisasi pajak tersebut karena aplikasi Smart PAD yang dirancang untuk mempermudah pembayaran pajak secara *online* sampai dengan akhir tahun 2022 tidak dilaksanakan, karena dengan aplikasi Smart PAD ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, serta rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2022 terealisasi senilai Rp88.999.250,00 atau 16,90%. Rendahnya realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disebabkan karena adanya beberapa objek pajak yang tidak produktif lagi.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2022 terealisasi senilai Rp4.938.782.885,00 atau 49,39 disebabkan belum maksimalnya kegiatan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan masih banyak penjualan tanah yang masih menggunakan NJOP Lama.

		TA 2022	TA 2021
7.5.1.1.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**Rp3.129.372.144,00**	**Rp1.899.627.570,00**

Retribusi daerah adalah Penerimaan Asli Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Takalar dari wajib retribusi. Pendapatan retribusi daerah pada TA.2022 dianggarkan senilai Rp7.901.100.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.129.372.144,00 atau 39,61%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp1.229.744.574,00 atau 64,74% dari realisasi TA 2021 yang mencapai Rp1.899.627.570,00. Pendapatan Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 25
Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Jasa Umum	5.960.000.000,00	1.273.563.919,00	21,37	443.177.670,00
2	Retribusi Jasa Usaha	938.100.000,00	968.985.000,00	103,29	818.981.000,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
3	Retribusi Perijinan Tertentu	1.003.000.000,00	886.823.225,00	88,42	637.468.900,00
	Jumlah	**7.901.100.000,00**	**3.129.372.144,00**	**39,61**	**1.899.627.570,00**

1) Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Persampahan/Kebersihan, Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pelayanan Tera/Tera Ulang yang seluruhnya mencapai realisasi senilai Rp1.273.563.919,00 atau senilai 21,37% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp5.960.000.000,00. Untuk lebih jelasnya Pendapatan Retribusi Jasa Umum dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 26
Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi Jasa Umum	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.230.000.000,00	565.918.419,00	10,82	107.487.670,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.000.000,00	67.230.000,00	134,46	93.380.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	50.000.000,00	49.400.000,00	98,80	42.300.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	605.000.000,00	530.990.500,00	87,77	178.630.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	42.015.000,00	420,15	0,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	15.000.000,00	18.010.000,00	120,07	21.380.000,00
	Jumlah	**5.960.000.000,00**	**1.273.563.919,00**	**21,37**	**443.177.670,00**

Rendahnya realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan disebabkan oleh adanya target retribusi yang tidak terealisasi pada Rumah Sakit Galesong.

2) Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Tempat Pelelangan, Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pelayanan Kepelabuhan yang seluruhnya mencapai nilai realisasi senilai Rp968.985.000,00 atau 103,29% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp938.100.000,00 pada tahun 2022. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terinci dalam tabel berikut:

Tabel 27
Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	164.000.000,00	166.025.000,00	101,23	116.400.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	490.000.000,00	647.500.000,00	132,14	474.942.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	99.000.000,00	48.000.000,00	48,48	86.900.000,00
4	Retribusi Terminal	30.000.000,00	14.760.000,00	49,20	22.150.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.000.000,00	38.000.000,00	108,57	63.327.000,00
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	6.000.000,00	10.500.000,00	175,00	14.550.000,00
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	32.000.000,00	32,00	30.200.000,00
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.500.000,00	2.100.000,00	140,00	900.000,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	12.600.000,00	10.100.000,00	80,16	9.612.000,00
	Jumlah	**938.100.000,00**	**968.985.000,00**	**103,29**	**818.981.000,00**

Rendahnya realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut disebabkan sarana dan prasarana rumah potong hewan yang tidak memadai, di mana dari 2 rumah potong hewan yang ada di Kabupaten Takalar, hanya 1 yang beroperasi, dan kurangnya minat masyarakat memotong hewan pada rumah potong hewan yang telah disiapkan. Sedangkan rendahnya realisasi retribusi terminal dan retribusi tempat pelelangan ikan disebabkan sarana dan prasarana kurang memadai dalam menunjang peningkatan pendapatan retribusi.

3) Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi atas Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Trayek dan Pendirian Badan Hukum yang mencapai nilai realisasi senilai Rp886.823.225,00 atau senilai 88,42% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp1.003.000.000,00.

Tabel 28
Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi Perijinan Tertentu	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	637.398.900,00
2.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.	Retribusi Pendirian Badan Hukum	1.000.000.000,00	886.823.225,00	88,68	0,00
	Jumlah	**1.003.000.000,00**	**886.823.225,00**	**88,42**	**637.468.900,00**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Tidak tercapainya realisasi retribusi izin trayek sebab banyaknya angkutan umum berbasis online yang mengakibatkan pengusaha angkutan umum kurang berminat lagi mengurus izin trayek yang baru.

		TA 2022	TA 2021
7.5.1.1.1.3.	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**Rp10.178.141.839,00**	**Rp8.238.598.134,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Takalar yang diperoleh dari bagian laba (dividen) atas modal yang diinvestasikan atau disertakan pada PT. Bank Sulselbar dan PT. BPR Gerbang Masa Depan Galesong pada TA 2022. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan senilai Rp14.563.787.800,00 dan terealisasi senilai Rp10.178.141.839,00 atau senilai 69,89%. Jika dibandingkan dengan TA 2021, nilai tersebut mengalami kenaikan 23,54% atau senilai Rp1.939.543.705,00 dari realisasi TA 2021 senilai Rp8.238.598.134,00. Pendapatan Deviden diterima dari dua Bank, yaitu PT. Bank Sulselbar untuk tahun buku 2021 senilai Rp9.729.677.159,00 dan dari PT. BPR Gerbang Masa Depan Galesong untuk tahun buku 2021 senilai Rp448.464.680,00. Pendapatan ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan bulan September 2022 menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah sejak bulan Oktober 2022 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Realisasi bagi hasil atas penyertaan modal dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 29
Realisasi Bagi Hasil atas Penyertaan Modal TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

No	Nama Perusahaan	Anggaran Setelah Perubahan	Nilai Bagi Hasil 2022	%	Nilai Bagi Hasil 2021
1.	Bank Sulselbar	12.563.787.800,00	9.729.677.159,00	77,44	7.929.539.197,00
2.	BPR Galesong	1.500.000.000,00	448.464.680,00	29,90	309.058.937,00
3.	BPR Surya Sejati Palleko	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**14.563.787.800,00**	**10.178.141.839,00**	**69,89**	**8.238.598.134,00**

7.5.1.1.1.4. Lain lain PAD yang Sah

TA 2022	TA 2021
Rp78.924.602.848,36	**Rp86.964.753.511,99**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Penerimaan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar selain penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang meliputi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, dan Lain-Lain PAD. Pada TA 2022, Lain-Lain PAD yang Sah dianggarkan senilai Rp93.505.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp78.924.602.848,36 atau senilai 84,41%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp8.040.150.663,63 atau senilai 9,25% dari realisasi TA 2021 senilai Rp86.964.753.511,99.

7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer

TA 2022	TA 2021
Rp966.134.348.584,00	**Rp934.014.976.418,00**

Pendapatan Transfer merupakan realisasi transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah pada TA 2022. Pendapatan Transfer dianggarkan senilai Rp981.430.579.932,00 dan terealisasi senilai Rp966.134.348.584,00 atau senilai 98,44%. Jika dibandingkan dengan TA 2021, nilai ini mengalami kenaikan senilai 3,44% atau senilai Rp32.119.372.166,00 dari jumlah realisasi TA 2021 senilai Rp934.014.976.418,00. Realisasi dan Anggaran Pendapatan transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 30
Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Pendapatan Transfer	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	835.715.832.000,00	810.052.402.175,00	96,93	788.475.093.430,00
2.	Jumlah Transfer Peme-rintah Pusat – Lainnya	75.045.028.000,00	75.045.028.000,00	100	84.350.371.400,00
3.	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	70.669.719.932,00	81.036.918.409,00	114,67	61.189.511.588,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	**981.430.579.932,00**	**966.134.348.584,00**	**98,44**	**934.014.976.418,00**

Alokasi dana transfer berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 adalah senilai Rp960.325.154.955,00. Realisasi senilai Rp929.059.685.425, selisih antara alokasi dan realisasi adalah senilai Rp31.265.469.530,00, tidak disajikan sebagai piutang mengingat sering terjadi perubahan peraturan mengenai penetapan alokasi.

7.5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	**TA 2022**	**TA 2021**
	Rp810.052.402.175,00	**Rp788.475.093.430,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut merupakan realisasi transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat pada TA 2022. Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp835.715.832.000,00 dan terealisasi senilai Rp810.052.402.175,00 atau senilai 96,93%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp21.577.308.745,00 atau senilai 2,74% dari jumlah pendapatan 2021 yang mencapai nilai senilai Rp788.475.093.430,00. Dana Perimbangan meliputi:

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat mencapai nilai Rp15.858.558.847,00 atau senilai 63,64% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp24.918.050.000,00. Bila dibandingkan dengan TA 2021, maka nilai tersebut mengalami penurunan senilai 5,51% atau senilai Rp1.366.428.516,50 dari jumlah yang dicapai selama TA 2021 senilai Rp17.475.180.893,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 31
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Bagi Hasil Pajak	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.467.480.000,00	9.166.461.570,00	141,73	9.998.785.929,00
2	DBH PPh Pasal 21	5.500.570.000,00	6.493.918.780,00	118,06	7.476.394.964,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	12.950.000.000,00	198.178.497,00	1,53	0,00
	Jumlah	**24.918.050.000,00**	**15.858.558.847,00**	**63,64**	**17.475.180.893,00**

Alokasi berdasarkan DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai PMK 218/PMK.07/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 senilai Rp14.673.625.883,00 dan terealisasi senilai Rp15.858.558.847,00.

b. Dana Bagi Hasil sumber daya

Dana Bagi Hasil sumber daya alam terealisasi senilai Rp12.567.831.065,00 dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp5.692.997.000,00 atau senilai 220,76%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.867.486.562,00 atau 63,21% dari jumlah yang terealisasi selama Tahun 2021 senilai Rp7.700.344.503,00. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 32
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	702.666.000,00	729.794.287,00	103,86	1.195.798.568,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.038.168.000,00	9.825.558.308,00	323,4	4.792.670.181,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	33.337.000,00	54.167.470,00	162,48	37.375.604,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000,00	1.958.311.000,00	102,06	1.674.500.150,00
	Jumlah	**5.692.997.000,00**	**12.567.831.065,00**	**220,76**	**7.700.344.503,00**

Alokasi berdasarkan DBH Bukan Pajak sesuai PMK 218/PMK.07/2022, Perpres Nomor 98 Tahun 2022 senilai Rp18.352.279.549,00 dan terealisasi senilai Rp12.567.831.065,00. Selisih antara alokasi dan realisasi senilai Rp5.784.448.484,00 tidak disajikan sebagai piutang dengan mempertimbangkan sering terjadi perubahan peraturan mengenai penetapan alokasi.

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum pada TA 2022 terealisasi senilai Rp559.979.921.190,00 atau 99,18% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp564.598.728.000,00. Dana Alokasi Umum pada TA 2022 mengalami pemotongan senilai Rp4.954.646.810,00 disebabkan pembayaran Bunga Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi (PEN) dan Sisa Dana DAK Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

Pemotongan DAU untuk Pembayaran Bunga Pinjaman PEN senilai Rp3.419.121.527,00, sesuai dengan KMK Nomor 23/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember tahun 2022.

Pemotongan DAU untuk Pembayaran Sisa Dana BOP PAUD s.d 31 Desember 2021 senilai Rp788.700.000,00 dan Pemotongan DAU untuk Pembayaran Sisa Dana BOP Kesetaraan s.d 31 Desember 2021 senilai Rp51.950.000,00, sesuai dengan KMK Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun 2021.

Pemotongan DAU untuk Pembayaran Sisa Dana BOS TA 2011 senilai Rp333.858.360,00 dan Pemotongan DAU untuk Pembayaran Sisa Dana BOKT TA 2020 senilai Rp25.176.923,00, sesuai dengan KMK Nomor 35/KM.7/2022 tentang Perubahan atas KMK Nomor 30/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Kedua atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun 2021.

Pemotongan DAU yang digunakan TNI senilai Rp122.000.000,00 dan Pemotongan DAU yang digunakan Polri senilai Rp213.840.000,00, sesuai KMK Nomor 34/KM.7/2021tentang Pemotongan Penyaluran DAU atau DBH TA 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021, realisasi tersebut mengalami penurunan senilai

Rp4.954.646.810,00 atau 0,88% dari realisasi tahun 2021 senilai Rp564.934.568.000,00.

d. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus TA 2022 terealisasi senilai Rp221.646.091.073,00 atau 92,16% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp240.506.057.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan senilai Rp23.294.291.039,00 atau senilai 11,74% dari realisasi TA 2021 senilai Rp198.365.000.034,00. Rincian realisasi DAK TA 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33

Rincian Realisasi DAK TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi (Transfer dari RKUN)	Penyerapan	Sisa
A.	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	**123.236.173.000,00**	**118.673.244.604,00**	**118.509.881.724,00**	**163.362.880,00**
1	Dinas Pendidikan	14.639.068.000,00	14.310.205.000,00	14.310.205.000,00	0,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.000.000.000,00	9.995.230.160,00	9.995.230.160,00	0,00
3	RSUD	37.479.407.000,00	34.675.338.563,00	34.675.338.563,00	0,00
4	Dinas Kesehatan	13.419.198.000,00	12.632.180.315,00	12.539.558.435,00	92.621.880,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	1.454.241.000,00	1.353.200.000,00	1.282.459.000,00	70.741.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum PRPKM	30.411.992.000,00	30.027.806.150,00	30.027.806.150,00	0,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.395.000.000,00	7.314.950.000,00	7.314.950.000,00	0,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.106.027.000,00	7.046.369.416,00	7.046.369.416,00	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.331.240.000,00	1.317.965.000,00	1.317.965.000,00	0,00
B.	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**117.269.884.000,00**	**102.972.846.469,00**	**100.599.393.220,00**	**2.373.453.249,00**
1	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - PAUD	5.665.200.000,00	4.949.300.000,00	4.949.300.000,00	0,00
2	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	83.510.156.000,00	73.546.607.355,00	73.229.856.275,00	316.751.080,00
3	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.206.000.000,00	829.500.000,00	700.250.000,00	129.250.000,00

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi (Transfer dari RKUN)	Penyerapan	Sisa
4	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	19.661.522.000,00	16.894.726.115,00	15.907.817.605,00	986.908.510,00
5	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.503.276.000,00	2.961.374.599,00	2.151.424.615,00	809.949.984,00
6	Dana BOP Pendidikan Kesetaraan	2.370.200.000,00	2.448.500.000,00	2.448.500.000,00	0,00
7	Dana Pelayanan Keparawisataan	679.935.000,00	679.933.400,00	679.833.400,00	100.000,00
8	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP)	303.900.000,00	303.900.000,00	303.900.000,00	0,00
9	Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM)	369.695.000,00	359.005.000,00	228.511.325,00	130.493.675,00

7.5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya

TA 2022	TA 2021
Rp75.045.028.000,00	**Rp84.350.371.400,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan untuk Dana Desa senilai Rp75.045.028.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan.

a. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus pada TA 2022 dan TA 2021, tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

b. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2022 terealisasi senilai Rp75.045.028.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan senilai Rp9.305.343.400,00 atau 11,03% dari realisasi TA 2021 senilai Rp84.350.371.400,00. Realisasi anggaran tersebut adalah realisasi Dana Desa yang diterima langsung dari RKUN ke Rekening Kas Desa pada Tahun 2022.

7.5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

TA 2022	TA 2021
Rp81.036.918.409,00	**Rp61.189.511.588,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan pada TA 2022. Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah senilai Rp81.036.918.409,00 atau senilai 114,67% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp70.669.719.932,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 maka nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp19.847.406.821,00 atau 32,44% dari jumlah realisasi tahun 2021 senilai Rp61.189.511.588,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 34
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.979.267.216,00	56.985.815.409,00	118,77	32.450.407.628,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0	0,00
3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	22.690.452.716,00	24.051.103.000,00	106	28.739.103.960,00
	Jumlah	**70.669.719.932,00**	**81.036.918.409,00**	**114,67**	**61.189.511.588,00**

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2022 mencapai nilai Rp56.985.815.409,00 atau senilai 118,77% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp47.979.267.216,00. Bila dibandingkan dengan TA 2021, maka nilai tersebut mengalami kenaikan senilai 75,61% atau senilai Rp24.535.407.781,00 dari jumlah yang dicapai selama TA 2021 senilai Rp32.450.407.628,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 35
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.697.657.270,00	11.419.696.318,00	89,94	6.185.771.902,00
2.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.422.188.572,00	9.535.649.021,00	76,76	4.770.977.348,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.486.747.037,00	17.658.522.579,00	90,62	8.143.136.276,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	313.866.071,00	384.233.235,00	122,42	46.281.503,00
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	3.058.808.266,00	17.987.714.256,00	588,06	13.118.617.100,00
	Jumlah	**47.979.267.216,00**	**56.985.815.409,00**	**118,77**	**32.264.784.129,00**

b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pada Tahun Aggaran 2022 dan 2021 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

c. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi TA 2022 senilai Rp24.051.103.000,00 atau 106% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp22.690.452.716,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Bantuan Keuangan mengalami penurunan senilai Rp4.688.000.960,00 atau 16,31% yang terealisasi senilai Rp28.739.103.960,00. Rincian Bantuan Keuangan TA 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 36
Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.690.452.716,00	7.636.104.000,00	99,29	28.739.103.960,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	15.000.000.000,00	16.414.999.000,00	109,43	0,00
	Jumlah	**22.690.452.716,00**	**24.051.103.000,00**	**106,00**	**28.739.103.960,00**

Bantuan Keuangan untuk pembangunan tanggul pemecah ombak di Galesong, bantuan Stunting untuk penanggulangan gizi buruk yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan bantuan dana tanggap darurat bencana alam banjir, angin kencang dan abrasi untuk bantuan pembangunan rumah bagi warga yang terdampak bencana alam.

7.5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	TA 2022	TA 2021
	Rp42.247.638.360,00	**Rp45.788.366.242,00**

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada TA 2022 terealisasi senilai Rp42.247.638.360,00 atau 93,31% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp45.275.300.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2021 mengalami penurunan senilai Rp3.540.727.882,00. Lain-Lain pendapatan yang sah terdiri dari:

7.5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp3.750.000.000,00**

Pendapatan Hibah pada TA 2022 tidak dianggarkan. Jika dibandingkan dengan TA 2021 direalisasikan senilai Rp3.750.000.000,00.

7.5.1.1.3.2. Pendapatan Dana Darurat

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Pendapatan Dana Darurat.

7.5.1.1.3.3. Pendapatan Lainnya

TA 2022	TA 2021
Rp42.247.638.360,00	**Rp42.038.366.242,00**

Pendapatan Lainnya merupakan realisasi dana BOS yang diterima langsung dari RKUN ke Rekening Kas sekolah TA 2022 terealisasi senilai Rp42.247.638.360,00 atau 93,31% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp45.275.300.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2021, mengalami kenaikan senilai Rp209.272.118,00 atau 0,50%.

7.5.1.2. Belanja dan Transfer LRA

TA 2022	TA 2021
Rp1.405.198.595.285,00	**Rp1.127.947.965.954,20**

Belanja dan Transfer untuk TA 2022 dianggarkan senilai Rp1.534.891.281.980,00 dengan realisasi senilai Rp1.405.198.595.285,00 atau senilai 91,55%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021, realisasi Belanja dan Transfer pada TA 2022 mengalami kenaikan senilai Rp277.250.629.330,80 atau 24,58% dari realisasi TA 2021 senilai Rp1.127.947.965.954,20.

Realisasi tersebut di atas termasuk realisasi Belanja Dana BOS dan Belanja BLUD tahun 2022. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer TA. 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2022

(dalam rupiah)

No	Belanja Daerah	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Operasi	932.689.272.270,00	847.403.167.923,00	90,86	841.033.697.626,10
2	Belanja Modal	459.941.802.121,00	418.424.668.486,00	90,97	139.782.104.187,10
3	Belanja Tak Terduga	4.047.507.689,00	2.419.474.976,00	59,78	123.652.909,00
4	Belanja Transfer	138.212.699.900,00	136.951.283.900,00	99,09	147.008.511.232,00
	Jumlah	**1.534.891.281.980,00**	**1.405.198.595.285,00**	**91,55**	**1.127.947.965.954,20**

7.5.1.2.1. Belanja Operasi

TA 2022	TA 2021
Rp847.403.167.923,00	**Rp841.033.697.626,10**

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2022 senilai Rp847.403.167.923,00. Belanja Operasi tersebut mencapai 90,86% atau lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp932.689.272.270,00. Jika dibandingkan dengan TA 2021, realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan senilai Rp6.382.670.296,90 atau senilai 0,76% lebih rendah dari realisasi tahun 2021 yang mencapai Rp841.033.697.626,10. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA. 2022

(dalam rupiah)

NO	BELANJA OPERASI	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Pegawai	599.110.854.496,00	523.629.243.269,00	87,40	547.131.893.166,00
2	Belanja Barang dan Jasa	316.341.822.589,00	308.182.707.004,00	97,42	289.118.163.860,10
3	Belanja Hibah	17.236.595.185,00	15.591.217.650,00	90,45	4.783.640.600,00
4	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**932.689.272.270,00**	**847.403.167.923,00**	**90,86**	**841.033.697.626,10**

7.5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

TA 2022	TA 2021
Rp523.629.243.269,00	**Rp547.131.893.166,00**

Belanja Pegawai pada TA 2022 terealisasi senilai Rp523.629.243.269,00 atau senilai 87,4% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp599.110.854.496,00. Jika dibandingkan dengan TA 2021, realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan senilai Rp23.502.649.897,00 atau 4,30% dari realisasi Tahun 2021 yang mencapai realisasi senilai Rp547.131.893.166,00**.** Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022

(dalam rupiah)

No	Belanja Pegawai	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	352.349.062.574,00	324.862.220.231,00	92,20	332.780.087.865,00

No	Belanja Pegawai	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	55.026.236.871,00	48.033.814.704,00	87,29	57.007.001.917,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	125.327.319.585,00	107.792.855.608,00	86,01	102.104.766.492,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.171.916.039,00	10.554.909.043,00	80,13	10.721.066.300,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	447.025.000,00	162.399.980,00	36,33	162.703.780,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	864.600.000,00	708.800.000,00	81,98	587.900.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	13.943.012.070,00	0,00	0,00	16.384.810.778,00
8	Belanja Pegawai BLUD	37.981.682.357,00	31.514.243.703,00	82,97	27.383.556.034,00
	Jumlah	**599.110.854.496,00**	**523.629.243.269,00**	**87,4**	**547.131.893.166,00**

1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada TA 2022 terealisasi senilai Rp324.862.220.231,00 atau senilai 92,2% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp352.349.062.574,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021, Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami penurunan senilai Rp7.917.867.634,00 atau 2,38% diakibatkan adanya pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan pindah tugas. Rincian Belanja Gaji Pegawai yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pegawai TA 2022

(dalam rupiah)

No	Belanja Pegawai	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Gaji Pokok ASN	261.101.924.640,00	245.522.371.114,00	94,03	253.240.276.580,00
2	Tunjangan Keluarga ASN	23.318.969.644,00	20.957.970.810,00	89,88	21.527.428.563,00
3	Tunjangan Jabatan ASN	6.851.214.940,00	5.533.269.500,00	80,76	6.139.500.000,00
4	Tunjangan Fungsional ASN	22.375.268.720,00	19.636.872.500,00	87,76	18.935.717.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.944.853.080,00	2.927.005.000,00	74,20	3.347.880.110,00
6	Tunjangan Beras ASN	14.023.657.240,00	12.436.751.000,00	88,68	12.903.820.030,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.103.400.058,00	2.344.847.697,00	75,56	2.353.969.872,00

No	Belanja Pegawai	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
8	Pembulatan Gaji ASN	12.224.622,00	3.260.669,00	26,67	3.416.840,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.668.756.560,00	13.480.643.515,00	91,90	12.252.356.260,00
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	864.474.949,00	505.871.170,00	58,52	1.148.777.837,00
11	Iuran Jaminan Kematian ASN	2.084.318.121,00	1.513.357.256,00	72,61	926.944.773,00
	Jumlah	**352.349.062.574,00**	**324.862.220.231,00**	**92,2**	**332.780.087.865,00**

2) Tambahan penghasilan ASN pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp48.033.814.704,00 atau senilai 87,29% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp55.026.236.871,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021, Tambahan penghasilan PNS mengalami penurunan senilai Rp8.973.187.213,00 atau 15,74% dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp57.007.001.917,00.
   a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp23.082.917.751,00 atau 89,06 persen dari yang dianggarkan Rp25.918.392.215,00 jika dibandingkan Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp33.924.084.166,00 atau 59,51% dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp57.007.001.917,00.
   b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp100.078.464,00 atau 99,97 persen dari yang dianggarkan Rp100.112.237,00 jika dibandingkan Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp100.078.464,00.
   c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp24.850.818.489,00 atau 85,67 persen dari yang dianggarkan Rp29.007.732.419,00. Jika dibandingkan Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp24.850.818.489,00.
3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp107.792.855.608,00 atau senilai 86,01% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp125.327.319.585,00. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari:
   a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada Tahun 2021 terealisasi senilai Rp0,00 yang dianggarkan senilai Rp70.537.500,00, sedangkan pada tahun 2021 dianggarkan Rp610.750.000,00 dan realisasi senilai Rp0,00.
   b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp0,00 atau senilai 0% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp54.124.500,00. Jika dibandingkan

dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan senilai Rp24.900.000,00 atau senilai 100% dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp24.900.000,00.

c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD pada TA 2022 terealisasi senilai Rp78.607.400.520,00 atau 88,43% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp88.887.700.245,00. Jika dibandingkan dengan TA 2021, mengalami penurunan senilai 11,22% atau senilai Rp9.931.262.755,00 dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp88.538.663.275,00,

d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD pada TA 2022 terealisasi senilai Rp700.500.000,00 atau 58,07% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp1.206.250.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2021, mengalami kenaikan 49,68% atau senilai Rp232.500.000,00 dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp468.000.000,00,

e) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada TA 2022 terealisasi senilai Rp10.965.154.088,00 atau 66,29% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp16.540.323.074,00. Jika dibandingkan dengan TA 2021, mengalami penurunan 16,06% atau senilai Rp2.098.049.129,00 dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp13.063.203.217,00, dan

f) Belanja Honorarium pada TA 2022 terealisasi senilai Rp17.519.801.000,00 atau 94,4% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp18.559.609.866,00. Jika dibandingkan dengan TA 2021, mengalami kenaikan 175.098,01% atau senilai Rp17.509.801.000,00 dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp10.000.000,00. Kenaikan realisasi belanja honorarium tersebut karena pada Tahun 2021 hanya menggunakan satu objek belanja yaitu objek Belanja Tambahan penghasilan ASN – pada rincian objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dan sub rincian objek belanja Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS. Pada Tahun 2022 anggaran dan realisasi belanja tersebut digolongkan pada objek Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – pada rincian objek belanja Honorarium didasarkan pada klasifikasi sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp10.554.909.043,00 atau 80,13% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp13.171.916.039,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri dari Belanja Uang Representasi DPRD, Belanja Tunjangan

Keluarga DPRD, Belanja Tunjangan Beras DPRD, Belanja Uang Paket DPRD, Belanja Tunjangan Jabatan DPRD, Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD, Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD, Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Tunjangan Reses DPRD, Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Pembulatan Gaji DPRD, Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dan Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami penurunan senilai Rp166.157.257,00 atau 1,55% dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp10.721.066.300,00.

5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp162.399.980,00 atau 36,33% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp447.025.000,00 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri dari Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH, Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH, dan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami penurunan senilai Rp303.800,00 atau 0,19% dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp162.703.780,00.
6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp708.800.000,00 atau 81,98% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp864.600.000,00. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH mengalami kenaikan senilai Rp120.900.000,00 atau 20,56% dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp587.900.000,00.
7) Belanja Pegawai BOS pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp0,00 atau senilai 0% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp13.943.012.070,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021, Belanja Pegawai BOS mengalami penurunan senilai Rp16.384.810.778,00 dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp16.384.810.778,00.
8) Belanja Pegawai BLUD pada TA 2022 terealisasi senilai Rp31.514.243.703,00 atau 82,97% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp37.981.682.357,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021,

Belanja Pegawai BLUD mengalami kenaikan senilai 15,08% atau senilai Rp4.130.687.669,00 dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp27.383.556.034,00.

		TA 2022	TA 2021
7.5.1.2.1.2.	**Belanja Barang dan jasa**	**Rp308.182.707.004,00**	**Rp289.118.163.860,10**

Pada TA 2022, realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp308.182.707.004,00 atau 97,42%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan 6,59% atau senilai Rp19.064.543.143,90 dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp289.118.163.860,10.

Tabel 41
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
A	**Belanja Barang**	**68.802.089.645,00**	**63.257.104.630,65**	**91,94**	**58.451.387.042,00**
1	Belanja Barang Pakai Habis	68.682.269.945,00	63.137.314.630,65	91**,93**	58.322.686.442,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	119.819.700,00	119.790.000,00	99,98	7.708.000,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	120.992.600,00
B	**Belanja Jasa**	**94.952.826.902,00**	**88.409.556.724,35**	**93,11**	**105.265.616.964,00**
1	Belanja Jasa Kantor	53.414.412.368,00	47.964.167.737,35	89,8	56.530.227.157,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.784.606.800,00	35.420.973.678,00	98,98	34.935.646.988,00
3	Belanja Sewa Tanah	194.600.000,00	159.600.000,00	82,01	213.400.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.354.485.734,00	1.322.918.824,00	97,67	944.871.278,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	201.350.000,00	179.475.000,00	89,14	1.392.483.470,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0	418.242.500,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	700.000,00	700.000,00	100	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.113.017.550,00	2.694.475.085,00	86,56	4.114.533.285,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0	286.537.636,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0	6.060.561.600,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	889.654.450,00	666.863.450,00	74,96	369.113.050,00
C	**Belanja Pemeliharaan**	**12.789.578.797,00**	**11.742.808.106,00**	**91,82**	**12.065.619.380,00**
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.689.668.300,00	2.376.011.884,00	88,34	3.846.572.918,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.585.408.906,00	7.885.520.568,00	91,85	6.279.935.427,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.514.501.591,00	1.481.275.654,00	97,81	1.939.111.035,00
D	**Belana Perjalanan Dinas**	**61.667.006.450,00**	**60.131.302.841,00**	**97,51**	**55.328.621.628,00**
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.429.670.450,00	59.921.802.841,00	97,55	53.549.086.928,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	237.336.000,00	209.500.000,00	88,27	1.779.534.700,00
E	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**17.312.031.200,00**	**16.358.917.000,00**	**94,49**	**14.043.950.700,00**
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.825.031.200,00	7.759.581.200,00	99,16	4.866.668.800,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.487.000.000,00	8.599.335.800,00	90,64	9.177.281.900,00
F	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**24.312.492.973,00**	**39.384.219.995,00**	**161,99**	**19.573.455.603,00**
G	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**36.505.796.622,00**	**28.898.797.707,00**	**79,16**	**24.389.512.543,10**
	Jumlah	**316.341.822.589,00**	**308.182.707.004,00**	**97,42**	**289.118.163.860,10**

7.5.1.2.1.3.Belanja Bunga

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021, Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Belanja Bunga.

7.5.1.2.1.4.Belanja Subsidi

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021, Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Belanja Subsidi.

7.5.1.2.1.5.Belanja Hibah

TA 2022	TA 2021
Rp15.591.217.650,00	**Rp4.783.640.600,00**

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Belanja Hibah senilai Rp17.236.595.185,00 dan terealisasi senilai Rp15.591.217.650,00 atau 90,45%. Realisasi Belanja Hibah mengalami kenaikan senilai Rp10.807.577.050,00 atau 225,93% dibandingkan realisasi TA 2021 senilai Rp4.783.640.600,00**.** Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 42
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022

(dalam rupiah)

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.706.994.240,00	1.579.631.000,00	92,54	705.327.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.592.610.945,00	13.074.596.650,00	89,6	3.141.323.600,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	936.990.000,00	936.990.000,00	100	936.990.000,00
	Jumlah	**17.236.595.185,00**	**15.591.217.650,00**	**90,45**	**4.783.640.600,00**

Kenaikan Belanja Hibah dari tahun sebelumnya, karena pada Tahun 2022 dilaksanakan program kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dalam rangka menunjang kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat senilai Rp10.819.696.650,00 dan Pembangunan Gedung Manasik Haji Kementerian Agama Kabupaten Takalar senilai Rp1.394.018.000,00**.**

7.5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Belanja Bantuan Sosial merupakan Belanja Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pihak lain. Pada TA 2022 dan TA 2021, Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Belanja Bantuan Sosial dan tidak direalisasikan.

7.5.1.2.2. Belanja Modal

TA 2022	TA 2021
Rp418.424.668.486,00	**Rp139.782.104.187,10**

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya. Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Belanja Modal senilai Rp459.941.802.121,00 dan direalisasikan senilai Rp418.424.668.486,00 atau 90,97%. Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami kenaikan senilai Rp278.642.564.298,90 atau 199,34% dari realisasi Belanja Modal TA 2021 senilai Rp139.782.104.187,10. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 43
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Tanah	4.621.467.838,00	4.576.325.420,00	99,02	8.577.959.400,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.077.186.249,00	77.491.881.979,00	86,99	29.661.741.430,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188.808.174.077,00	180.038.642.251,00	95,36	50.781.476.803,72
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	172.932.782.056,00	155.024.484.196,00	89,64	47.170.806.203,38
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.502.191.901,00	1.293.334.640,00	28,73	3.590.120.350,00
Jumlah		**459.941.802.121,00**	**418.424.668.486,00**	**90,97**	**139.782.104.187,10**

7.5.1.2.2.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah	TA 2022	TA 2021
	Rp4.576.325.420,00	**Rp8.577.959.400,00**

Belanja Modal Pengadaan Tanah merupakan belanja yang menambah aktiva tetap tanah Pemerintah Kabupaten Takalar dalam periode TA 2022 senilai Rp4.576.325.420,00 atau 99,02% dari yang dianggarkan senilai Rp4.621.467.838,00 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah Persil dan Belanja Modal Lapangan. Belanja Modal Pengadaan Tanah mengalami penurunan senilai Rp4.001.633.980,00 atau 46,65% dibandingkan realisasi pada Tahun 2021 senilai Rp8.577.959.400,00.

7.5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	TA 2022	TA 2021
	Rp77.491.881.979,00	**Rp29.661.741.430,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja yang menambah aktiva tetap mesin dan peralatan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam periode TA 2022 senilai Rp77.491.881.979,00 atau 86,99% dari yang dianggarkan senilai Rp89.077.186.249,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan senilai Rp47.830.140.549,00 atau 161,25% lebih tinggi dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 senilai Rp29.661.741.430,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 44
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Besar	53.091.890,00	47.407.400,00	89,29	77.001.500,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	2.972.261.000,00	2.732.827.500,00	91,94	6.302.639.539,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.100.000,00	2.100.000,00	100	442.079.000,00
7	Belanja Modal Alat Pertanian	197.187.750,00	197.128.600,00	99,97	1.122.000,00
10	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.608.714.000,00	4.108.248.490,00	89,14	7.127.162.876,00
14	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.154.826.554,00	1.965.299.075,00	62,29	2.606.468.660,00
15	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	850.004.708,00	386.989.780,00	45,53	285.507.790,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
16	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	69.256.426.156,00	61.329.947.435,00	88,55	4.741.475.368,00
17	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.583.126.150,00	4.487.502.500,00	97,91	4.943.931.943
18	Belanja Modal Alat Eksplorasi	49.500.000,00	16.500.000,00	33,33	16.500.000,00
19	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	10.765.560,00	0,00	0	17.705.000,00
20	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	21.910.000,00	19.932.850,00	90,98	393.668.950,00
21	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0	2.990.000,00
22	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0	95.203.000,00
23	Belanja Modal Peralatan Olahraga	600.000.000,00	600.000.000,00	100	0,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.717.272.481,00	1.597.998.349,00	58,81	2.608.285.804,00
	Jumlah	**89.077.186.249,00**	**77.491.881.979,00**	**86,99**	**29.661.741.430,00**

Kenaikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi (PEN) dari Pemerintah Pusat melalui PT. SMI untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan senilai Rp54.736.257.641,00 dan pengadaan mobiler senilai Rp1.000.000.000,00 untuk kebutuhan Rumah Sakit Galesong.

7.5.1.2.2.3. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**TA 2022**	**TA 2021**
	Rp180.038.642.251,00	**Rp50.781.476.803,72**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja yang menambah aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Takalar berupa konstruksi gedung dan bangunan dalam periode TA 2022 terealisasi senilai Rp180.038.642.251,00 atau 95,36% dari yang dianggarkan senilai Rp188.808.174.077,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan senilai Rp129.257.165.447,28 atau 254,54% lebih tinggi dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 senilai Rp50.781.476.803,72. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	187.651.730.809,00	178.887.894.121,00	95,33	50.429.561.903,72
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.156.443.268,00	1.150.748.130,00	99,51	351.914.900,00
	Jumlah	**188.808.174.077,00**	**180.038.642.251,00**	**95,36**	**50.781.476.803,72**

Kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi (PEN) dari Pemerintah Pusat melalui PT. SMI untuk kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Galesong senilai Rp92.425.433.684,00, Pembangunan Kawasan Sentra UMKM Desa Beba senilai Rp3.855.097.000,00, Pembangunan Kawasan Sentra UMKM Desa Aeng Batu-Batu senilai Rp1.833.542.000,00, dan Pembangunan pemecah ombak di Kawasan Sentra UMKM Desa Pa'lalakang senilai Rp3.855.097.000,00, seluruhnya berlokasi di Kecamatan Galesong Utara.

7.5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

TA 2022	TA 2021
Rp155.024.484.196,00	**Rp47.170.806.203,38**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan belanja yang menambah aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Takalar berupa konstruksi jalan, irigasi dan jaringan dalam periode TA 2022 senilai Rp155.024.484.196,00 atau 89,64% dari yang dianggarkan senilai Rp172.932.782.056,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan senilai Rp107.853.677.992,62 atau 228,64% lebih tinggi dibandingkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2021 senilai Rp47.170.806.203,38. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 46
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	145.884.011.037,00	130.888.969.511,00	89,72	33.786.406.832,38
2	Belanja Modal Bangunan Air	24.850.704.419,00	22.015.210.185,00	88,59	5.833.218.346,00
3	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0	378.612.125,00
4	Belanja Modal Jaringan	2.198.066.600,00	2.120.304.500,00	96,46	7.172.568.900,00
Jumlah		**172.932.782.056,00**	**155.024.486.218,00**	**89,64**	**47.170.808.224,38**

Kenaikan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan diperoleh dari Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi melalui PT. SMI untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Tepo-Cikoang senilai Rp5.527.605.003,00, Peningkatan Jalan Ruas Aeng Batu Batu-Bontolanra (Kalukuang) senilai Rp3.651.223.158,00, Peningkatan Jalan Ruas Solonga-Tamasongo senilai Rp16.777.930.000,00, Peningkatan Jalan Ruas Cakura-Lantang senilai Rp14.810.940.000,00, Peningkatan Jalan Ruas Bantinoto-Rajayya senilai Rp11.087.900.000,00, Peningkatan Jalan Ruas Peningkatan Sombalabella-Tala senilai Rp3.657.100.000,00, Peningkatan Jalan Ruas Maradekaya-Lantang senilai Rp5.536.267.133,00, Peningkatan Jalan Ruas Lassang-Cadika senilai Rp3.633.502.866,00, Peningkatan Jalan Ruas Cakura-Bontomakka senilai Rp7.342.037.619,00, Peningkatan Jalan Ruas Pangembang-Panjarungang senilai Rp3.668.977.073,00, dan Peningkatan Jalan Ruas Malolo-Borongramisi senilai Rp1.799.425.307,00.

7.5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

TA 2022	TA 2021
Rp1.293.334.640,00	**Rp3.590.120.350,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan belanja yang menambah aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Takalar dalam periode TA 2022 senilai Rp1.293.334.640,00 dari yang dianggarkan senilai Rp4.502.191.901,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan senilai Rp2.296.785.710,00 atau 63,98% dibandingkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap pada Tahun 2021 senilai Rp3.590.120.350,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Tabel 47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	29.612.000,00	25.355.000,00	85,62	7.976.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	70.057.425,00	69.949.225,00	99,85	0,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	0,00	0	69.813.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.302.522.476,00	1.198.030.415,00	27,84	3.512.331.350,00
	Jumlah	**4.502.191.901,00**	**1.293.334.640,00**	**28,73**	**3.590.120.350,00**

7.5.1.2.2.6. Belanja Aset Lainnya	TA 2022	TA 2021
	Rp.0,00	**Rp0,00**

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan belanja modal pengadaan *software* yang menambah aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Takalar, dalam periode TA 2022 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

7.5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga	TA 2022	TA 2021
	Rp2.419.474.976,00	**Rp123.652.909,00**

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar untuk membiayai kegiatan yang sifatnya sangat mendesak dan tidak dianggarkan dalam tahun berjalan dan atau kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Dalam periode TA 2022 realisasi Belanja Tidak Terduga senilai Rp2.419.474.976,00 atau 59,78% dari yang dianggarkan senilai Rp4.047.507.689,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp123.652.909,00, Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan 1.856,67% atau Rp2.295.822.067,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Kencang, dan Abrasi Tahun 2022, sesuai surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 652 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Kencang, Abrasi Tahun 2022 dan Pembayaran Biaya Provisi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Kabupaten Takalar TA 2021. Rincian pengunaan dana Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

Tabel 48
Rincian pengunaan dana Belanja Tidak Terduga

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	Pengamanan Pantai	1.150.000.000,00	Dinas PUPRPKP	
2	Pengadaan Material Korban Bencana	250.000.000,00	BPBD	
3	Pengadaan Kebutuhan Pangan dan Sandan Korban Bencana	100.000.000,00	Dinas Sosial, dan PMD	
4	Biaya Provisi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021	2.419.474.976,00	BKAD	
	Jumlah	**3.919,474,976,00**		

Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dicairkan kepada SKPD penanggung jawab pada tanggal 30 Desember 2022 belum seluruhnya digunakan sampai akhir TA 2022 dan sisanya telah dikembalikan ke Kasda daerah pada bulan Januari 2023 senilai Rp1.500.000.000,00 dan Rp2.419.474.976,00 telah dibayarkan kepada PT. SMI pada TA 2022 sebagai biaya Provisi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Kabupaten Takalar TA 2021.

7.5.1.3. Transfer

TA 2022	TA 2021
Rp136.951.283.900,00	**Rp147.008.511.232,00**

Transfer/bagi hasil pajak/bagi hasil ke desa TA 2022 senilai Rp136.951.283.900,00 atau 99,09% dari yang dianggarkan senilai Rp138.212.699.900,00. Nilai tersebut mengalami penurunan 6,84% atau senilai Rp10.057.227.332,00 jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 senilai Rp147.008.511.232,00. Rincian Transfer ke desa/Bantuan Keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 49
Transfer ke Desa/Bantuan Keuangan Parpol TA. 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Transfer/bagi hasil ke desa	3.646.694.400,00	3.646.694.400,00	100	4.557.695.125,00
2	Transfer/ bantuan keuangan	134.566.005.500,00	133.304.589.500,00	99,06	142.450.816.107,00
Jumlah		**138.212.699.900,00**	**136.951.283.900,00**	**99,09**	**147.008.511.232,00**

7.5.1.3.1. Transfer/Bagi Hasil ke Desa

TA 2022	TA 2021
Rp3.646.694.400,00	**Rp4.557.695.125,00**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Transfer ke Desa senilai Rp3.646.694.400,00 dan direalisasikan senilai Rp3.646.694.400,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp4.557.695.125,00 mengalami penurunan 19,99% atau senilai Rp911.000.725,00.

1. **Belanja Bagi Hasil Pajak**
   Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak senilai Rp3.646.694.400,00 dan terealisasi senilai Rp3.646.694.400,00 dan realisasi Tahun 2021 senilai Rp0,00.

2. Belanja Bagi Hasil Retribusi

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Belanja Bagi Hasil Retribusi (BHPRD) dan tidak terealisasi. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan senilai Rp4.557.695.125,00 dari Realisasi Tahun 2021 senilai Rp4.557.695.125,00. Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi pada Tahun 2022 digabungkan pada akun Belanja Bagi Hasil Pajak dan realisasi penggunaan dana tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Pada TA 2022 dan TA 2021 Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Belanja Bagi Hasil Lainnya senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00.

7.5.1.3.2. Transfer Bantuan/ Keuangan

TA 2022	TA 2021
Rp133.304.589.500,00	**Rp142.450.816.107,00**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Transfer Bantuan/Keuangan senilai Rp134.566.005.500,00 dan direalisasikan senilai Rp133.304.589.500,00 atau 99,06%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan senilai Rp9.134.776.607,00 atau 6,42% dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp142.450.816.107,00.

7.5.1.3.2.1. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp0,00 sama dengan Tahun 2021 senilai Rp0,00.

7.5.1.3.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota ke Provinsi

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp11.450.000,00**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan dan tidak terealisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Provinsi. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan senilai 100% dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp11.450.000,00.

7.5.1.3.2.3. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

TA 2022	TA 2021
Rp133.304.589.500,00	**Rp142.439.366.107,00**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa untuk 76 desa senilai Rp134.566.005.500,00 dan direalisasikan senilai Rp133.304.589.500,00 atau 99,06% terdiri dari Belanja Dana Desa senilai Rp75.045.028.000,00 dan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp58.259.561.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp142.439.366.107,00 mengalami penurunan senilai Rp9.134.776.607,00 atau 6,41%. Penurunan disebabkan pengurangan pagu Dana Desa pada Tahun 2022 dan penyesuaian ADD senilai 10%.

	TA 2022	TA 2021
Surplus/defisit	**(Rp281.167.322.277,64)**	**(Rp26.256.000.329,71)**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar, anggaran defisit senilai (Rp341.978.931.853,00) menjadi defisit senilai (Rp281.167.322.277,64) atau 82,22%. Jika dibandingkan dengan TA 2021 defisit senilai (Rp26.256.000.329,71) mengalami penurunan senilai (Rp254.911.321.947,93) atau 970,87%. Surplus defisit disebabkan penerimaan pembiayaan pinjaman jangka Panjang yang diterima pada Tahun 2022.

7.5.1.4. Pembiayaan LRA

TA 2022	TA 2021
Rp336.135.088.694,37	**Rp120.234.932.183,08**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jumlah pembiayaan netto atau selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan TA 2022 adalah senilai Rp336.135.088.694,37 atau 98,29% dari yang dianggarkan senilai Rp341.978.931.853,00. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

TA 2022	TA 2021
Rp336.135.088.694,37	**Rp121.234.932.183,08**

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2022 adalah Rp336.135.088.694,37 atau senilai 97,72% dari yang dianggarkan senilai Rp343.978.931.853,00.

7.5.1.4.1.1. Penggunaan SiLPA

TA 2022	TA 2021
Rp94.187.591.053,37	**Rp121.234.932.183,00**

Penggunaan SiLPA untuk TA 2022 adalah Rp94.187.591.053,37 atau 100,22% dari yang dianggarkan senilai Rp93.978.931.853,00. Kenaikan Penggunaan SiLPA tahun lalu senilai Rp208.659.200,00 merupakan koreksi

saldo awal dana JKN-FKTP puskesmas Tahun 2021 yang belum catat sebagai saldo kas.

7.5.1.4.1.2. Pencairan Dana Cadangan	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dari Pencairan Dana Cadangan pada TA 2022 dan 2021.

7.5.1.4.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dari Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2022 dan 2021.

7.5.1.4.1.4. Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	TA 2022	TA 2021
	Rp241.947.497.641,00	**Rp0,00**

Realisasi Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 adalah Rp241.947.497.641,00 dari anggaran senilai Rp250.000.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2021 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank anggaran Rp0,00.

Penerimaan pembiayaan tersebut adalah Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan *Pandemic Corona Virus Disease* 2019 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 105/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemerintah daerah, pinjaman antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan PT. SMI sesuai perjanjian Nomor PERJ-211/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021 jangka waktu delapan tahun yang termasuk masa tenggang 24 (dua puluh empat) bulan dengan tingkat suku bunga 6,19%.

Pinjaman tersebut untuk pembangunan:
a. Peningkatan jalan Rp90.000.000.000,00;
b. Pembangunan Rumah Sakit Rp150.000.000.000,00; dan
c. Pembangunan UMKM Rp10.000.000.000,00.

7.5.1.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dari Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya pada TA 2022 dan 2021.

7.5.1.4.1.6. Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dari Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank pada TA 2022 dan 2021.

7.5.1.4.1.7. Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dari Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank pada TA 2022 dan 2021.

7.5.1.4.1.8. Pinjaman Dalam - Negeri - Obligasi	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dari Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi pada TA 2022 dan 2021.

7.5.1.4.1.9. Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya pada TA 2022 dan 2021.

7.5.1.4.1.10. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara pada TA 2022 dan 2021.

7.5.1.4.1.11. Penerimaan Piutang Daerah	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan Piutang Daerah pada TA 2022 dan 2021.

7.5.1.4.1.12. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya pada TA 2022 dan 2021.

7.5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2022 sejumlah Rp0,00 atau 0% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00.

7.5.1.4.2.1. Pembentukan Dana Cadangan	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Takalar tidak membentuk Dana Cadangan pada TA 2022 dan 2021.

7.5.1.4.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp1.000.000.000,00**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2022 senilai Rp0,00 atau 0% dari yang dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2021 terealisasi senilai Rp1.000.000.000,00.

Tidak terdapat realisasi penyertaan modal Tahun 2022 disebabkan Perda sebagai dasar pembayaran belum ditetapkan.

7.5.1.4.2.3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat dalam TA 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

7.5.1.4.2.4. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Daerah Lainnya	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya dalam TA 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

7.5.1.4.2.5. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Pembayaran Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-lembaga keuangan bank dalam TA 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

7.5.1.4.2.6. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - lembaga keuangan bukan bank dalam TA 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

7.5.1.4.2.7. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - obligasi dalam TA 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

7.5.1.4.2.8. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-lainnya dalam TA 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

7.5.1.4.2.9. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Pembayaran Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara dalam TA 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

7.5.1.4.2.10. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Pembayaran Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah dalam TA 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

7.5.1.4.2.11. Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Pembayaran Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya dalam TA 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

	TA 2022	TA 2021
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**Rp54.967.766.416,73**	**Rp93.978.931.853,37**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 senilai Rp54.967.766.416,73 merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam TA 2022. Adapun rincian SiLPA LRA sebagai berikut:

Tabel 50
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	44.504.956.103,05
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.516.402.645,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
4	Kas di Bendahara FKTP	0,00
5	Kas di BLUD	8.440.642.883,71
6	Kas di Bendahara BOS	58.920.342,00
7	Kas Lainnya	535.571.669,00
	Jumlah	**55.056.493.642,76**

SiLPA di LRA lebih rendah dibanding Saldo Akhir Kas di LAK dan Neraca senilai Rp88.727.226,00. Selisih tersebut adalah saldo PFK dari dana BOS senilai Rp1.108.181,00 dan saldo PFK dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle senilai Rp87.619.045,03 yang belum disetor per 31 Desember 2022.

7.5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi Saldo Anggaran Lebih Akhir yang diklasifikasikan berdasarkan SAL Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berkenaan, SiLPA serta Koreksi Kesalahan Pembukuan sebelumnya.

7.5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal Tahun 2022 senilai Rp93.978.931.853,37, sedangkan saldo awal Tahun 2021 senilai Rp125.460.203.203,08, Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp31.481.271.349,71 atau 25,09%.

7.5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan SAL Tahun 2022 senilai Rp94.187.591.053,37, sedangkan untuk Tahun 2021 senilai Rp121.234.932.183,08, atau mengalami penurunan senilai Rp27.047.341.129,71 atau 22,31%.

7.5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA Tahun 2022 senilai Rp54.967.766.416,73, sedangkan untuk Tahun 2021 senilai Rp93.978.931.853,37, mengalami penurunan senilai Rp39.011.165.436,64 atau 41,51%.

7.5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp208.659.200,00 merupakan saldo Kas Dana JKN Non Kapitasi yang belum diperhitungkan sebagai saldo kas tahun sebelumnya.

7.5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 senilai Rp54.967.766.416,73 dan Tahun 2021 senilai Rp93.978.931.853,37, mengalami penurunan senilai Rp39.011.165.436,64 atau 41,51%.

7.5.3. Penjelasan Akun-akun Neraca

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

Posisi keuangan per 31 Desember 2022 terdiri dari aset senilai Rp1.803.428.694.120,55, kewajiban senilai Rp265.649.175.887,76 dan ekuitas senilai Rp1.537.779.491.142,79.

7.5.3.1. ASET

TA 2022	TA 2021
Rp1.803.428.694.120,55	**Rp1.516.088.157.962,55**

Aset Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp1.803.428.694.120,55 dan Rp1.516.088.157.962,55 terdiri dari:

Tabel 51
Rekapitulasi Aset TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Akun	2022	2021
1	Aset Lancar	104.362.698.340,21	132.697.929.431,37
2	Investasi Jangka Panjang	95.567.956.883,07	71.886.257.289,91
3	Aset Tetap	1.526.442.636.813,47	1.260.397.928.982,40
4	Aset Lainnya	77.055.402.083,80	51.106.042.258,87
	Jumlah	**1.803.428.694.120,55**	**1.516.088.157.962,55**

7.5.3.1.1. Aset Lancar

TA 2022	TA 2021
Rp104.362.698.340,21	**Rp132.697.929.431,37**

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp104.362.698.340,21 dan Rp132.697.929.431,37. Rincian Aset Lancar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 52
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	ASET LANCAR	T.A 2022	T.A 2021
1	Kas di Kas Daerah	44.504.956.103,05	79.050.248.880,09
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.516.402.645,00	23.392.738,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	700.000,00
4	Kas di Bendahara FKTP	0,00	1.121.196,00
5	Kas di BLUD	8.440.642.883,71	14.887.478.979,28
6	Kas Dana BOS	58.920.342,00	15.990.060,00

No	ASET LANCAR	T.A 2022	T.A 2021
7	Kas Lainnya	535.571.669,00	0,00
8	Piutang Pajak netto	2.525.748.222,50	2.347.691.789,11
9	Piutang Retribusi Netto	1.179.575.545,00	1.513.163.850,00
10	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto	5.204.576.476,53	3.597.817.880,25
11	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya netto	22.133.103.639,00	19.943.565.916,00
12	Belanja di Bayar di muka Netto	61.006.104,66	28.523.253,90
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	72.646.000,00
14	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	10.302.983,33	11.417.655,00
15	Piutang Lainnya	33.581.341,05	0,00
16	Persediaan	18.158.310.385,38	11.276.817.233,74
	JUMLAH	**104.362.698.340,21**	**132.697.929.431,37**

7.5.3.1.1.1 **Kas di Kas Daerah**	**TA 2022**	**TA 2021**
	Rp44.504.956.103,05	**Rp79.050.248.880,09**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp44.504.956.103,05, merupakan saldo Kas Daerah milik Pemerintah Kabupaten Takalar yang berada di rekening Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53
Saldo Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Nama Rekening	Bank	No. Rekening	2022	2021
1	Penampungan Potongan Gaji	PT. Bank Sulselbar	021.100.0001.8	-	-
2	Kasda	PT. Bank Sulselbar	021.001.000000004.2	31.827.996.929,39	28.780.551.702,43
4	RKUD Kab. Takalar	PT. Bank Sulselbar	021.001.0931.7	12.467.131.445,00	50.062.974.935,00
5	Pemda Kab. Takalar	PT. Bank BNI	83193028	78.505.469,00	77.998.194,00
6	Pemda Kab Takalar	PT. Bank BRI	0250.01.000248.30.4	131.322.259,66	128.724.048,66
			Jumlah	**44.504.956.103,05**	**79.050.248.880,09**

Saldo senilai Rp44.504.956.103,05 merupakan saldo menurut Buku Kas Umum Daerah, sedangkan jumlah keseluruhan kas daerah pada Rekening Pemerintah Daerah senilai Rp45.692.777.365,05. Berdasarkan hasil rekonsiliasi bank terdapat selisih antara BKU Kas Daerah dengan Rekening Koran pada Nomor Rekening Kasda 021.001.0004.2 senilai Rp1.187.821.262,00. Selisih senilai Rp186.776.217,00 merupakan double debet SP2D oleh Bank Sulselbar yang telah dikembalikan pada tahun 2023 ke rekening kas daerah serta selisih senilai Rp1.374.597.479,00 merupakan SP2D yang sudah dicairkan oleh BUD namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga oleh Bank Sulselbar sampai dengan 31 Desember 2022. Rincian lebih lanjut dilihat pada **Lampiran 1.**

Adapun rincian Saldo Kas di Kas daerah senilai Rp44.504.956.103,05 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 54
Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Dana Tunjangan Sertifikasi Guru	316.751.080,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru	129.250.000,00
3	Dana Tunjangan Khusus Guru	8.744.400,00
4	Dana BOP PAUD	15.721.000,00
5	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	130.493.675,00
6	Dana BOK	986.908.510,00
7	Dana Pelayanan Keparawisataan	100.000,00
8	Dana BOKB	809.949.984,00
9	Sisa Dana PEN	11.631.735.860,00
10	Sisa Dana DPPID Tahun 2011	891.484.700,00
11	Utang dan KDP	7.397.993.953,64
12	Cukai Tembakau	-
13	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran	1.516.402.645,00
14	Sisa DAK Fisik 2019 – 2021	6.897.745.579,00
15	Kelebihan Transfer DAK Fisik bidang irigasi 2018	6.086.898.656,00
16	Sisa DAU, Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak dan PAD	7.684.776.060,41
Jumlah		**44.504.956.103,05**

7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

TA 2022	TA 2021
Rp1.516.402.645,00	**Rp23.392.738,00**

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 senilai Rp1.516.402.645,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 55

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Sisa Kas Tahun 2022	Sisa Kas Tahun 2021
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	955,00	0,00
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pint,. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	16.689.939,00
3	Sekretariat DPRD	0,00	6.702.799,00
4	Dinas Perhubungan	10.609.075,00	0,00
5	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	809,00	0,00
6	Sekretariat DPRD	743.515,00	0,00
7	Kecamatan Mangarabombang	4.010.991,00	0,00
8	Kecamatan Mappakasunggu	37.300,00	0,00
9	BKAD	1.501.000.000.00	0,00
	TOTAL	**1.516.402.645,00**	**23.392.738,00**

Saldo Kas Tahun 2022 senilai Rp1.516.402.645,00 merupakan saldo kas yang terdiri dari sisa UP/GU yang belum disetor ke rekening kas daerah sampai 31 Desember 2022 senilai Rp16.402.645,00 dan BTT yang dicairkan tanggal 30 Desember 2022 sesuai Keputusan Bupati Takalar Nomor 652 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Kencang, Abrasi Tahun 2022 dan Pembayaran Biaya Provisi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Kabupaten Takalar TA 2021 namun tidak direalisasikan senilai Rp1.500.000.000,00.

Rekapitulasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 1a.**

7.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan	**TA 2022**	**TA 2021**
	Rp0,00	**Rp700.000,00**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 saldo Tahun 2021 senilai Rp700.000,00. Rekapitulasi saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 1b.**

7.5.3.1.1.4 Kas di Bendahara FKTP	**TA 2022**	**TA 2021**
	Rp0,00	**Rp1.121.196,00**

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dan saldo TA 2021 senilai Rp1.121.196,00. Saldo Kas di Bendahara FKTP dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 56
Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Puskesmas	Saldo Dana FKTP	
		2022	2021
1	Kas Tunai di FKTP Puskesmas Kepulauan Tanakeke	0,00	12.100,00
2	Kas Tunai di FKTP Puskesmas Bontomangape	0,00	1.109.096,00
	Jumlah	**0,00**	**1.121.196,00**

Terdapat saldo kas dana kapitasi pada TA 2021 untuk dua puskesmas yang belum diakui karena belum tersedia akun Puskesmas tersebut dalam APBD. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah pada Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa saldo kas di Bendahara FKTP tidak harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Rekapitulasi penerimaan Dana FKTP Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 1c.**

7.5.3.1.1.5 Kas di BLUD

TA 2022	TA 2021
Rp8.440.642.883,71	**Rp14.887.478.979,28**

Saldo Kas di BLUD pada RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle per 31 Desember 2022 senilai Rp8.440.642.883,71, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57
Saldo Kas di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	No Rekening	Saldo Kas BLUD Tahun 2022	Saldo Kas BLUD Tahun 2020
1	Bank Negara Indonesia	01418210652	5.127.700.897,00	227.584.999,00
2	Bank Rakyat Indonesia	025001000382302	6.060.001,40	5.102.419,00
3	Bank Rakyat Indonesia	025001001333306	812.514.486,22	773662848,22
4	Bank Negara Indonesia	0686104497	65.295.770,00	11.034.166.595,00
5	Kas Tunai di Bendahara Penerimaan BLUD	-	28.777.500,00	20.989.900,00
6	Bank SulSelBar BLUD	021.003.000022222.8	2.380.986.161,09	2.777.871.721,06
7	Bank SulSelBar Bend Pengeluaran BLUD	021.003.000033333.0	5.711.867,00	4.026.349,00

No	Nama Bank	No Rekening	Saldo Kas BLUD Tahun 2022	Saldo Kas BLUD Tahun 2020
8	Bank SulSelBar Bend Penerimaan BLUD	021.003.000011111.6	13.596.201,00	44.074.148,00
		Jumlah	**8.440.642.883,71**	**14.887.478.979,28**

Rekapitulasi saldo Dana BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 1d.**

7.5.3.1.1.6 Kas Dana Bos

TA 2022	TA 2021
Rp58.920.342,00	**Rp15.990.060,00**

Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 senilai Rp58.920.342,00 merupakan saldo kas dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) Negeri TA 2022 yang dikelola oleh Bendahara Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tingkat Sekolah Dasar Negeri/sederajat se-Kabupaten Takalar sejumlah 234 sekolah, dimana saldo akhir pada Bendahara Dana BOS senilai Rp43.067.925,00.
b. Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri/sederajat se-Kabupaten Takalar sejumlah 37 sekolah, dimana saldo akhir pada Bendahara Dana BOS senilai Rp14.744.236,00.
c. Pajak PPN/PPh senilai Rp1.108.181,00 yang belum disetor oleh bendahara dana BOS.

Rincian Laporan Penggunaan Dana BOS SD–SDLB Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 1e**.

7.5.3.1.1.7 Kas Lainnya

TA 2022	TA 2021
Rp535.571.669,00	**Rp0,00**

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp535.571.669,00 merupakan saldo kas dana JKN Non Kapitasi pada pengelola JKN Dinas Kesehatan pada Bank Sulselbar Nomor Rekening 021-002-000000689-7 sebesar Rp447.643.469,00 dan RSUD Pratama Takalar pada Bank Sulselbar Nomor Rekening 021-003-000000737-8 sebesar Rp87.928.200,00 atas penerimaan klaim BPJS di 14 Puskesmas. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1f**.

7.5.3.1.1.8 Investasi Jangka Pendek	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Investasi jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah senilai Rp0,00.

7.5.3.1.1.9 Piutang Pajak	TA 2022	TA 2021
	Rp11.195.070.930,00	**Rp10.531.839.726,99**

Piutang Pajak per 31 Desember 2022 senilai Rp11.195.070.930,00 dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah. Piutang Pajak per 31 Desember 2021 senilai Rp10.531.839.726,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58
Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Pajak Air Permukaan	44.425.700,00	0,00
2	Pajak Hotel	2.600.000,00	2.600.000,00
3	Pajak Restoran/Rumah Makan	20.300.000,00	20.300.000,00
4	Pajak Hiburan	2.553.250,00	2.553.250,00
5	Pajak Reklame	81.974.248,00	85.492.278,00
6	Pajak Penerangan Jalan	992.971.465,00	892.219.187,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	1.250.000,00	0,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.021.741.434,00	9.500.920.179,00
9	BPHTB	27.254.833,00	27.754.833,00
Total		**11.195.070.930,00**	**10.531.839.726,99**

Penyisihan Piutang Pajak	TA 2022	TA 2021
	Rp(8.669.322.707,50)	**Rp(8.184.147.937,88)**

Saldo Penyisihan Piutang Pajak tidak Tertagih per 31 Desember 2022 senilai Rp8.669.322.707,50 piutang pajak netto senilai Rp2.525.748.222,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59
Rincian Piutang Pajak dan Penyisihan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Setelah Penyisihan
1	Pajak Air Bawah Tanah	44.425.700,00	444.257,00	43.981.443,00
2	Pajak Hotel	2.600.000,00	2.562.500,00	37.500,00
3	Pajak Restoran/Rumah Makan	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00
4	Pajak Hiburan	2.553.250,00	2.553.250,00	0,00
5	Pajak Reklame	81.974.248,00	38.618.908,21	43.355.339,79
6	Pajak Penerangan Jalan	992.971.465,00	10.005.890,65	982.965.574,35
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	1.250.000,00	12.500,00	1.237.500,00
8	PBB - P2	10.021.741.434,00	8.567.570.568,64	1.454.170.865,36
9	BPHTB	27.254.833,00	27.254.833,00	0,00
	Jumlah	**11.195.070.930,00**	**8.669.322.707,50**	**2.525.748.222,50**

Rincian atas piutang pajak beserta penyisihannya per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 2a.**

7.5.3.1.1.10 Piutang Retribusi

TA 2022	TA 2021
Rp3.071.712.273.00	**Rp3.138.166.773.00**

Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp3.071.712.273,00 dan Rp3.138.166.773,00 dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan dan belum dilunasi oleh wajib retribusi. Rincian Piutang Retribusi pada tabel berikut:

Tabel 60
Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	**Dinas Perhubungan**		
	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	88.871.773,00	88.871.773,00
2	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**		
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan	324.940.000,00	278.415.000,00
3	**Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan**		
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	974.485.500,00	854.965.000,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.062.900.000,00	1.325.400.000,00

No	Uraian	2022	2021
4	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	620.515.000,00	590.515.000,00
Jumlah		**3.071.712.273.00**	**3.138.166.773.00**

Penyisihan Piutang Retribusi	**TA 2022**	**TA 2021**
	(Rp1.892.136.728,00)	**(Rp1.625.002.923.00)**

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 senilai Rp1.892.136.728,00 sehingga nilai piutang retribusi netto menjadi senilai Rp1.179.575.545,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61
Rincian Piutang Retribusi Daerah dan Penyisihan Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Piutang	Penyisihan	Nilai Piutang Setelah Penyisihan
1	**Dinas Perhubungan**			
	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	88.871.773,00	88.871.773,00	0
2	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**			
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	324.940.000,00	169.840.750,00	155.099.250,00
3	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**			
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.062.900.000,00	516.125.000,00	546.775.000,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	974.485.500,00	697.534.205,00	276.951.295,00
4	**Dinas Kelautan dan Perikanan**			
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	620.515.000,00	419.765.000,00	200.750.000,00
Jumlah		**3.071.712.273,00**	**1.892.136.728,00**	**1.179.575.545,00**

Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 2b.**

7.5.3.1.1.11 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	TA 2022	TA 2021
	Rp9.352.195.188,20	**Rp3.634.159.475,00**

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah senilai Rp9.352.195.188,20 dan Rp3.634.159.475,00. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan piutang atas klaim pelayanan kesehatan bulan Desember Tahun 2022 pada RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle senilai Rp4.818.489.600 dan Denda Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp4.533.705.588,20. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Tabel 62
Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Piutang	Keterangan
1	Klaim Pelayanan BPJS	4.818.489.600,00	Desember 2022
2	Denda Piutang PBB-P2	4.539.923.137,20	2014 s.d 2022
	Jumlah	**9.352.195.188,20**	

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	TA 2022	TA 2021
	(Rp4.147.618.711,67)	**(Rp36.341.594,75)**

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 senilai Rp4.147.618.711,67 sehingga nilai netto Piutang Lain-Lain PAD yang Sah senilai Rp5.204.576.476,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63
Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dan Penyisihan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Piutang	Penyisihan Piutang	Piutang Seteleh Penyisihan
1	Klaim Pelayanan BPJS Bulan Desember 2022	4.818.489.600,00	48.184.896,00	4.770.304.704,00
2	Denda Piutang PBB-P2	4.533.705.588,20	4.099.433.815,67	434.271.772,53
	Jumlah	**9.352.195.188,20**	**4.147.618.711,67**	**5.204.576.476,53**

Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada **Lampiran 3** dan **Lampiran 4.**

7.5.3.1.1.12 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp0,00.

7.5.3.1.1.13 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	TA 2022	TA 2021
	Rp22.133.103.639,00	Rp19.943.565.916,00

Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp22.133.103.639,00 dan Rp19.943.565.916,00, merupakan piutang Dana Bagi Hasil Pajak untuk Bulan Agustus s.d. Desember 2022 dan Dana Bagi Hasil pajak Rokok Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan untuk Bulan Oktober s.d. Desember 2022 (Triwulan IV) sesuai SK Penetapan sebagai berikut :

Tabel 64
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Berdasarkan SK Penetapan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	SK Penetapan	Nilai
1	2171/X/TAHUN 2022 Tanggal 31 Oktober 2022	3.327.785.732,00
2	2442/XI/TAHUN 2022 Tanggal 30 November 2022	3.528.066.944,00
3	2619/XII/TAHUN 2022 Tanggal 26 Desember 2022	3.754.325.127,00
4	431/II/TAHUN 2023 Tanggal 13 Feb 2023	3.934.960.426,00
5	571/III/TAHUN 2023 Tanggal 3 Maret 2023	4.213.793.401,00
6	2649/XII/Tahun 2022Tanggal 29 Desember 2022	3.374.172.009,00
	Jumlah	**22.133.103.639,00**

Rincian berdasarkan objek pajak sebagai berikut :

Tabel 65
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Berdasarkan Objek Pajak per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Nilai
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.591.907.005,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	4.101.727.998,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	9.009.816.742,00

No	Jenis Pajak	Nilai
4	Pajak Air Permukaan PDAM	46.240.803,00
5	Pajak Air Permukaan Bakaru/Suwito	9.239.082,00
6	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	3.374.172.009,00
	Jumlah	**22.133.103.639,00**

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

7.5.3.1.1.14	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**TA 2022**	**TA 2021**
		Rp0,00	**Rp0,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00 dan Tahun 2021 adalah senilai Rp0,00.

7.5.3.1.1.15	**Piutang Pendapatan Lainnya**	**TA 2022**	**TA 2021**
		Rp0,00	**Rp0,00**

Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah senilai Rp0,00.

7.5.3.1.1.16	**Belanja Dibayar di Muka**	**TA 2022**	**TA 2021**
		Rp61.006.104,66	**Rp28.523.253,90**

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 senilai Rp61.006.104,66 merupakan pajak kendaraan bermotor pada beberapa SKPD. Rincian Belanja Dibayar di Muka pada **Lampiran 6.**

7.5.3.1.1.17	**Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara**	**TA 2022**	**TA 2021**
		Rp0,00	**Rp0,00**

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp0,00.

7.5.3.1.1.18	**Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah**	**TA 2022**	**TA 2021**
		Rp0,00	**Rp0,00**

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp0,00.

7.5.3.1.1.19	**Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat**	**TA 2022**	**TA 2021**
		Rp0,00	**Rp0,00**

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp0,00.

7.5.3.1.1.20	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	TA 2022	TA 2021
		Rp0,00	**Rp0,00**

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp0,00.

7.5.3.1.1.21	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	TA 2022	TA 2021
		Rp0,00	**Rp72.646.000,00**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran senilai Rp72.646.000,00 dan penyisihannya direklasifikasi ke aset lainnya.

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	TA 2022	TA 2021
	(Rp0,00)	**(Rp72.646.000,00)**

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dikelompokkan dalam piutang macet karena sudah berumur lebih dari 5 tahun sehingga dilakukan penyisihan 100%. Saldo senilai Rp72.646.000,00 di reklasifikasi ke aset lainnya tagihan penjualan anggsuran.
Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan perhitungan penyisihan pada **Lampiran 7.**

7.5.3.1.1.22	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	TA 2022	TA 2021
		Rp10.302.983,33	**Rp1.318.803.184,59**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp10.302.983,33 adalah jumlah SKTJM yang jatuh tempo sebanyak 8 kasus pada Tahun 2023.

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	TA 2022	TA 2021
	(Rp0,00)	**(Rp1.307.385.529,59)**

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dan Tahun 2021 senilai Rp1.307.385.529,59 direklasifikasi ke aset lainnya Tuntutan Ganti Kerugian. Rincian pada **Lampiran 8.**

7.5.3.1.1.23 Piutang Lainnya	TA 2022	TA 2021
	Rp193.168.754,00	**Rp155.861.000,00**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp193.168.754,00 dan Rp155.861.000,00 merupakan piutang Dana Denfarm KIPPK, Piutang kepada Pihak Ketiga pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Penerimaan PBB-P2 dan Penerimaan Pajak Reklame yang telah disetor oleh Wajib Pajak namun belum disetor di Kas Daerah Tahun 2022. Atas Penerimaan PBB-P2 dan Pajak Reklame telah disetor pada Tahun 2023. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66
Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Piutang	Penyisihan	Saldo setelah penyisihan
1	Piutang Dana Denfarm KIPPK	149.691.000,00	149.691.000,00	0,00
2	Piutang kepada Pihak Ketiga	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00
3	Piutang Lainnya / PBB-P2	22.579.519,00	4.074.130,60	18.505.388,40
4	Piutang Lainnya / Pajak Reklame	15.228.235,00	152.282,32	15.075.952,68
Jumlah		**193.168.754,00**	**159.587.412,92**	**33.581.341,08**

Penjelasan atas piutang lainnya adalah sebagai berikut:

1) Piutang Dana Denfarm KIPPK
   Merupakan saldo Piutang kepada 13 kelompok tani untuk pembuatan tanaman percontohan pada KIPPK/Badan Ketahanan Pangan senilai Rp149.691.000,00.
   Rincian Piutang Dana Denfarm KIPPK dapat dilihat pada **Lampiran 9.**
2) Piutang kepada Pihak Ketiga
   Merupakan saldo Piutang kepada pihak ketiga atas pengadaan sarana dan prasarana penangkaran benih menuju Desa Mandiri Benih pada UPTD Pertanian Sanrobone yang dilaksanakan oleh CV Fathir Putra Yasfat yang sudah dibayarkan uang muka masing-masing 30% dari nilai kontrak untuk pengadaan tersebut. Sisa piutang yang belum diterima senilai Rp5.670.000,00. Rincian Piutang kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 10 .**
3) Piutang PBB-P2 dan Piutang Pajak Reklame
   Merupakan setoran PBB-P2 dan pajak reklame dari wajib pajak tahun 2022 yang disetor tahun 2023 senilai Rp37.807.754,00. Rincian setoran Piutang PBB-P2 dan Piutang Pajak Reklame dapat dilihat pada **Lampiran 10a.**

Penyisihan Piutang Lainnya	TA 2022	TA 2021
	(Rp159.587.412,95)	(Rp155.861.000,00)

Terhadap saldo piutang Dana Denfarm KIPPK dan piutang pihak ketiga diperoleh penyisihan piutang senilai Rp159.587.412,95, dan nilai piutang setelah penyisihan adalah senilai Rp33.581.341,05.

7.5.3.1.1.24 Persediaan

TA 2022	TA 2021
Rp18.158.310.385,38	Rp11.276.817.233,74

Persediaan Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp18.158.310.385,38 dan Rp11.276.817.233,74. Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Takalar dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD per 31 Desember 2022. Rincian persediaan pada **Lampiran 11.**

7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	TA 2022	TA 2021
	Rp95.567.956.883,07	Rp71.886.257.289,91

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang ditujukan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Jumlah Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp95.567.956.883,07 dan Rp71.886.257.289,91 dengan rincian nilai investasi sebagai berikut:

Tabel 67
Saldo Investasi per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Akun	2022	2021
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	95.567.956.883,07	71.886.257.289,91
	Total	**95.567.956.883,07**	**71.886.257.289,91**

7.5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang ditujukan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan senilai Rp0,00. Saldo tersebut merupakan saldo Investasi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam bentuk Kas di bank serta pinjaman berupa pokok dan bunga Pinjaman Kredit Usaha Pengembangan Ekonomi

Rakyat Takalar (KUPERTA), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera Takalar (KUKESRATA), PEP2T dan Dana Bergulir. Nilai nominal penyisihan dan *Net Realizable Value* (NRV) Investasi Non Permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing senilai Rp8.016.548.129,00 dan Rp8.016.548.129,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 68
Rekapitulasi Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Pokok dan Bunga	Penyisihan	NRV	Saldo di Bank	Nilai
1	**Dinas PPKBPPPA**	**697.320.600,00**	**697.320.600,00**	**0,00**	**612.238.795,00**	**612.238.795,00**
	Kukesrata	*391.145.600,00*	*391.145.600,00*	0,00	281.399.175,00	281.399.175,00
	PEP2T	*306.175.000,00*	*306.175.000,00*	0,00	330.839.620,00	330.839.620,00
2	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**1.638.926.919,00**	**1.638.926.919,00**	**0,00**	**94.557.109,00**	**94.557.109,00**
3	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**	**3.313.958.200,00**	**3.313.958.200,00**	**0,00**	**103.787.090,00**	**103.787.090,00**
	Koperasi dan UMKM	*2.835.064.120,00*	*2.835.064.120,00*	0,00	103.666.090,00	103.666.090,00
	Perindag	*478.894.080,00*	*478.894.080,00*	0,00	121.000,00	121.000,00
4	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**2.366.342.410,00**	**2.366.342.410,00**	**0,00**	**198.396.080,00**	**198.396.080,00**
	Bid.Tanaman Pangan	*1.220.834.576,00*	*1.220.834.576,00*	0,00	104.386.471,00	104.386.471,00
	Bid.Peternakan	*1.145.507.834,00*	*1.145.507.834,00*	0,00	94.009.609,00	94.009.609,00
Jumlah		**8.016.548.129,00**	**8.016.548.129,00**	**0,00**	**1.008.979.074,00**	**1.008.979.074,00**

Berdasarkan analisis umur piutang, Investasi Non Permanen pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp0,00. Investasi Non Permanen pada 3 SKPD tersebut termasuk dalam kategori macet. Saldo kas di bank yang tidak digulirkan senilai Rp1.008.979.074,00 direklasifikasi ke aset lainnya-kas yang dibatasi penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69
Rincian Saldo Dana Kukesrata, PEP2T, Kuperta dan Dana Bergulir di Bank per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Bank	No. Rekening	Nilai
1	Dana KUKESRATA – BKBPP	BRI Cabang Takalar	00000-250-01-000264-30-0	281.399.175,00
2	Dana PEP2T – BKBPP	BNI Cabang Takalar	83192999	330.839.620,00
3	Dana Kuperta - Dinas kelautan dan perikanan	Bank Sulselbar Cabang Takalar	0021-002-000004066-1	93.687.000,00
4	Dana Bergulir – Dinas Kelautan dan Perikanan	Bank Sulselbar Cabang Takalar	002-000004314-8	400.408,00
5	Dana Kuperta – Eks Dinas Koperasi	Bank Sulselbar Cabang Takalar	0021-002-003004216-8	103.666.090,00
6	Dana Kuperta – Eks Dinas Perindag	BNI Cabang Takalar	270869980	121.000,00
7	Dana Kuperta Dinas Pertanian Bidang Tanaman Pangan	Bank Sulselbar Cabang Takalar	0021-002-000004232-0	99.226.000,00
8	Dana Kuperta Dinas Pertanian Bidang Peternakan	Bank Sulselbar Cabang Takalar	0021-002-000004187-1	84.960.000,00
Jumlah				**994.299.293,00**
9	Tim Pokjanis Kuperta	Bank Sulselbar Cabang Takalar	21-002-000005506-5	373.669,00
10	Dinas Peternakan/FEE Kuperta	Bank Sulselbar Cabang Takalar	21-002-000005624-0	9.049.609,00
11	Dinas Perikanan/FEE Kuperta	Bank Sulselbar Cabang Takalar	21-002-000005625-8	469.701,00
12	Dinas Pertanian/FEE Kuperta	Bank Sulselbar Cabang Takalar	21-002-000005698-3	4.786.802,00
			Jumlah	**14.679.781,00**
			Total	**1.008.979.074,00**

Rincian Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

7.5.3.1.2.2. Investasi Permanen

TA 2022	TA 2021
Rp95.567.956.883,07	**Rp71.886.257.289,91**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak ditujukan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh

yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dicatat berdasarkan harga perolehan (metode biaya) untuk investasi dengan kepemilikan kurang dari 20% dan dicatat dengan metode ekuitas untuk investasi dengan kepemilikan lebih dari 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi pemerintah daerah memiliki kendali signifikan atas perusahaan.

A. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp95.567.956.883,07 dan Rp71.886.257.289,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70
Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Nama Bank/BUMD	Nilai Investasi per 31 Desember 2021	Nilai Investasi per 31 Desember 2022	Bertambah/ (berkurang)
1	Bank Sulselbar	23.940.000.000,00	53.230.000.000,00	29.290.000.000,00
2	BPR GMD Galesong	10.257.225.267,28	10.533.880.942,25	276.655.674,97
3	BPR Surya Sejati Pattalassang	1.594.596.857,63	1.608.382.386,82	13.785.529,19
4	PDAM	35.094.435.165,00	29.515.408.980,00	(5.579.026.185,00)
5	Perusda Panrannuangku	1.000.000.000,00	680.284.574,00	(319.715.426,00)
	Total Nilai Investasi	**71.886.257.289,91**	**95.567.956.883,07**	**23.681.699.593,16**

1) Bank Sulselbar

Metode penilaian investasi yang digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Kab. Takalar pada PT. Bank Sulselbar adalah Metode Biaya karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Takalar pada Bank Sulselbar hanya 3,00%. Saldo Penyertaan modal per 31 Desember 2022 senilai Rp53.230.000.000,00. Penyertaan Modal Pemda sesuai hasil RUPS Tahun 2021 mengalami penambahan senilai Rp29.290.000.000,00 dari jumlah tahun sebelumnya senilai Rp23.940.000.000.

2) BPR GMD Galesong

Metode penilaian investasi yang digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Takalar pada BPR GMD Galesong adalah Metode Ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten senilai 98,24% sesuai Laporan Keuangan BPR GMD Galesong Tahun 2022. Berdasarkan hasil perhitungan saldo investasi permanen, kepemilikan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 menjadi Rp10.533.880.942,25 mengalami kenaikan senilai Rp276.655.674,97 dari nilai investasi Tahun 2021 senilai Rp10.257.225.267,28.

3) BPR Surya Sejati Palleko
Metode penilaian investasi yang digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Takalar pada BPR Surya Sejati Palleko adalah Metode Ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten pada BPR Surya Sejati Palleko senilai 49,78%. Saldo Penyertaan modal pada BPR Surya Sejati Palleko s.d. 31 Desember 2022 senilai Rp1.608.382.386,82, mengalami kenaikan senilai Rp13.785.529,19 dari nilai investasi Tahun 2021 senilai Rp1.594.596.857,63.

4) PDAM Kabupaten Takalar
Metode penilaian investasi yang selama ini digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Takalar pada PDAM Kabupaten Takalar adalah Metode Ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten pada PDAM Kabupaten Takalar senilai 100%. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar s.d. 31 Desember 2022 pada PDAM senilai Rp29.515.408.980,00, mengalami penurunan senilai Rp5.579.026.185,00 dari nilai investasi Tahun 2021 senilai Rp35.094.435.165,00. Penurunan investasi disebabkan kerugian pada tahun berjalan senilai Rp5.615.040.893,00 dan koreksi saldo awal bertambah senilai Rp36.014.708,00.

5) PT. Butta Panrannuangku (Perseroda)
Pada Tahun 2022 diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Panrannuangku menjadi PT. Butta Panrannuangku (Perseroda).
Metode penilaian investasi yang digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Takalar pada PT. Butta Panrannuangku (Perseroda) adalah Metode Ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten adalah 100%. Saldo penyertaan modal pada Perusda Panrannuangku s.d. 31 Desember 2022 senilai Rp680.284.574,00, mengalami penurunan senilai Rp319.715.426,00 dari nilai investasi Tahun 2021 senilai Rp1.000.000.000. Penurunan investasi ini disebabkan kerugian operasional senilai Rp742.715.426,00 dan hibah masuk dari Bank Sulselbar senilai Rp423.000.000,00.
Rincian Saldo penyertaan modal Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 12a.**

B. Investasi Permanen Lainnya
Saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan senilai Rp0,00.

		TA 2022	TA 2021
7.5.3.1.3.	**Aset Tetap**	**Rp1.526.442.636.813,47**	**Rp1.260.397.928.982,40**

Aset Tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp1.526.442.636.813,47 dan Rp1.260.397.928.982,40 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 71
Rincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Mutasi		Per 31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	359.089.439.109,36	46.784.955.512,50	38.712.833.151,36	367.161.561.470,50
2	Peralatan dan Mesin	291.787.791.480,95	90.335.247.575,45	35.986.072.791,78	346.136.966.264,62
3	Gedung dan Bangunan	713.778.904.371,69	309.959.179.338,92	252.321.559.785,31	771.416.523.925,30
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.172.656.989.637,65	289.609.737.640,26	141.190.145.331,95	1.321.076.581.945,96
5	Aset Tetap Lainnya	13.281.591.169,36	4.602.976.912,00	4.221.798.107,75	13.662.769.973,61
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.976.874.144,18	135.817.520.612,52	28.680.479.144,18	136.113.915.612,52
7	Akumulasi Penyusutan	-1.319.173.660.930,79	-231.725.447.590,10	-121.773.426.141,85	-1.429.125.682.379,04
Jumlah		**1.260.397.928.982,40**	**645.384.170.001,55**	**379.339.462.170,48**	**1.526.442.636.813,47**

Variabel yang mempengaruhi Aset Tetap dijelaskan pada masing-masing akun Aset Tetap yang berkenaan dengan deskripsi sebagai berikut:

7.5.3.1.3.1 Tanah

TA 2022	TA 2021
Rp367.161.561.470,50	**Rp359.089.439.109,36**

Tanah Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp367.161.561.470,50 dan Rp359.089.439.109,36 atau mengalami kenaikan 2,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72
Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Aset Tetap Tanah 31 Desember 2021 (LK Audited)	**359.089.439.109,36**
Saldo Aset Tetap Tanah 1 Januari 2022	**359.089.439.109,36**
Penambahan:	
Belanja Modal	4.576.325.420,00
Mutasi Masuk	36.260.917.792,50

Uraian	Jumlah
Reklasifikasi Belanja Modal Gedung ke KDP/Tanah/Peralatan/JIJ/ATL	586.316.300,00
Hibah Masuk	5.361.396.000,00
Jumlah Penambahan	**46.784.955.512,50**
Mutasi Keluar	36.260.917.792,50
Reklasifikasi Belanja Modal Tanah Ke ATL	150.000.000,00
Reklasifikasi aset Lain-Lain (belum di atribusi ke induk)	792.361.358,86
Reklasifikasi ke aset Lain-Lain Milik Desa	1.471.294.000,00
Reklasifikasi ke aset Lain-Lain masyarakat/Pihak ke 3/Instansi Vertikal	38.260.000,00
Jumlah Pengeluaran	**38.712.833.151,36**
Saldo Aset Tetap Tanah 31 Desember 2022	**367.161.561.470,50**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

Penambahan dan pengurangan Aset Tanah selain yang bersumber dari Belanja Modal Tanah, juga diantaranya disebabkan adanya beberapa hal antara lain:

1. Hibah Masuk Tanah
   a. Hibah Tanah dari Kementerian Agama berupa berupa Tanah Kantor KUA Pattalassang yang berlokasi Jalan Fitrah Kec. Pattalassang Kab. Takalar berdasarkan Naskah Hibah Nomor B-2316/KK.21.21/ 1/ Ks.00/11/2022-028/168/Umum tanggal 30 Nov 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor B-3417/Kk.21 .21/1/Ks.00/11/2022 tanggal 30 Nov 2022, senilai Rp4.786.031.000,00 dengan luas 1.925 M2
   b. Hibah Tanah dari Kementerian Agama berupa berupa Tanah Kantor KUA Pattalassang yang berlokasi Jalan Fitrah Kec. Pattalassang Kab. Takalar berdasarkan Naskah Hibah Nomor B-2316/KK.21.21/ 1/ Ks.00/11/2022-028/168/Umum tanggal 30 Nov 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor B-3417/Kk.21 .21/1/Ks.00/11/2022 tanggal 30 Nov 2022, senilai Rp4.786.031.000,00 dengan luas 235 M2.
2. Terdapat Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Tanah Senilai Rp586.316.300,00 berupa Penimbunan pada Dinas Pekerjaan

Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan rincian pada **lampiran 14**

3. Terdapat Reklasifikasi Belanja Modal Tanah ke Aset tetap lainnya senilai Rp150.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan berupa Penyusunan Kajian Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (ex Kantor PT. Bank Sulselbar Cab. Takalar) sesuai Nomor Kontrak: 005/KTR/PPK-DLHP/III/2022, Tanggal 02 Maret 2022 dan Kajian Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (ex Kantor Pengadilan Agama Kab. Takalar).

Terdapat beberapa permasalahan aset tanah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, antara lain:

1. Tanah tidak bersertifikat.

Hingga per 31 Desember 2022, posisi data pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel 73
Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Takalar
(Dalam Rupiah)

Kriteria	Jumlah Bidang	Luas (m2)	Nilai Perolehan
Bersertifikat	383	2.818.983,00	170.598.726.806,50
Tidak Bersertifikat	721	4.505.437,88	196.562.834.664,00
Total Tanah	**1.104,00**	**7.324.420,88**	**367.161.561.470,50**

Untuk Persertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Takalar per SKPD pada **Lampiran 15.**

2. Aset Tanah yang Dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa didukung perjanjian

Terdapat tanah milik Pemerintah Kabupaten Takalar (KIB Setda) Taman KITA senilai Rp255.000.000,00 yang dimanfaatkan oleh PT Butta Panrannuangku (Perseroda). Aset tanah tersebut dimanfaatkan dengan Perseroda menempatkan bangunan kios non permanen (kontainer) untuk kegiatan perdagangan UKM dan menyewakan kontainer kepada para pedagang. Namun, pemanfaatan atas aset tersebut belum didukung dengan perjanjian kerjasama.

3. Pemanfaatan dan Investasi Properti Tanah.

Terdapat 36 bidang tanah seluas 1.926.247 m^2 dengan nilai Rp36.939.663.120,00 telah memenuhi kriteria properti investasi namun belum disajikan pada akun Properti Investasi. Rincian pada **Lampiran 16.**

Atas Aset Tanah yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Takalar dengan PT. Butta Panrannuangku (Perseroda) terdapat permasalahan dengan rincian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah Lapak UMKM Jalan Ince Husain Dg Parani

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah Lapak UMKM Jalan Ince Husain Dg Parani didasarkan pada Perjanjian Nomor 028/310/Umum dan 008/PDP/PJK/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, dengan nilai kontrak sewa atas delapan lapak senilai Rp6.000.000,00/tahun (8 x Rp750.000,00/Tahun). Jangka waktu perjanjian selama tiga tahun sejak 7 Maret 2022 s.d. 7 Maret 2025. Berdasarkan Pasal 9 perjanjian tersebut menyatakan bahwa pada saat berakhirnya perjanjian, Pihak Kedua harus menyerahkan aset Pemerintah Kabupaten Takalar dalam kondisi baik, tanpa memperhitungkan biaya investasi yang pernah timbul terhadap barang tersebut kepada Pihak Kesatu. Perjanjian kerjasama ini telah diakhiri dengan kesepakatan bersama Nomor 028/1125/UMUM dan Nomor 015/PDP/PJK/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022. Namun, sampai saat ini Perseroda belum menyerahkan lapak tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.

b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah Lahan Depan RSUD H. Padjonga Dg Ngalle

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah Lahan Depan RSUD H. Padjonga Dg Ngalle didasarkan pada Perjanjian Nomor 028/309/Umum dan 007/PDP/PJK/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan masa kontrak tanggal 7 Maret 2022 s.d. tanggal 7 Maret 2025.

Pada Pasal 4 Bentuk Kerjasama menyatakan bahwa Perseroda akan membangun lapak sebanyak tiga puluh (30) unit di lahan kosong depan RSUD H. Padjonga Dg Ngalle yang akan diperuntukkan untuk para pelaku UMKM. Berdasarkan Pasal 8 menyatakan bahwa pada saat pengakhiran perjanjian kerjasama, Pihak Kedua wajib menyerahkan seluruh aset yang telah dibangun dan dikelola oleh Pihak Kedua kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dalam kondisi baik, tanpa memperhitungkan biaya investasi yang pernah timbul terhadap barang/aset tersebut.

Perjanjian Kerjasama ini telah diakhiri dengan kesepakatan bersama Nomor 028/1114/UMUM dan 014/PDP/PJK/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022. Namun, aset 30 lapak yang telah dibangun oleh Perseroda belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.

c. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah Lahan Pasar Sentral

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah Lahan Pasar Sentral didasarkan pada Perjanjian Nomor 028/3185/Umum dan

029/PDP/PJK/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 selama lima tahun dengan masa kontrak tanggal 28 Oktober 2021 s.d. tanggal 28 Oktober 2026.

Perjanjian pada Pasal 4 Bentuk Kerjasama menyatakan bahwa Perseroda akan membangun lapak di lahan kosong Pasar Sentral milik Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yang ditempatkan dalam Area Pasar Sentral yang akan diperuntukkan untuk para pelaku UMKM. Berdasarkan Pasal 8 menyatakan bahwa pada saat pengakhiran perjanjian kerjasama, Pihak Kedua wajib menyerahkan seluruh aset yang telah dibangun dan dikelola oleh Pihak Kedua kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dalam kondisi baik, tanpa memperhitungkan biaya investasi yang pernah timbul terhadap barang/aset tersebut.

Perjanjian Kerjasama ini telah diakhiri dengan kesepakatan bersama Nomor 028/1159/UMUM dan 016/PDP/PJK/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022. Namun, aset lapak yang telah dibangun oleh Perseroda belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.

d. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah Lahan Empang.

Pengelolaan sepuluh lahan empang sebelum dikerjasamakan dengan PT Butta Panrannuangku (Perseroda) dikelola oleh Dinas Perikanan dengan melakukan perikatan kerjasama sewa lahan empang yang dilakukan melalui proses lelang.

Pengelolaan atas sepuluh lahan empang tersebut, sejak Tahun 2021 diserahkan kepada PT Butta Panrannuangku (Perseroda) berdasarkan Perjanjian Nomor 900/939/Keu dan Nomor 009/PDP/PJK/IV/2021 tanggal 18 Mei 2021, nilai kontrak sebanyak sepuluh lahan empang senilai Rp145.000.000,00 per tahun dengan jangka waktu kontrak adalah tiga tahun sejak 18 Mei 2021 s.d. 18 Mei 2024.

e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah Lahan Parkir Depan RSUD

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah Lahan Parkir Depan RSUD didasarkan pada Perjanjian Nomor 08/445/RSUD/I/2022 dan 01.A/PDP/PJK/I/2022 tanggal 5 Januari 2022, nilai kontrak senilai Rp20.000.000,00 per bulan atau Rp240.000.000,00 per Tahun selama tiga Tahun dengan masa kontrak tanggal 31 Mei 2021 s.d. tanggal 31 Mei 2022.

		TA 2022	TA 2021
7.5.3.1.3.2	**Peralatan dan Mesin**	**Rp346.136.966.264,62**	**Rp291.787.791.480,95**

Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp346.136.966.264,62 dan Rp291.787.791.480,95 atau mengalami kenaikan 18,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 (LK Audited)	**291.787.791.480,95**
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 1 Januari 2022	**291.787.791.480,95**
Penambahan:	
Belanja Modal	77.491.881.979,00
Belanja Barang dan Jasa	59.902.000,00
BOP PAUD Negeri	10.180.000,00
Mutasi Masuk	6.612.150.369,74
Pengadaan (Dana Bos dari Belanja Barang dan Jasa)	115.812.700,00
Reklasifikasi Belanja Modal ATL Ke Peralatan	25.355.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal ATL ke Peralatan (Dana Bos)	36.003.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal Gedung ke Peralatan	271.478.200,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain Ke Aset Tetap	2.437.978.605,71
Koreksi Bertambah Beda Golongan Aset	352.181.971,00
Jumlah Penambahan	**87.412.923.825,45**
Pengurangan:	
Mutasi Keluar	6.612.150.369,74
Reklas Berkurang Aset Lain-Lain Hasil Inventarisasi (Rusak Berat)	13.293.158.610,58
Reklas Berkurang Aset Lain-Lain Hasil Inventarisasi (Tidak Ditemukan)	7.800.752.245,13
Reklasifikasi ke aset Lain-Lain (Penjualan)	2.099.318.000,00
Extracomtable Belanja Modal	520.489.910,96
Extracomtable dari Dana BOS/JKN	289.744.200,00
Dari Dana Bos Ke Barang dan Jasa	12.171.000,00
Kriteria Persediaan	870.089.967,00
Kriteria Beban Jasa	1.360.000,00
Kriteria Pemeliharaaan	1.000.000,00
Reklasifikasi ke aset Lain-Lain masyarakat/Pihak ke 3/Instansi Vertikal	262.153.221,37
BM Barang dihibahkan ke pihak ke tiga	776.582.000,00
Koreksi Audited 2022 (Reklasifikasi ke Aset Lain Lain Rusak)	457.200.923,00
Koreksi Audited 2022 (Reklasifikasi ke Aset Lain Lain Extracomtable)	67.578.594,00
Jumlah Pengeluaran	**33.063.749.041,78**
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022	**346.136.966.264,62**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin per SKPD pada **Lampiran 17a** dan **Lampiran 17b**.

Penambahan dan pengurangan Aset Peralatan dan Mesin selain yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, juga diantaranya disebabkan adanya beberapa hal:

1. Terdapat Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan mesin senilai Rp59.902.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pengadaan Pemanas Air pada Sekretariat Daerah yang bersumber dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik senilai Rp47.952.000,00 berdasarkan Kontrak Nomor 019/SPK.PL/SetdaXI/2022.
   b. Pengadaan Wireless pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi senilai Rp3.450.000,00 berdasarkan Kontrak Nomor 405/PPK-DISDIKBUD/SPK/IV/2022 tanggal 25 April 2022.
   c. Pengadaan Projector/Infocus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik senilai Rp8.500.000,00 berdasarkan Kontrak Nomor 405/PPK-DISDIKBUD/SPK/IV/2022 tanggal 25 April 2022.
2. Berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor 353 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Takalar, Terdapat 3 PAUD Negeri dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp10.180.000,00. Rincian PAUD sebagai berikut:
   a. Pengadaan Lemari Buku 2 Pintu pada TK Negeri Dharma Wanita Mangarabombang senilai Rp4.500.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 11/BAST/TK-DW/IX/2022.
   b. Pengadaan Prosotan pada TK Negeri Dharma Wanita Mangarabombang senilai Rp2.130.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 09/BAST/TK-DW/VI/2022.

3. Pengadaan Printer pada TK Negeri Sehati senilai Rp3.550.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 09/BAST/TK-DW/VI/2022.
4. Terdapat Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin senilai Rp25.355.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 18.**
5. Terdapat Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp271.478.200,00 dengan rincian pada **Lampiran 19.**
6. Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang diakui sebagai persediaan senilai Rp870.089.967,00 dengan rincian pada **Lampiran 20.**
7. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang hibahkan ke Pihak Ketiga senilai Rp776.582.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian pada **Lampiran 21.**

Aset tetap Terdapat Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Takalar tidak seluruhnya digunakan dalam kegiatan operasional, terdapa kendaraan yang dipinjam pakai oleh instansi vertikal dengan rincian pada **Lampiran 22.**

7.5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

TA 2022	TA 2021
Rp771.416.523.925,30	**Rp713.778.904.371,69**

Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp771.416.523.925,30 dan Rp713.778.904.371,69 atau mengalami kenaikan 8,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75
Tabel Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021 (LK Audited)	713.778.904.371,69
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 1 Januari 2022	713.778.904.371,69
Penambahan:	
Belanja Modal	180.038.642.251,00
Belanja Barang dan Jasa	12.987.000,00
Mutasi Masuk	99.903.365.553,13
Utang 2023	1.706.921.400,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain Ke Aset Tetap	522.154.100,00
Reklasifikasi dari Extracomtable ke aset tetap	6.500.000,00
Reklasifikasi Bertambah dari KDP ke Aset Definitifnya	16.574.829.945,60

Uraian	Nilai
Koreksi Bertambah Atribusi Ke Induk	9.855.626.589,19
Kurang Catat	271.727.500,00
Hibah Masuk	1.066.425.000,00
Jumlah Penambahan	**309.959.179.338,92**
Pengurangan:	
Mutasi Keluar	99.903.365.553,13
Reklas Berkurang Aset Lain-Lain Hasil Inventarisasi (Rusak Berat)	7.568.518.105,60
Reklas Berkurang Aset Lain-Lain Hasil Inventarisasi (Tidak Ditemukan)	1.406.535.731,00
Reklas Berkurang Aset Lain-Lain Hasil Inventarisasi (Pembongkaran)	6.230.061.735,02
Reklasifikasi Belanja Modal Gedung ke KDP/Tanah/Peralatan/JIJ/atil	117.004.111.185,00
Kriteria Beban Jasa	463.567.700,00
Kriteria Pemeliharaaan	8.750.000,00
Realisasi Utang Tahun Sebelumnya	2.536.125.006,00
Koreksi Berkurang Atribusi Ke Induk	9.855.626.589,19
Reklasifikasi aset Lain-Lain (belum di atribusi ke induk)	951.851.361,28
Reklasifikasi ke aset Lain-Lain Milik Desa	213.650.000,00
Reklasifikasi ke aset Lain-Lain masyarakat/Pihak ke 3/Instansi Vertikal	3.454.182.805,59
Reklasifikasi Berkurang Kode Barang	474.022.583,50
BM Barang di serahkan ke masyarakat/Pihak ke 3	2.251.191.430,00
Jumlah Pengurangan	**252.321.559.785,31**
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022	**771.416.523.925,30**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan per SKPD pada **Lampiran 23a** dan **Lampiran 23b.**

Penambahan dan pengurangan Aset Gedung dan Bangunan selain yang bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan, disebabkan adanya beberapa hal antara lain:

1. Terdapat Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang di akui menambah Aset Tetap senilai Rp1.706.921.400,00 dengan rincian pada **Lampiran 24.**
2. Hibah Masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp1.066.425.000,00.
   a. Hibah Bangunan dari Kementerian Agama berupa Kantor KUA Pattalassang berlokasi Jalan Fitrah Kec. Pattalassang Kab. Takalar berdasarkan Naskah Hibah Nomor B-2316/KK.21.21/ 1/ Ks.00/11/2022-028/168/Umum tanggal 30 Nov 2022 dan Berita

Acara Serah Terima Nomor B-3417/Kk.21 .21/1/Ks.00/11/2022 tanggal 30 Nov 2022, senilai Rp207.093.000,00 dengan luas 76 M^2.

b. Hibah Bangunan dari Kementerian Agama berupa Kantor KUA Pattalassang berlokasi Jalan Fitrah Kec. Pattalassang Kab. Takalar berdasarkan Naskah Hibah Nomor B-2316/KK.21.21/ 1/ Ks.00/11/2022-028/168/Umum tanggal 30 Nov 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor B-3417/Kk.21 .21/1/Ks.00/11/2022 tanggal 30 Nov 2022, senilai Rp859.332.000,00 dengan luas 213 M^2.

3. Terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang harusnya diakui sebagai beban jasa berupa Pemindahan Balla Lompoa senilai Rp447.250.700,00 berdasarkan Kontrak Nomor 19/SP-BG/PPK-DAU/DPUPRPKP-CK/III/2022, Tanggal 23 Maret 2022, addendum Kontrak nomor 19.Add/SP-BG/PPK-DAU/DPUPRPKP-CK/VII/2022, Tanggal 20 Juli 2022, berserta dengan pengawasannya senilai Rp16.317.000,00 berdasarkan Kontrak Nomor 26/SP-BG/PPK-DAU/DPUPRPKP-CK/V/2022, Tanggal 09 Mei 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Banguanan yang diakui sebagai pelunasan kewajiban atas pekerjaan fisik tahun sebelumnya yang dibayarkan melalui rekening belanja modal tahun berjalan senilai Rp2.536.125.006,00 dengan rincian pada **Lampiran 25**.
5. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang hibahkan ke Pihak Ketiga senilai Rp2.251.191.430,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian pada **Lampiran 26.**

Terdapat permasalahan terkait aset gedung dan bangunan sebagai berikut:

a. Aset Gedung dan Bangunan yang digunakan pihak lain tanpa didukung perjanjian

   Aset bangunan kantor milik Pemerintah Kabupaten Takalar (tercatat KIB Dinas Kesehatan) senilai Rp540.000.000,00 yang digunakan oleh PT Butta Panrannuangku (Perseroda) untuk Kantor Perseroda, berdasarkan Surat Direktur Utama PT Butta Panrannuangku (Perseroda) kepada Bupati Takalar Nomor 080/PDP/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Permohonan Pemanfaatan Pinjam Pakai Aset Daerah. Namun, surat persetujuan dari Pengelola Barang atas pemanfaatan aset tersebut sebagai Kantor Perseroda tidak ditemukan.
b. Pemanfaatan dan Investasi Properti Gedung dan Bangunan sebanyak 93 Unit dengan nilai Rp86.144.096.751,79 telah memenuhi kriteria properti investasi namun belum disajikan pada akun Properti Investasi dengan rincian pada **Lampiran 27**.

c. Aset Gedung dan Bangunan yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Takalar dengan PT. Butta Panrannuangku (Perseroda) terdapat permasalahan dengan rincian sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Aset Daerah Green Topejawa Coastal (GTC) Kabupaten Takalar

Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Aset Daerah Green Topejawa Coasta (GTC) dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan PT Butta Panrannuangku (Perseroda). Jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan selama lima tahun dari tanggal 30 Desember 2021 s.d. 30 Desember 2026 dengan nilai kontrak senilai Rp40.000.000,00/tahun sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor 028/3340/UMUM dan Nomor 069/PDP/PJK/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021. Pasal 9 menyatakan bahwa pada saat berakhirnya perjanjian, Perseroda harus menyerahkan aset Pemerintah Kabupaten Takalar yang dikelola dalam kondisi baik, sedangkan aset yang timbul oleh Perseroda tetap menjadi aset milik Pihak Perseroda.

Perjanjian kerjasama tersebut telah diakhiri dengan Kesepakatan Bersama Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Nomor 500/1229/EKON dan Nomor 13A/PDP/PJK/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022, karena Perseroda belum pernah melakukan penyetoran kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Takalar. Namun, aset GTC belum dikembalikan oleh Perseroda kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.

2) Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah Kios Alun-Alun Lapangan Makkatang Dg Sibali

Perjanjian kerjasama pengelolaan kios Alun-Alun Lapangan Makkatang berdasarkan perikatan antara Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan Perusda Panrannuangku sesuai dengan perjanjian Nomor 510/114/DISKOP/V/2021 dan 014/PDP/PJK/V/2021 tentang Perjanjian Sewa Kios Alun-Alun Lapangan Makkatang Dg Sibali sejumlah tujuh kios. Perhitungan biaya sewa adalah senilai Rp750.000,00/unit per Tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar. Perjanjian berakhir pada 31 Mei 2022 dan tidak dilakukan perpanjangan.

3) Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah Gedung Islamic Centre

Perjanjian kerjasama pengelolaan Gedung Islamic Centre berdasarkan perikatan antara Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan Perusda Panrannuangku sesuai dengan

perjanjian Nomor 011/429/Umum dan 005/PDP/PJK/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Perjanjian Pengelolaan Gedung Islamic Centre. Jangka waktu perjanjian selama lima tahun dari tanggal 2 Maret 2022 s.d. 2 Maret 2027. Nilai kontribusi sebesar Rp40.000.000,00 per tahun sesuai.

7.5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	TA 2022	TA 2021
	Rp1.321.076.581.945,96	**Rp1.172.656.989.637,65**

Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp1.321.076.581.945,96 dan Rp1.172.656.989.637,65 atau mengalami kenaikan 12,66% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2021 (LK Audited)	**1.172.656.989.637,65**
Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan 1 Januari 2022	**1.172.656.989.637,65**
Penambahan:	
Belanja Modal	155.024.484.196,00
Belanja Barang dan Jasa	100.122.000,00
Mutasi Masuk	19.723.841.505,42
Utang 2023	2.891.664.850,00
Reklasifikasi Belanja Modal Gedung ke JIJ	714.645.600,00
Reklasifikasi Bertambah dari KDP ke Aset Definitifnya	9.166.451.074,08
Koreksi Bertambah Atribusi Ke Induk	79.311.208.561,42
Kurang Catat	133.937.100,00
Koreksi Bertambah Beda Golongan Aset	121.840.612,50
Beban Bunga Pinjaman yang di kapitalisasi	1.924.056.139,84
Hibah Masuk	20.497.486.001,00
Jumlah Penambahan	**289.609.737.640,26**
Pengurangan:	
Mutasi Keluar	19.723.841.505,42
Reklas Berkurang Aset Lain-Lain Hasil Inventarisasi (Rusak Berat)	783.379.616,00
Reklas Berkurang Aset Lain-Lain Hasil Inventarisasi (Tidak Ditemukan)	2.200.574.357,30
Reklasifikasi Belanja Modal JIJ ke Peralatan/Gedung/Aset Tetal Lainnya / KDP	18.691.651.129,36

Uraian	Nilai
Kriteria Beban Jasa	99.660.000,00
Realisasi Utang Tahun Sebelumnya	1.040.168.700,00
Koreksi Berkurang Atribusi Ke Induk	79.311.208.561,42
Reklasifikasi aset Lain-Lain (belum di atribusi ke induk)	11.750.000,00
Pengembalian Belanja	96.361.007,00
Reklasifikasi ke aset Lain-Lain Milik Desa	316.698.381,68
Reklasifikasi ke aset Lain-Lain masyarakat/Pihak ke 3/Instansi Vertikal	18.914.852.073,77
Jumlah Pengeluaran	**141.190.145.331,95**
Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022	**1.321.076.581.945,96**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD pada **Lampiran 28a** dan **Lampiran 28b.**

Penambahan dan pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan selain yang bersumber dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, juga diantaranya disebabkan adanya beberapa hal antara lain:

1. Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten senilai Rp100.122.000,00 yang diakui sebagai Aset Tetap yang terdiri dari
   a. Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Beton Pangkarode senilai Rp68.653.500,00 berdasarkan 04/KONTRAK/BPBD/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.
   b. Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bontomanai senilai Rp31.468.500,00 berdasarkan 03/KONTRAK/BPBD/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.
2. Terdapat Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang di akui menambah Aset Tetap senilai Rp2.891.664.850,00 dengan rincian pada **Lampiran 29.**
3. Terdapat Belanja Modal Gedung yang direklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp714.645.600,00 dengan rincian pada **Lampiran 30.**
4. Terdapat konstruksi Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibiayai dari pinjaman sehingga biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi, biaya pinjaman mencakup biaya bunga senilai Rp1.924.056.139,84 dengan rincian pada **Lampiran 31.**
5. Terdapat Hibah Masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Senilai Rp20.497.486.001,00 dengan rincian pada **Lampiran 32.**
6. Terdapat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang harusnya diakui sebagai beban jasa atas pelaksanaan Elektronik

Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (e-PAKSI) berdasarkan Kontrak Nomor 4100/SPK/PPK-SDA/DPUPRPKP/2022, tanggal 05 April 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

7. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diakui sebagai pelunasan kewajiban atas pekerjaan fisik tahun sebelumnya yang dibayarkan melalui rekening belanja modal tahun berjalan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bantinoto-Rajayya berdasarkan kontrak Nomor 03/SP-DAK/PPK/DPUPRPKP-BM/II/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 55/BASTP/DPUPRPKP-BM/VI/2021 senilai Rp1.040.168.700,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Senilai Rp96.361.007,00 yang tidak memenuhi kriteria aset tetap berupa Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Program Hibah Bantuan Pendanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA. 2021 Kabupaten Takalar, Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Takalar Nomor PHD-23/MK.7/DTK.03/RR/2021, tanggal 21 Oktober 2021.

7.5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

TA 2022	TA 2021
Rp13.662.769.973,61	**Rp13.281.591.169,36**

Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp13.662.769.973,61 dan Rp13.281.591.169,36 atau mengalami kenaikan 2,87% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2021 (LK Audited)	**13.281.591.169,36**
Saldo Aset Tetap Lainnya 1 Januari 2022	**13.281.591.169,36**
Penambahan:	
Belanja Modal	1.293.334.640,00
Mutasi Masuk	2.544.050.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tanah Ke ATL	150.000.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal Gedung ke ATL	99.600.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal JlJ ke ATL	389.998.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain Ke Aset Tetap	86.994.272,00
Kurang Catat	39.000.000,00
Jumlah Penambahan	**4.602.976.912,00**

Uraian	Nilai
Pengurangan:	
Mutasi Keluar	2.544.050.000,00
Reklas Berkurang Aset Lain-Lain Hasil Inventarisasi (Rusak Berat)	221.127.806,72
Reklas Berkurang Aset Lain-Lain Hasil Inventarisasi (Tidak Ditemukan)	250.156.761,03
Reklasifikasi Belanja Modal ATL ke Peralatan	25.355.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal ATL ke Peralatan (Dana Bos)	36.003.000,00
Extracomtable dari Dana BOS/JKN	1.054.039.815,00
Dari Dana Bos Ke Barang dan Jasa	21.116.500,00
BM Barang di serahkan ke masyarakat/Pihak ke 3	69.949.225,00
Jumlah Pengeluaran	**4.221.798.107,75**
Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2022	**13.662.769.973,61**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD pada **lampiran 33a** dan **lampiran 33b.**

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya selain yang bersumber dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, disebabkan adanya beberapa hal antara lain:

1. Terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang di Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa Penguatan Database Jalan Jembatan Kabupaten Takalar pada Dinas Pekerjan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp389.998.000,00 berdasarkan nomor kontrak Nomor 70/PK/DPUPRPKP-BM/IV/2022 dan 1107/UN4.36/HK.07.00/2022, tanggal 21 April 2022.
2. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya berupa Alat Musik yang hibahkan ke Pihak Ketiga (SMP Al Fatih Parangmata) senilai Rp69.949.225,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

		TA 2022	TA 2021
7.5.3.1.3.6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**Rp136.113.915.612,52**	**Rp28.976.874.144,18**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp136.113.915.612,52 dan Rp28.976.874.144,18 atau mengalami kenaikan 369,73% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2021 (LK Audited)	**28.976.874.144,18**
Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan1 Januari 2022	**28.976.874.144,18**
Penambahan:	
Utang 2023	22.022.400,00
Reklasifikasi Belanja Modal Gedung ke KDP	115.332.071.085,00
Reklasifikasi Belanja Modal JIJ ke KDP	18.301.653.129,36
Beban Bunga Pinjaman yang di kapitalisasi	2.161.773.998,16
Jumlah Penambahan	**135.817.520.612,52**
Pengurangan:	
Reklasifikasi KDP ke Aset Definitifnya	25.741.281.019,68
Reklasifikasi ke aset Lain-Lain (KDP)	2.939.198.124,50
Jumlah Pengeluaran	**28.680.479.144,18**
Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2022	**136.113.915.612,52**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 34a dan Lampiran 34b.**

Terdapat beberapa mutasi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang perlu diungkapkan antara lain:

1. Kenaikan 369,73% Konstruksi Dalam Pengerjaan disebabkan beberapa pekerjaan konstruksi yang belum selesai per 31 Desember 2022 antara lain:
   a. Pekerjaan Rumah Sakit Galesong Gedung IA, IC, IIC oleh PT. Gunakarya Bumi Perkasa KSO berdasarkan kontrak Nomor 503/PPK-DK22/SP/IV/2022 tanggal 06 April 2022 dengan nilai kontrak Rp91.907.780.000,00 dengan realisasi senilai Rp90.069.624.400,00 pada Dinas Kesehatan.
   b. Pekerjaan Rumah Sakit Galesong Tahap Selanjutnya gedung 1E oleh PT. Alqybar Resky Mandiri berdasarkan kontrak Nomor 1487/PPK-DK/SP/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan nilai kontrak Rp16.315.125.000,00 dan realisasi senilai Rp15.401.478.000,00 pada Dinas Kesehatan.
2. Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp25.741.281.019,67 telah diserahterimakan

sehingga Konstruksi Dalam Pengerjaan direklasifikasi ke Aset Definitifnya dengan rincian pada **Lampiran 34c.**

7.5.3.1.3.7 **Akumulasi Penyusutan**	**TA 2022**	**TA 2021**
	(Rp1.429.125.682.379,04)	**(Rp1.319.173.660.930,79)**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp1.429.125.682.379,04 dan Rp1.319.173.660.930,79 merupakan perhitungan dari nilai akumulasi penyusutan dengan Metode Garis Lurus untuk masing-masing aset kecuali tanah. Terdapat mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 79
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021 (LK Audited)	**- 1.319.173.660.930,79**
Koreksi Bertambah Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-36.889.058.100,75
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 1 Januari 2022	**- 1.356.062.719.031,54**
Penambahan:	
Beban Penyusutan	-151.702.680.756,20
Reklasifkasi dari Extracomtable Ke Aset Tetap	-4.062.500,00
Reklasifkasi dari Aset Lain-Lain Ke Aset Tetap	-2.501.660.498,83
Hibah Masuk	-3.203.542.014,03
Reklasifkasi Dari KDP	-102.920.986,90
Reklasifikasi Bertambah Kode Barang	-342.428.287,34
Mutasi Masuk	-34.429.009.665,60
Koreksi Audited Akumulasi Penyusutan	-1.190.300.794,52
Koreksi Audited Beban Penyusutan	-592.879.990,18
Jumlah Penambahan	**- 194.069.485.493,60**
Pengurangan:	
Koreksi Berkurang Atribusi ke Induk	-43.678.785.591,51
Mutasi Keluar	-34.429.009.665,60
Reklasifikasi ke aset lainnya Hasil Inventarisasi (Rusak Berat)	-15.214.735.043,00
Reklasifikasi ke aset lainnya Hasil Inventarisasi (Tidak Ditemukan)	-8.759.032.705,87
Reklasifikasi ke aset lainnya Hasil Inventarisasi (Pembongkaran)	- 2.014.172.073,80
Reklasifikasi ke aset Lain-Lain Milik Masyarakat/Pihak Ketiga/Instansi Vertikal	-12.161.259.112,05

Uraian	Nilai
Reklasifikasi ke aset lainnya (Pinjam Pakai)	-1.788.507.550,00
Reklasifikasi ke aset Lain-Lain (Milik Desa)	-350.882.381,68
Reklasifikasi aset Lain-Lain (belum di atribusi ke induk)	-123.826.448,01
Reklasifikasi Berkurang Kode Barang	-386.993.574,58
Reklasifikasi ke aset Lain-Lain (Penjualan)	-2.099.318.000,00
Jumlah Pengeluaran	**- 121.006.522.146,10**
Saldo Akhir Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022	**- 1.429.125.682.379,04**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan per SKPD pada **Lampiran 37.**

7.5.3.1.4. Dana Cadangan

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Takalar tidak membentuk Dana Cadangan pada TA 2022 dan 2021.

7.5.3.1.5. Aset Lainnya

TA 2022	TA 2021
Rp77.055.402.083,80	**Rp51.106.042.258,87**

Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp77.055.402.083,80 dan Rp51.106.042.258,87 terdiri dari:

Tabel 80
Rincian Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Penyisihan	Nilai setelah penyisihan
1	Tagihan Penjualan Angsuran	70.126.000,00	70.126.000,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	2.329.391.660,63	1.253.404.673,77	1.075.986.986,86
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
4	Aset tidak Berwujud	4.678.626.435,76	4.521.201.685,76	157.424.750,00
5	Aset Lain-Lain	188.559.831.217,64	113.746.819.944,70	74.813.011.272,94
6	Ketekoran Kas	0,00	0,00	0,00
7	Kas yang dibatasi Penggunaannya	1.008.979.074,00	0,00	1.008.979.074,00
Jumlah Total		**196.646.954.388,03**	**119.591.552.304,23**	**77.055.402.083,80**

7.5.3.1.5.1. Tagihan Penjualan Angsuran	TA 2022	TA 2021
	Rp 0,00	**Rp0,00**

Tagihan Penjualan Angsuran pada Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00, merupakan reklasifikasi dari Bagian Lancar Piutang Penjualan Angsuran senilai Rp72.646.000,00 dan pengurangan penyetoran Tahun 2019 yang belum tercatat senilai Rp2.520.00,00, sehingga sisa piutang angsuran senilai Rp70.126.000,00. Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran senilai Rp70.126.000,00 sehingga diperoleh nilai netto senilai Rp0,00 dan 2021 Rp0,00 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 81
Mutasi Tagihan Penjualan Angsuran

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	0,00
Reklas dari aset lancar Tagihan Penjualan Angsuran	72.646.000,00
Koreksi berkurang saldo awal karena penyetoran tahun 2019	-2.520.000,00
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran	70.126.000,00
Penyisihan	-70.126.000,00
Saldo setelah Penyisihan	0,00

Daftar rincian piutang dan penyisihan tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 38.**

7.5.3.1.5.2. Tuntutan Ganti Rugi	TA 2022	TA 2021
	Rp1.075.986.986,86	**Rp965.309.034,00**

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp1.075.986.986,86 dan Rp965.309.034,00. Rekapitulasi saldo Tuntutan Ganti Rugi sebagai berikut:

Tabel 82
Mutasi Tuntutan Ganti Rugi

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo awal TGR	**965.309.034,00**
Penambahan	
Reklas dari aset lancar	1.318.803.184,59
Koreksi Tambah SKTJM 2022	187.537.229,93
Jumlah Penambahan	**1.506.340.414,52**
Pengurangan	
Pembayaran	142.257.787,89

Uraian	Nilai
Saldo TGR	**2.329.391.660,63**
Penyisihan	-1.253.404.673,77
Saldo TGR setelah penyisihan	**1.075.986.986,86**

Tuntutan Ganti Rugi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebanyak 59 kasus serta memiliki SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) dengan jumlah senilai Rp1.318.803.184,59 terdiri dari 40 kasus tahun 2013 senilai Rp108.907.305.59,17 kasus tahun 2014 senilai Rp1.187.060.569,00 dan 2 kasus tahun 2017 senilai Rp22.835.310,00.

Atas Tuntutan Ganti Rugi tersebut telah dilaporkan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan pada BPK RI senilai Rp188.777.409,00 dengan surat Bupati Takalar No.900/150/Keu tanggal 29 Januari 2022 dan surat Kaditama Binbangkum BPK RI No.42/S/XIII/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Jawaban Perkembangan atas Permohonan Penyelesaian Kekurangan Kas antara lain dinyatakan bahwa masih diperlukan beberapa dokumen Tuntutan Perbendaharaan atas nama Sdr. Abd. Malik..

Daftar rincian Tuntutan Ganti Rugian (TGR) per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 39.**

7.5.3.1.5.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing senilai Rp0,00

7.5.3.1.5.4. Aset Tak Berwujud

TA 2022	TA 2021
Rp157.424.750,00	**Rp4.678.626.435,76**

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp157.424.750,00 dan Rp4.678.626.435,76. Nilai netto Aset Tak Berwujud senilai Rp157.424.750,00 (Rp4.678.626.435,76-Rp4.521.201.685,76). Rincian Aset Tak Berwujud pada tabel berikut:

Tabel 83
Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2021 (LK Audited)	**4.678.626.435,76**
Saldo Aset Tidak Berwujud 1 Januari 2022	**4.678.626.435,76**
Penambahan:	
Jumlah Penambahan	

Uraian	Nilai
Pengurangan:	
Jumlah Pengeluaran	
Saldo Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2022 (Bruto)	4,678,626,435.76
Amortisasi	-4.521.201.685,76
Saldo Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2022 (Netto)	**157.424.750,00**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tidak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 40.**

7.5.3.1.5.5. Aset Lain-Lain

TA 2022	TA 2021
Rp74.813.011.272,94	**Rp152.096.305.063,21**

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp74.813.011.272,94 dan Rp152.096.305.063,21. Rincian mutasi pada tabel berikut:

Tabel 84
Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Lain-Lain 31 Desember 2021 (LK Audited)	**152.096.305.063,21**
Koreksi Saldo Awal Aset Lain-Lain	-
Saldo Awal Aset Lain-Lain 1 Januari 2022	**152.096.305.063,21**
Penambahan:	
Mutasi Masuk	4.133.150.394,08
Reklasifikasi dari Aset Tetap Hasil Inventarisasi (Rusak Berat)	21.866.184.138,90
Reklasifikasi dari Aset Tetap Hasil Inventarisasi (Tidak Ditemukan)	11.658.019.094,46
Reklas Aset Lain Lain Hasil Inventarisasi (Dibongkar)	6.230.061.735,02
Reklas Aset Lain Lain Hasil Inventarisasi (Penjualan)	2.099.318.000,00
Reklasifikasi ke aset lain lain Milik Masyarakat/Pihak Ketiga/Instansi Vertikal	22.669.448.100,73
Reklasifikasi ke aset lain lain Milik Desa	2.001.642.381,68
Reklasifikasi ke aset lain lain (KDP)	2.939.198.124,50
Reklasifikasi aset lain lain (belum di atribusi ke induk)	1.755.962.720,14
Koreksi Audited 2022	457.200.923,00
Jumlah Penambahan	**75.810.185.612,51**
Pengurangan:	
Reklas Ke aset Tetap	3.047.126.977,71
Mutasi Keluar	4.133.150.394,08
Penghapusan	32.166.382.086,29
Jumlah Pengeluaran	**39.346.659.458,08**

Uraian	Nilai
Saldo Akhir Aset Lain-Lain 31 Desember 2022 (Bruto)	**188.559.831.217,64**
Penyisihan Aset Lain-Lain	**113.746.819.944,70**
Saldo Akhir Aset Lain-Lain 31 Desember 2022 (Netto)	**74.813.011.272,94**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 41.**

Terdapat beberapa mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain yang perlu di informasikan agar pengungkapan lebih informatif, antara lain:

1. Terdapat Penghapusan senilai Rp32.166.382.086,29 dengan rincian pada **Lampiran 42.**
2. Terdapat Penjualan Barang Milik Daerah pada Tahun 2022 senilai Rp734.815.249,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 85
Penjualan Barang Milik Daerah

(Dalam Rupiah)

NO.	Mekanisme Penjualan	Nomor Risalah Lelang	Unit /Paket	Total Harga
1	Penjualan melalui Lelang KPKNL	185/72/2022	4	44.246.856,00
		182/72/2022	9	268.868.295,00
		186/72/2022	16	219.577.498,00
		183/72/2022	1	119.995.000,00
2	Penjualan Tanpa Melalui Lelang KPKNL	Kendaraan Pejabat Negara	2	82.127.600,00
TOTAL			**32**	**734.815.249,00**

3. Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain berdasarkan kriterianya dapat diliat pada rincian **Lampiran 43.**

7.5.3.1.5.6. Ketekoran Kas Bendahara Pengeluaran

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Ketekoran Kas Bendahara Pengeluaran pada Bapelitbang TA 2018 direklasifikasi dari Aset Lain-Lain – Ketekoran Kas Bendahara Pengeluaran ke Aset Lainnya - Tuntutan Ganti Rugi sementara dalam proses Tuntutan Perbendaharaan.

7.5.3.1.5.7. Kas yang dibatasi Penggunaannya

TA 2022	TA 2021
Rp1.008.979.074,00	**Rp944.381.880.00**

Saldo Kas yang dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp1.008.979.074,00 dan Rp944.381.880.00.

Kas yang dibatasi Penggunaanya adalah saldo rekening pengelola Dana Bergulir, KUPERTA, KUKESRATA dan PEP2T yang ada di Bank. Kas ini

merupakan pengembalian dana investasi yang belum ditentukan dasar penggunaannya senilai Rp1.008.979.074,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86
Kas yang dibatasi penggunaannya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Dinas PPKBPPPA	612.238.795,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	94.557.109,00
3	Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan	103.787.090,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	198.396.080,00
Jumlah		**1.008.979.074,00**

Rincian mutasi Kas yang dibatasi penggunaannya dapat dilihat pada **Lampiran 44.**

7.5.3.2 KEWAJIBAN

TA 2022	TA 2021
Rp265.649.175.887,76	**Rp19.613.768.774,12**

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumberdaya ekonomi di masa akan datang. Kewajiban terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah senilai Rp265.649.175.887,76 dan Rp19.613.768.774,12 yang terdiri dari:

Tabel 87
Rincian Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Kewajiban Jangka Pendek	23.701.678.246,76	19.613.768.774,12
2	Kewajiban Jangka Panjang	241.947.497.641,00	0,00
	Total	**265.649.175.887,76**	**19.613.768.774,12**

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

TA 2022	TA 2021
Rp23.701.678.246,76	**Rp19.613.768.774,12**

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang akan diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 senilai Rp23.701.678.246,76 terdiri atas:

Tabel 88
Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Akun	2022	2021
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	88.727.226,03	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	81.829.945,32	24.099.070,66
3	Utang Belanja	23.531.121.075,41	19.589.669.703,46
	Jumlah	**23.701.678.246,76**	**19.613.768.774,12**

7.5.3.2.1.1.Utang Perhitungan Fihak Ketiga

TA 2022	TA 2021
Rp 88.727.226,03	**Rp0,00**

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp88.727.226,03 dan Rp0,00, yang terdiri dari Pajak yang belum disetor sampai dengan akhir tahun anggaran yang berasal dari Dana Bos dan dana BLUD. Rincian pada **Lampiran 45a dan Lampiran 45b.**

7.5.3.2.1.2.Utang Bunga

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

7.5.3.2.1.3.Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

7.5.3.2.1.4.Pendapatan Diterima Dimuka

TA 2022	TA 2021
Rp81.829.945,32	**Rp24.099.070,66**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 senilai Rp81.829.945,32 merupakan pendapatan diterima dimuka dari Pajak Reklame senilai Rp9.027.028,65 dan sewa sebagian tanah untuk ATM Bank Sulselbar senilai Rp72.802.916,67.
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada **Lampiran 46a** dan **Lampiran 46b.**

7.5.3.2.1.5.Utang Belanja

TA 2022	TA 2021
Rp23.531.121.075,41	**Rp19.589.669.703,46**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp23.531.121.075,41 dan Rp19.589.669.703,46. Utang Belanja merupakan utang atas kegiatan yang telah selesai pekerjaannya namun belum diselesaikan pembayarannya. Rekapitulasi Utang Belanja pada **Lampiran 47.**

7.5.3.2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 senilai Rp0,00**.**

7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	TA 2021	TA 2020
	Rp241.947.497.641,00	**Rp0,00**

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai Rp241.947.497.641,00.

7.5.3.2.2.1. Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 senilai Rp0,00**.**

7.5.3.2.2.2. Utang Dalam Negeri - Obligasi	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Utang Dalam Negeri - Obligasi per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 senilai Rp0,00**.**

7.5.3.2.2.3. Premium (Diskonto) Obligasi	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Premium (Diskonto) Obligasi per 31 Desember TA 2022 dan 2021 senilai Rp0,00**.**

7.5.3.2.2.4. Utang Jangka Panjang Lainnya	TA 2022	TA 2021
	Rp241.947.497.641,00	**Rp0,00**

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember TA 2022 senilai Rp241.947.497.641,00**.** Utang jangka Panjang tersebut adalah pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan PT. SMI sesuai perjanjian Nomor PERJ-211/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021. Jumlah Pokok dan Bunga dari Pinjaman tersebut belum sepenuhnya bisa dilakukan karena pekerjaan dan pembayaran belum seluruhnya selesai pada tahun 2022.

7.5.3.3 EKUITAS	TA 2022	TA 2021
	Rp1.537.779.518.232,79	**Rp1.496.474.389.188,43**

Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp1.537.779.518.232,79 dan Rp1.496.474.389.188,43. Penjelasan akun Neraca posisi keuangan per 31 Desember 2022 terdiri dari Aset senilai

Rp1.803.428.694.120,55, Kewajiban senilai Rp265.649.175.887,76 dan Ekuitas senilai Rp1.537.779.518.232,79.

7.5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari realisasi pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Laporan Operasional (LO) Kabupaten Takalar TA 2022 merupakan rekapitulasi dari Laporan Operasional SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.

7.5.4.1 Pendapatan-LO

TA 2022	TA 2021
Rp1.097.054.890.398,74	**Rp1.025.537.179.876,91**

Pendapatan LO per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp1.097.054.890.398,74 dan Rp1.025.537.179.876,91, mengalami kenaikan senilai Rp70.647.140.648,26 atau 6,88%, merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Takalar dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi sebagai berikut.

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

TA 2022	TA 2021
Rp146.867.443.067,74	**Rp119.307.737.486,91**

Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Takalar per 31 Desember 2022 dan 2021 Rp146.867.443.067,74 dan Rp119.307.737.486,91, mengalami kenaikan senilai Rp27.559.705.580,83 atau 23,10%.

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

TA 2022	TA 2021
Rp23.722.627.822,01	**Rp25.268.615.295,92**

Pendapatan Pajak Daerah–LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Takalar dari Wajib Pajak dalam TA 2022. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2022 sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah senilai ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2022. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada Pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp23.722.627.822,01 Capaian realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.545.987.473,91 atau 6,12% dari realisasi TA

2021 senilai Rp25.268.615.295,92. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO pada tabel berikut:

Tabel 89
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	2022	2021
1	Pajak Hotel	80.256.200,00	51.345.600,00
2	Pajak Restoran	788.489.401,00	374.991.326,00
3	Pajak Hiburan	111.610.333,00	72.220.388,00
4	Pajak Reklame	264.572.315,01	269.012.910,42
5	Pajak Penerangan Jalan	11.976.293.998,00	9.732.071.073,00
6	Pajak Air Tanah	549.406.700,00	411.424.800,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	90.249.250,00	4.294.171.250,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.923.466.740,00	4.683.879.655,00
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.938.282.885,00	5.379.498.293,50
	Total	**23.722.627.822,01**	**25.268.615.295,92**

7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

TA 2022	TA 2021
Rp3.062.917.644,00	**Rp2.445.497.570,00**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Penerimaan Asli Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Takalar dari Wajib Retribusi dalam TA 2022. Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada TA 2022 terealisasi senilai Rp3.062.917.644,00. Capaian realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp617.420.074,00 atau 25,25% dari realisasi TA 2021 senilai Rp2.445.497.570,00. Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada tabel berikut:

Tabel 90
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Retribusi	2022	2021
1	**Retribusi Jasa Umum**		
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	565.918.419,00	107.487.670,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	67.230.000,00	93.380.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	49.400.000,00	42.300.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	650.511.000,00	279.600.000,00
	Pengujian Kendaraan Bermotor	42.015.000,00	0,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	18.010.000,00	21.380.000,00
2	**Retribusi Jasa Usaha**		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	242.550.000,00	306.800.000,00

No	Retribusi	2022	2021
	Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan	385.000.000,00	729.442.000,00
	Retribusi Tempat Pelelangan	48.000.000,00	86.900.000,00
	Retribusi Terminal	14.760.000,00	22.150.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	38.000.000,00	63.327.000,00
	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan	10.500.000,00	14.550.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	32.000.000,00	30.200.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	2.100.000,00	900.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.100.000,00	9.612.000,00
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**		
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	637.398.900,00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	70.000,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	886.823.225,00	0,00
Total		**3.062.917.644,00**	**2.445.497.570,00**

7.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

TA 2022	TA 2021
Rp39.758.583.043,16	**Rp8.238.598.134,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO merupakan bagian laba yang dibagikan ke Pemda (Dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD senilai Rp39.758.583.043,16. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp31.519.984.909,16 atau 382,59% dari realisasi TA 2021 senilai Rp8.238.598.134,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 91
Realisasi Penerimaan Deviden Pada Kas Daerah Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Perubahan Investasi	Penerimaan Deviden ke Kasda	Jumlah
1	Bank Sulselbar	29.290.000.000,00	9.729.677.159,00	39.019.677.159,00
2	BPR GMD Galesong	276.655.674,97	448.464.680,00	725.120.354,97
3	BPR Surya Sejati Pattalassang	13.785.529,19	0,00	13.785.529,19
4	PAM Tirta Panrannuangku	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**29.580.441.204,16**	**10.178.141.839,00**	**39.758.583.043,16**

Perbandingan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 92
Realisasi Pendapatan hasil Pengelolaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Bank Sulselbar	39.019.677.159,00	7.929.539.197,00
2	BPR GMD Galesong	725.120.354,97	309.058.937,00
3	BPR Surya Sejati Pattalassang	13.785.529,19	0,00
4	PAM Tirta Panrannuangku	0,00	0,00
Jumlah		**39.758.583.043,16**	**8.238.598.134,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA senilai Rp29.580.441.204,16 merupakan penambahan pengakuan nilai investasi sesuai hasil RUPS tahun 2021 dari PT Bank sulselbar senilai Rp29.290.000.000,00, penambahan dari laba usaha PT. GMD Galesong senilai Rp276.655.674,97 dan penambahan laba usaha BPR Surya Sejati Palleko senilai Rp13.785.529,19.

7.5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah-LO

TA 2022	TA 2021
Rp80.323.314.558,57	**Rp83.355.026.486,99**

Lain-Lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LO TA 2022 senilai Rp80.323.314.558,57. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.031.711.928,42 atau 3,64% dari realisasi TA 2021 senilai Rp83.355.026.486,99 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 93
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	856.344.249,00	100.063.390,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yg tidak dipisahkan	32.080.083,33	25.000.000,00
3	Penerimaan Jasa Giro	4.792.776.429,54	4.807.271.504,50
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.290.630.779,54	2.217.918.626,49
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	287.184.501,88	0,00
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	28.575.000,00	0,00

No	Uraian	2022	2021
7	Pendapatan dari Pengembalian	328.065.478,00	469.857.727,00
8	Pendapatan BLUD	55.062.916.394,40	58.998.422.304,00
9	Dana JKN pada FKRTL	16.627.258.670,00	16.688.587.467,00
10	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	17.482.972,88	47.905.468,00
	Jumlah	**80.323.314.558,57**	**83.355.026.486,99**

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA senilai Rp1.398.711.710,21 merupakan Penambahan Piutang Pendapatan BLUD senilai Rp1.184.330.125,00 penambahan piutang pendapatan denda PBB senilai Rp287.184.501,88 dan Realisasi pendapatan sewa BMD oleh bank sulsel diterima di muka senilai Rp(72.802.916,67)

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

TA 2022	TA 2021
Rp897.364.688.445,00	**Rp857.741.286.079,00**

Pendapatan Transfer-LO Kabupaten Takalar untuk periode 1 Januari 2022 s.d. tanggal 31 Desember 2022.

7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat –LO

TA 2022	TA 2021
Rp814.138.232.313,00	**Rp788.475.093.430,00**

Transfer Pemerintah Pusat-LO Dana Perimbangan merupakan penerimaan pendapatan Bagi Hasil Pajak, Sumber Daya Alam, DAU dan DAK dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Takalar dalam TA 2022 senilai Rp814.138.232.313,00 meliputi:

1. Dana Bagi Hasil - LO

TA 2022	TA 2021
Rp28.426.389.912,00	**Rp25.175.525.396,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil-LO terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 senilai Rp28.426.389.912,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.250.864.516,00 atau 12,91% dari realisasi TA 2021 senilai Rp25.175.525.396,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94
Realisasi Dana Bagi Hasil-LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Bagi Hasil Pajak	15.660.380.350,00	17.475.180.893,00
2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	12.766.009.562,00	7.700.344.503,00
	Jumlah	**28.426.389.912,00**	**25.175.525.396,00**

1) Bagi Hasil Pajak - LO	TA 2022	TA 2021
	Rp15.660.380.350,00	**Rp17.475.180.893,00**

Bagi hasil Pajak-LO terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp15.660.380.350,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.814.800.543,00 atau 10,39% dari realisasi TA 2021 yang mencapai nilai Rp17.475.180.893,00.

2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	TA 2022	TA 2020
	Rp12.766.009.562,00	**Rp7.700.344.503,00**

Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan Dana Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan Royalti, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pertambangan Minyak Bumi pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp12.766.009.562,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp5.065.665.059,00 atau 65,78% dari realisasi TA 2021 yang mencapai nilai Rp7.700.344.503,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95
Realisasi Bagi Hasil SDA –LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	54.167.470,00	37.375.604,00
2	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	9.825.558.308,00	4.792.670.181,00
3	Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.958.311.000,00	1.674.500.150,00
4	Pertambangan Minyak Bumi	729.794.287,00	1.195.798.568,00
5	Pertambangan Gas Bumi	0,00	0,00
6	Pertambangan Umum	0,00	0,00
7	Cukai hasil tembakau	198.178.497,00	0,00
	Jumlah	**12.766.009.562,00**	**7.700.344.503,00**

2. DAU - LO	TA 2022	TA 2021
	Rp564.065.751.328,00	**Rp564.934.568.000,00**

Dana Alokasi Umum-LO merupakan dana dari Pemerintah Pusat untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022 terealisasi senilai Rp564.065.751.328,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp868.816.672,00 atau 0,15% dari realisasi TA 2021 senilai Rp564.934.568.000,00.

DAU-LO lebih besar dibandingkan dengan DAU-LRA senilai Rp4.085.830.138,00 merupakan pemotongan langsung pagu DAU Kabupaten Takalar untuk pembayaran bunga pinjaman PEN.

3. DAK Fisik - LO

TA 2022	TA 2021
Rp118.673.244.604,00	**Rp76.846.239.056,00**

Dana Alokasi Khusus Fisik-LO merupakan dana dari Pemerintah Pusat untuk mendanai Kegiatan Tahun 2022 senilai Rp118.673.244.604,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp41.827.005.548,00 atau 54,43% dari realisasi TA 2021.

4. DAK Non Fisik - LO

TA 2022	TA 2021
Rp102.972.846.469,00	**Rp121.518.760.978,00**

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO merupakan dana dari Pemerintah Pusat untuk mendanai Kegiatan Tahun 2022 terealisasi senilai Rp102.972.846.469,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp18.545.914.509,00 atau 15,26% dari realisasi TA 2021.

7.5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO merupakan dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00.

7.5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

TA 2022	TA 2021
Rp83.226.456.132,00	**Rp69.266.192.649,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten Takalar meliputi:

1. Pendapatan Bagi Hasil - LO

TA 2022	TA 2021
Rp59.175.353.132,00	**Rp40.527.088.689,00**

Pendapatan Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, pada Tahun 2022 senilai Rp59.175.353.132,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp18.648.264.443,00 atau 46,01% dari realisasi TA 2021 yang mencapai nilai Rp40.527.088.689,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 96
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pajak Kendaraan Bermotor	11.587.016.053,00	8.489.001.821,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.354.378.447,00	7.031.720.208,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.336.520.284,00	11.741.098.164,00
4	Pajak Air Permukaan	395.847.349,00	64.421.278,00
5	Pajak Rokok	18.501.590.999,00	13.200.847.218,00
	Jumlah	**59.175.353.132,00**	**40.527.088.689,00**

Pendapatan Bagi Hasil-LO lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasi-LRA senilai Rp 2.189.537.723,00 merupakan selisih alokasi bagi hasil Tahun 2022 yang belum diterima senilai Rp22.133.103.639,00 dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil-LRA sebagai pembayaran piutang transfer senilai Rp19.943.565.916,00

2. Bantuan Keuangan LO

TA 2022	TA 2021
Rp24.051.103.000,00	**Rp28.739.103.960,00**

Bantuan Keuangan-LO merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2022 senilai Rp24.051.103.000,00, mengalami penurunan senilai Rp4.688.000.960,00 atau 16,31% dari TA 2021 senilai Rp28.739.103.960,00.

7.5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

TA 2022	TA 2021
Rp52.822.758.886,00	**Rp48.488.156.311,00**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO senilai Rp52.822.758.886,00 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Takalar meliputi:

Tabel 97
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Hibah	10.575.120.526,00	6.009.790.069,00
2	Pendapatan Lainnya	42.247.638.360,00	42.478.366.242,00
	Jumlah	**52.822.758.886,00**	**48.488.156.311,00**

7.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah- LO

TA 2022	TA 2021
Rp10.575.120.526,00	**Rp6.009.790.069,00**

Pendapatan Hibah-LO merupakan transfer hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Takalar yang meliputi:

Tabel 98
Realisasi Pendapatan Hibah-LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.554.722.547,00	278.780.849,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya	4.020.397.979,00	5.731.009.220,00
	Jumlah	**10.575.120.526,00**	**6.009.790.069,00**

7.5.4.1.3.2 Pendapatan Dana Darurat - LO

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Pendapatan Dana Darurat-LO Kabupaten Takalar pada Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00.

7.5.4.1.3.3 Pendapatan Lainnya- LO

TA 2022	TA 2021
Rp42.247.638.360,00	**Rp42.478.366.242,00**

Pendapatan Lainnya-LO merupakan pendapatan yang diterima dari Dana BOS dan Lain-Lain Pendapatan pada Tahun 2022 senilai Rp42.247.638.360,00 yang mengalami penurunan senilai Rp230.727.882,00 atau 0,54% dari Tahun 2021 yang diterima senilai Rp42.478.366.242,00.

7.5.4.2 Beban-LO

TA 2022	TA 2021
Rp1.078.566.914.178,93	**Rp1.065.346.460.480,45**

Jumlah Beban-LO untuk periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 senilai Rp1.078.566.914.178,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99
Realisasi Beban-LO TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Beban	2022	2021
1	Beban Operasi	861.657.531.690,61	857.468.544.797,60
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	152.487.290.605,32	145.096.122.941,85
3	Beban Transfer	61.906.255.900,00	62.658.139.832,00
4	Beban Tak Terduga	2.515.835.983,00	123.652.909,00
	Jumlah	**1.078.566.914.178,93**	**1.065.346.460.480,45**

7.5.4.2.1 Beban Operasi

TA 2022	TA 2021
Rp861.657.528.981,61	**Rp857.468.544.797,60**

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Rincian beban operasi dalam tabel berikut:

Tabel 100
Realisasi Beban Operasi TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Pegawai	522.448.266.192,00	550.548.355.086,00
2	Beban Persediaan	86.969.298.935,96	88.816.319.645,06
3	Beban Jasa	153.032.206.716,59	139.933.629.005,51
4	Beban Pemeliharaan	11.659.936.106,00	11.274.618.299,00
5	Beban Perjalanan Dinas	60.120.662.841,00	55.328.621.628,00
6	Beban Bunga	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00
8	Beban Hibah	18.728.380.305,00	4.758.932.000,00
9	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
10	Beban Penyisihan Piutang	893.500.349,10	808.106.294,08
11	Beban Lain-Lain	7.805.280.244,96	5.999.962.839,95
	Jumlah	**861.657.531.690,61**	**857.468.544.797,60**

7.5.4.2.1.1 Beban Pegawai

TA 2022	TA 2021
Rp522.448.266.192,00	**Rp550.548.355.086,00**

Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai Beban Pegawai-LO senilai belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan Utang Belanja Pegawai yang terjadi pada Tahun 2022.

Beban Pegawai merupakan saldo beban periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 senilai Rp522.448.266.192,00**.** Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp28.100.088.894,00 atau 5,10% dari realisasi TA 2021 yang mencapai nilai Rp550.548.355.086,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 101
Realisasi Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Gaji dan Tunjangan	324.862.220.231,00	332.780.087.865,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	48.033.814.704,00	57.007.001.917,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110.028.340.451,00	105.521.228.412,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	10.554.909.043,00	10.721.066.300,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.399.980,00	162.703.780,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	708.800.000,00	587.900.000,00
7	Beban Pegawai BOS	00.00	16.384.810.778,00
8	Beban Pegawai BLUD	28.097.781.783,00	27.383.556.034,00
	Jumlah	**522.448.266.192,00**	**550.548.355.086,00**

Beban Pegawai lebih rendah dari pada Belanja Pegawai di LRA senilai Rp1.180.977.077,00, selisih merupakan realisasi Belanja Pegawai untuk pembayaran Utang Belanja Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah.

7.5.4.2.1.2 Beban Persediaan

TA 2022	TA 2021
Rp86.969.298.935,96	**Rp88.816.319.645,06**

Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Takalar TA. 2022 senilai Rp86.969.298.935,96. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.847.020.709,10 atau 2,08% dari realisasi TA 2021 yang mencapai nilai Rp88.816.319.645,06 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 102
Realisasi Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Barang Pakai Habis	86.849.508.935,96	83.904.587.045,06
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	119.790.000,00	6.740.000,00
3	Beban Barang Bekas Dipakai	0	120.992.600,00
4	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0	4.784.000.000,00
	Jumlah	**86.969.298.935,96**	**88.816.319.645,06**

7.5.4.2.1.3 Beban Jasa

TA 2022	TA 2021
Rp153.032.206.716,59	**Rp139.933.629.005,51**

Beban Jasa merupakan saldo beban periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp153.032.206.716,59. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp13.098.577.711,08 atau 9,36% dari realisasi TA 2021 yang mencapai nilai Rp139.933.629.005,51.

Tabel 103
Realisasi Beban Jasa TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Jasa Kantor	48.440.182.019,42	56.482.687.388,43
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	35.420.973.678,00	34.935.646.988,00
3	Beban Sewa Tanah	159.600.000,00	213.400.000,00
4	Beban Sewa Peralatan Mesin	1.322.918.824,00	944.871.278,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	179.475.000,00	1.392.483.470,00
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	418.242.500,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	700.000,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.835.493.585,00	5.047.616.922,98
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	286.537.636,00
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	6.060.561.600,00
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.440.674,17	0,00
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	666.863.450,00	369.113.050,00
13	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.258.737.000,00	9.259.950.700,00
14	Beban Barang dan Jasa BOS	39.301.694.795,00	19.573.455.603,00
15	Beban Barang dan Jasa BLUD	8.444.127.691,00	4.949.061.869,10
	Jumlah	**153.032.206.716,59**	**139.933.629.005,51**

7.5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

TA 2022	TA 2021
Rp11.659.936.106,00	**Rp11.274.618.299,00**

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2022 senilai Rp11.659.936.106,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp385.317.807,00 atau 3,42% dari realisasi TA 2021 yang mencapai nilai Rp11.274.618.299,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 104
Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Pemeliharaan Peralatan Mesin	2.377.011.884,00	3.828.906.418,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	7.901.770.568,00	5.382.063.346,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan,irigasi dan jaringan	1.381.153.654,00	2.063.648.535,00
	Jumlah	**11.659.936.106,00**	**11.274.618.299,00**

7.5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

TA 2022	TA 2021
Rp60.120.662.841,00	**Rp55.328.621.628,00**

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2022 senilai Rp60.120.662.841,00 yang terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah senilai Rp59.911.162.841,00 dan perjalanan dinas luar negeri senilai Rp209.500.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.792.041.213,00 atau 8,66% dari realisasi TA 2021 senilai Rp55.328.621.628,00.

7.5.4.2.1.6 Beban Bunga

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Beban Bunga Kabupaten Takalar Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00.

7.5.4.2.1.7 Beban Subsidi

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Beban Subsidi Kabupaten Takalar Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00.

7.5.4.2.1.8 Beban Hibah

TA 2021	TA 2020
Rp18.728.380.305,00	**Rp4.758.932.000,00**

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2022 senilai Rp18.728.380.305,00, yang mengalami kenaikan senilai Rp13.969.448.305,00 atau 293,54% dari realisasi tahun sebelumnya senilai Rp4.758.932.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105
Realisasi Beban Hibah TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.587.131.000,00	713.742.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.204.259.305,00	3.108.200.000,00

3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	936.990.000,00	936.990.000,00
	Jumlah	**18.728.380.305,00**	**4.758.932.000,00**

Beban Hibah lebih besar Rp3.137.162.655,00 dibandingkan Belanja Hibah karena terdapat Beban Hibah berasal dari utang belanja Rp39.440.000,00 dan Beban Hibah berasal dari realisasi Belanja Modal Rp3.097.722.655,00.

7.5.4.2.1.9 Beban Bantuan Sosial

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Beban Bantuan Sosial Kabupaten Takalar Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00.

7.5.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang

TA 2022	TA 2021
Rp893.497.640,10	**Rp808.106.294,08**

Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Takalar Tahun 2022 senilai Rp893.497.640,10. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp85.391.346,02 atau 10,57% dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp808.106.294,08.

7.5.4.2.1.11 Beban Lain-Lain

TA 2022	TA 2021
Rp7.805.280.244,96	**Rp5.999.962.839,95**

Beban Lain-Lain Kabupaten Takalar Tahun 2022 senilai Rp7.805.280.244,96 yang merupakan ekstrakomtabel senilai Rp1.870.523.925,96 dan Beban Penurunan Nilai Investasi senilai Rp923.069.008,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.805.317.405,01 atau 30,09% dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp5.999.962.839,95.

7.5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2022	TA 2021
Rp152.487.290.605,32	**Rp145.096.122.941,85**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2022 senilai Rp152.487.290.605,32. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp7.391.167.663,47 atau 5,09% dari realisasi TA 2021 yang mencapai nilai Rp145.096.122.941,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 106
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	34.836.504.746,12	24.597.786.081,89
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.069.935.570,84	17.991.041.447,77
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	98.385.074.429,42	96.168.881.999,81

No	Uraian	2022	2021
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.046.000,00	1.139.220.525,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	4.908.738.028,44
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	191.729.858,94	290.454.858,94
	Jumlah	**152.487.290.605,32**	**145.096.122.941,85**

7.5.4.2.3 Beban Transfer

TA 2022	TA 2021
Rp61.906.255.900,00	**Rp62.658.139.832,00**

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2022 terealisasi senilai Rp61.906.255.900,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp751.883.932,00 atau 1,20% dari realisasi TA 2021 senilai Rp62.658.139.832,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 107
Realisasi Beban Transfer TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Bagi Hasil	3.646.694.400,00	4.557.695.125,00
2	Beban Bantuan Keuangan	58.259.561.500,00	58.100.444.707,00
	Jumlah	**61.906.255.900,00**	**62.658.139.832,00**

7.5.4.2.4 Beban Tak Terduga

TA 2022	TA 2021
Rp2.515.835.983,00	**Rp123.652.909,00**

Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2022 terealisasi senilai Rp2.515.835.983,00 atau 1.934,60% dari realisasi TA 2021 senilai Rp123.652.909,00.

Belanja Tak Terduga pada LRA lebih rendah dari pada Beban Tak Terduga pada LO senilai Rp96.361.007,00. Selisih tersebut adalah realisasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada LRA yang merupakan pengembalian sisa dana yang tidak digunakan pada Kegiatan Program Hibah Bantuan Pendanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 Kabupaten Takalar, berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Takalar Nomor PHD-23/MK.7/DTK.03/RR/2021, tanggal 21 Oktober 2021.

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

TA 2022	TA 2021
(Rp7.379.546.779,68)	**(Rp3.152.867.092,42)**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2022 terealisasi senilai (Rp7.379.546.779,68) sedangkan pada TA 2021 senilai (Rp3.152.867.092,42).

7.5.4.4 Surplus Non Operasional

TA 2022	TA 2021
Rp36.346.594,75	**Rp906.916.468,32**

Surplus Non Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2022 terealisasi senilai Rp36.346.594,75 sedangkan pada TA 2021 senilai Rp906.916.468,32. Jika dibandingkan dengan TA 2021 jumlah Surplus Non Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar mengalami penurunan senilai Rp870.569.873,57 atau 95,99%.

7.5.4.5 Defisit Non Operasional

TA 2022	TA 2021
Rp7.415.893.374,43	**Rp4.059.783.560,74**

Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2022 terealisasi senilai Rp7.415.893.374,43 sedangkan pada TA 2021 senilai Rp4.059.783.560,74. Jika dibandingkan dengan TA 2021 Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar mengalami kenaikan senilai Rp3.356.109.813,69 atau 82,67%.

7.5.4.6 Pos Luar Biasa

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2022 dan 2021 senilai Rp0,00.

7.5.4.7 Surplus/Defisit LO

TA 2022	TA 2021
Rp11.108.429.440,13	**(Rp42.962.147.695,96)**

Surplus/Defisit LO Kabupaten Takalar TA 2022 adalah surplus senilai Rp11.108.429.440,13 sedangkan pada TA 2021 defisit senilai Rp42.962.147.695,96. Jika dibandingkan dengan TA 2021 surplus tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp54.070.577.136,09.

7.5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

7.5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

TA 2022	TA 2021
Rp136.401.001.959,36	**Rp113.426.040.467,39**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp136.401.001.959,36 dan Rp113.426.040.467,39 yang terdiri dari:

Tabel 108
Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Arus Kas Masuk	1.123.174.928.758,36	1.101.591.902.234,49
2	Arus Kas Keluar	986.773.926.799,00	988.165.861.767,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**136.401.001.959,36**	**113.426.040.467,39**

7.5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas masuk yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2022 dan 2021 dari aktivitas operasi adalah senilai Rp1.123.174.928.758,36 dan senilai Rp1.101.591.902.234,49 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 109
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	23.417.169.232,00	24.785.643.748,50
2	Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah	3.129.372.144,00	1.899.627.570,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.178.141.839,00	8.238.598.134,00
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.068.258.599,36	86.864.690.121,99
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	15.858.558.847,00	17.475.180.893,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	12.567.831.065,00	7.700.344.503,00

No	Uraian	2022	2021
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	559.979.921.190,00	564.934.568.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	118.673.244.604,00	76.846.239.056,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	102.972.846.469,00	121.518.760.978,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	75.045.028.000,00	84.350.371.400,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	56.985.815.409,00	32.450.407.628,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan	24.051.103.000,00	28.739.103.960,00
13	Penerimaan Hibah	0,00	3.750.000.000,00
14	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
15	Pendapatan Lainnya	42.247.638.360,00	42.038.366.242,00
	Jumlah	**1.123.174.928.758,36**	**1.101.591.902.234,49**

7.5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas keluar yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2022 dan 2021 untuk aktivitas operasi senilai Rp986.773.926.799,00 dan Rp988.165.861.767,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Belanja Pegawai	523.629.243.269,00	547.131.893.166,00
2	Belanja Barang	308.182.707.004,00	289.118.163.860,10
3	Belanja Bunga	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	15.591.217.650,00	4.783.640.600,00
6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
7	Belanja Tidak Terduga	2.419.474.976,00	123.652.909,00
8	Belanja Bagi Hasil Pajak	3.646.694.400,00	4.557.695.125,00
9	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	11.450.000,00
11	Bantuan Keuangan ke Desa	133.304.589.500,00	142.439.366.107,00
	Jumlah	**986.773.926.799,00**	**988.165.861.767,10**

7.5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	TA 2022	TA 2021
	(Rp417.568.324.237.00)	**(Rp140.682.040.797.10)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan

Pemerintah Kabupaten Takalar kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi aset Pemerintah Kabupaten Takalar pada TA 2022 dan 2021 senilai (Rp417.568.324.237.00) dan (Rp140.682.040.797.10) yang terdiri dari:

Tabel 111
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Arus Kas Masuk	856.344.249,00	100.063.390,00
2	Arus Kas Keluar	418.424.668.486,00	140.782.104.187,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		**(417.568.324.237.00)**	**(140.682.040.797.10)**

7.5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp856.344.249,00 dan Rp100.063.390,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Bangunan	0,00	0,00
6	Penjualan Aset Tetap Lainnya	98.000.000,00	100.063.390,00
7	Penjualan Aset Lainnya	758.344.249,00	0,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**856.344.249,00**	**100.063.390,00**

Arus kas investasi diterima dari Penjualan Aset Lainnya berupa kendaraan dinas roda dua, roda empat dan *scrap* yang dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.

7.5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Arus keluar kas yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2022 dan 2021 untuk aktivitas Investasi Aset Non Keuangan senilai Rp418.424.668.486,00 dan Rp140.782.104.187,10 yang terdiri dari:

Tabel 113
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	4.576.325.420,00	8.577.959.400,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	77.491.881.979,00	29.661.741.430,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	180.038.642.251,00	50.781.476.803,72
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Bangunan	155.024.484.196,00	47.170.806.203,38
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.293.334.640,00	3.590.120.350,00
7	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	1.000.000.000,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah	**418.424.668.486,00**	**140.782.104.187,10**

7.5.5.3	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**	**TA 2022**	**TA 2021**
		Rp241.947.497.641,00	**Rp0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan kas dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Takalar dan klaim Pemerintah Kabupaten Takalar terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Takalar pada TA 2022 dan 2021 senilai Rp241.947.497.641,00 dan Rp 0,00.

7.5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit. Arus kas masuk yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2022 dan 2021 dari Aktivitas Pendanaan Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank senilai Rp241.947.497.641,00 dan Rp0,00.

7.5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan penggunaan surplus. Arus kas keluar yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2022 dan 2021 untuk Aktivitas Pendanaan masing-masing senilai Rp0.00.

7.5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	TA 2022	TA 2021
	Rp88.727.226,03	**Rp0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Takalar pada TA 2022 dan 2021 senilai Rp88.727.226,03 dan Rp0,00 yang merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan penerimaan kembali Kas Bendahara Pengeluaran. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran PFK terdiri dari penerimaan dan pembayaran atas Iuran Wajib Pegawai (IWP), Tabungan Perumahan Pegawai (Taperum), Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Penghasilan (PPh) 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang dan jasa.

Tabel 114
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	**Arus Kas Masuk**		
	a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	112.935.776.305,06	73.136.342.451,00
	b. Penerimaan (Pendapatan) Dana BOS	0,00	0,00
	Jumlah	**112.935.776.305,06**	**73.136.342.451,00**
2	**Arus Kas Keluar**		
	a. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	112.847.049.079,03	73.136.342.451,00
	b. Pengeluaran (Belanja) Dana BOS	0,00	0,00
	Jumlah	**112.847.049.079,03**	**73.136.342.451,00**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**88.727.226,03**	**0,00**

7.5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan kas. Arus kas masuk yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2022 dan 2021 dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga senilai Rp112.935.776.305,06 dan Rp73.136.342.451,00.

7.5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris mencerminkan pengeluaran kas. Arus kas keluar Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2022 dan 2021 atas Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga senilai Rp112.847.049.079,03 dan Rp73.136.342.451,00.

7.5.5.5 Kenaikan/ (Penurunan) Kas Bersih Selama Periode Berjalan	TA 2022	TA 2021
	(Rp39.131.097.410,61)	**(Rp27.256.000.329,71)**

Kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode berjalan merupakan total dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Non Anggaran.

Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih selama Tahun 2022 senilai (Rp39.131.097.410,61) dan Tahun 2021 senilai (Rp27.256.000.329,71).

7.5.5.6 Saldo Awal Kas

TA 2022	TA 2021
Rp94.187.591.053,37	**Rp121.234.932.183.08**

Saldo Awal Kas di Bendahara Umum Daerah sesuai dengan data Neraca Tahun 2022 senilai Rp94.187.591.053,37 dan Tahun 2021 senilai Rp121.234.932.183.08. Saldo Akhir Kas Tahun 2021 senilai Rp93.978.931.853,37 dan Saldo Awal Kas Tahun 2022 berubah menjadi Rp94.187.591.053,37 karena koreksi saldo awal dari Dana JKN yang belum diperhitungkan pada Tahun 2021 senilai Rp208.659.200,00.

7.5.5.7 Saldo Akhir Kas

TA 2022	TA 2021
Rp55.056.493.642,76	**Rp93.978.931.853,37**

Saldo akhir kas di BUD Tahun 2022 senilai Rp55.056.493.642,76 merupakan penjumlahan Kenaikan/(Penurunan) Kas senilai (Rp39.131.097.410,61) dengan Saldo awal kas BUD senilai Rp94.187.591.053,37. Saldo akhir kas di BUD terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD dan Kas Lainnya. Rincian pada tabel berikut:

Tabel 115
Saldo akhir kas TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Kas di BUD	44.504.956.103,05	79.050.248.880,09
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.516.402.645,00	23.392.738,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	700.000,00
4	Kas Lainnya-Dana BOS	58.920.342,00	15.990.060,00
5	Kas di Bendahara JKN	0,00	1.121.196,00
6	Kas di BLUD	8.440.642.883,71	14.887.478.979,28
7	Kas Lainnya	535.571.669,00	0,00
	Jumlah	**55.056.493.642,76**	**93.978.931.853,37**

7.5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari s.d 31 Desember 2022. Laporan Operasional merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Ekuitas Awal 2022 senilai Rp1.496.474.389.188,43;
2. Surplus/Defisit-LO senilai Rp11.108.429.440,13 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kab. Takalar Tahun 2022; dan
3. Adanya dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan transaksi penyesuaian akun neraca yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2022 dilakukan penyesuaian.

Tabel 116
Rincian Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	**Ekuitas Awal**	**1.496.474.389.188,43**	**1.600.078.268.416,46**	**-103.603.879.228,03**
2.	**Surplus/Defisit-LO**	**11.108.429.440,13**	**-42.962.147.695,96**	**54.070.577.136,09**
3.	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	**30.196.699.604,23**	**-60.641.731.532,07**	**90.838.431.136,30**
	Koreksi Nilai Piutang	4.656.673.495,33	211.368.975,00	4.445.304.520,33
	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	-4.021.576.005,14	-500	-4.021.575.505,14
	Koreksi Nilai Utang Belanja	1.148.689.100,00	-1.098.769.100,00	2.247.458.200,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap	20.936.995.601,00	12.890.089.529,00	8.046.906.072,00
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	185.578.130,19	68.887.459,00	116.690.671,19
	Koreksi Nilai Penyusutan	7.045.665.374,85	-72.716.327.078,29	79.761.992.453,14
	Koreksi Investasi Permanen	36.014.708,00	-16.213.796,78	52.228.504,78
	Koreksi Saldo Awal Kas Dana Kapitasi	208.659.200,00	19.232.980,00	189.426.220,00
4.	**Ekuitas Akhir**	**1.537.779.518.232,79**	**1.496.474.389.188,43**	**41.305.129.044,36**

Saldo ekuitas akhir Pemerintah Kab. Takalar per 31 Desember 2022 senilai Rp1.537.779.518.232,79. Saldo ekuitas akhir tersebut diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal ditambah Surplus (Defisit)-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) terdiri dari:

		TA 2022	TA 2021
7.5.6.1.	**Ekuitas Awal**	**Rp1.496.474.389.188,43**	**Rp1.600.078.268.416,46**

Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Takalar per 1 Januari 2022 dan Tahun 2021 senilai Rp1.496.474.389.188.43 dan Rp1.600.078.268.416.46.

		TA 2022	TA 2021
7.5.6.2.	**Surplus/Defisit-LO**	**Rp11.108.429.440,13**	**(Rp42.962.147.695.96)**

Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 senilai Rp11.108.429.440,13 dan (Rp42.962.147.695.96) merupakan surplus/defisit dari Operasi dan jumlah surplus defisit dari Kegiatan Non Operasional.

7.5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

		TA 2022	TA 2021
7.5.6.3.1.	**Koreksi Saldo Awal Kas**	**Rp208.659.200,00**	**Rp19.232.980.00**

Koreksi Saldo Awal Kas Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022 senilai Rp208.659.200,00 merupakan koreksi saldo awal penambahan kas Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan.

		TA 2022	TA 2021
7.5.6.3.2.	**Koreksi Nilai Persediaan**	**Rp0.00**	**Rp0.00**

Koreksi Nilai Persediaan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

		TA 2022	TA 2021
7.5.6.3.3.	**Koreksi Nilai Piutang**	**Rp4.656.673.495,33**	**Rp211.368.975.00**

Koreksi Nilai Piutang pada Pemerintah Kab. Takalar Tahun 2022 senilai Rp4.656.673.495,33, merupakan koreksi saldo awal Piutang dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi saldo awal penambahan Piutang PBBP2 senilai Rp326.875.792.01.
- koreksi saldo awal penambahan Piutang denda pajak PBBP2 yang belum tercatat senilai Rp4.330.267.603,32.
- Koreksi saldo awal pengurangan Piutang Lain-Lain (Uang Muka Pengadaan barang/jasa CV. Fathir Putra Yasfat) yang sudah di bayar tahun 2021 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan senilai Rp500.000,00

- Koreksi saldo awal penambahan Piutang Reklame atas kelebihan bayar Tahun 2021 senilai Rp30.100,00.

7.5.6.3.4. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	TA 2022	TA 2021
	(Rp4.021.575.704.14)	**(Rp500.00)**

Koreksi atas Nilai Penyisihan Piutang Pemerintah Kab. Takalar Tahun 2022 senilai (Rp4.021.575.704.14) merupakan koreksi saldo awal penyisihan piutang dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi saldo awal penambahan penyisihan piutang PBBP2 senilai Rp102.018.259,99.
- Koreksi saldo awal penambahan penyisihan Piutang denda PBBP2 senilai Rp3.920.057.444,15.
- Koreksi saldo awal penambahan penyisihan piutang reklame atas kelebihan pembayaran piutang pajak reklame Tahun 2021 senilai Rp301,00.
- Koreksi saldo awal Penyisihan piutang Lain-Lain (Uang Muka Pengadaan barang/jasa CV. Fathir Putra Yasfat) yang sudah di bayar tahun 2021 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan ketahanan senilai Rp500.000,00.

7.5.6.3.5. Koreksi Nilai Utang Belanja	TA 2022	TA 2021
	Rp1.148.689.100,00	**Rp(1.098.769.100,00)**

Koreksi Nilai Utang Belanja Pemerintah Kab. Takalar Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp1.148.689.100,00 dan Rp1.098.769.100,00. Koreksi Nilai Utang Belanja Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi saldo awal utang belanja yang sudah dibayar pada Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp1.049.105.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 117
Rincian Koreksi Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Pihak ke tiga	Kegiatan	No Kontrak	No SP2d	Tgl SP2d	Nilai
PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Ruas Palleko - Malolo (Lanjutan)	102/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 23 Juli 2018	03637/SP2D/LS-BARANG-JASA/XiI/2021	07/12/2021	150.287.500,00
PT. DWINUR HASKA	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Ruas	104/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 30 Juli 2018	03378/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021	19/11/2021	203.755.000,00

	Bontonompo - Tana Tana				
CV. FIRMA KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Ruas Towata - Jenemaeja	106 \/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 30 Juli 2018	03326/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021	22/11/2021	130.900.000,00
PT. MAHAPANI KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Kunjung - Parappa	114/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 23 Juli 2018	03369/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021	19/11/2021	110.412.500,00
PT. HEXA MULIA KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Ruas Bontokassi - Kalukubodo	116/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 30 Juli 2018	03433/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021	30/11/2021	216.700.000,00
CV. WIRA KAMIL KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Ruas Julumata - Pangkajene	118/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 23 Juli 2018	03565/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021	30/11/2021	99.770.000,00
PT. TRIKONS INDO PRATAMA	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Lantang Selatan - Lantang Utara	124/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 30 Juli 2018	03334/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021	22/11/2021	137.280.000,00
Jumlah					**1.049.105.000,00**

- Koreksi saldo awal utang belanja dobel pencatatan pada Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan senilai Rp99.584.100,00.

7.5.6.3.6. Koreksi Nilai Aset Tetap

TA 2022	TA 2021
Rp20.936.995.601,00	**Rp12.890.089.529,00**

Terdapat koreksi Nilai Aset Tetap Pemerintah Kab. Takalar TA 2022 senilai Rp20.936.995.601,00 merupakan koreksi saldo awal aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi saldo awal bertambah Aset tetap dari hibah berupa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Dinas Perhubungan senilai Rp20.497.486.001,00.
- Koreksi saldo awal bertambah aset tetap kurang catat ternak pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan senilai Rp39.000.000,00, kurang catat aset tetap Jembatan pada Jalan Kabupaten pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp133.937.100,00, dan kurang catat Bangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp271.727.500,00.

- Koreksi saldo awal bertambah Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dari barang *extracomptable* senilai Rp6.500.000,00.
- Koreksi saldo awal berkurang lebih catat aset tetap Meubelair yang nilainya di bawah kapitalisasi/*extracomptable* senilai Rp11.655.000,00.

7.5.6.3.7.	Koreksi Nilai Aset Lainnya	TA 2022	TA 2021
		Rp185.578.130,19	**Rp68.887.459,00**

Koreksi nilai aset tetap lainnya pada Pemerintah Kab. Takalar Tahun 2022 senilai Rp185.578.130,19 merupakan koreksi saldo awal penambahan Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp120.980.936,19 dan koreksi penambahan Kas yang Dibatasi Penggunaannya senilai Rp64.597.194,00

7.5.6.3.8.	Koreksi Investasi Non Permanen	TA 2022	TA 2021
		Rp0,00	**Rp0,00**

Penambahan koreksi nilai Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.6.3.9.	Koreksi Nilai Penyisihan Investasi	TA 2022	TA 2021
		Rp0,00	**Rp0,00**

Penambahan Koreksi Nilai Penyisihan Investasi pada Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.6.3.10.	Koreksi Nilai Penyusutan	TA 2022	TA 2021
		Rp7.045.665.374,85	**(Rp72.716.327.078,29)**

Penambahan Koreksi Nilai Penyusutan pada Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022 senilai Rp7.045.665.374,85 merupakan koreksi penambahan dan pengurangan nilai penyusutan sebagai berikut:

- Koreksi pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap karena perubahan kelompok/kode barang senilai Rp44.565.287,24.
- Koreksi pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap karena atribusi barang ke induknya senilai Rp43.678.785.591,51.
- Koreksi saldo awal bertambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp33.367.160.002,97.
- Koreksi bertambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari penerimaan hibah barang berupa instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Dinas Perhubungan senilai Rp3.038.294.274,03 dan Bangunan Gedung Kantor pada Sekretariat Daerah senilai Rp165.247.740,00.

- Koreksi bertambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari reklas Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp102.920.986,90.
- Koreksi bertambah Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap yang sebelumnya tercatat sebagai barang *extracomtable* berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4.062.500,00.

Daftar koreksi Akumulasi Penyusutan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 118
Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

SKPD	Koreksi saldo awal	Reklasifkasi dari Ekstrakomptabel Ke Aset Tetap	Hibah Masuk	Reklasifkasi Dari KDP	Reklasifikasi Bertambah Kode Barang	Koreksi Berkurang Atribusi ke Induk	Jumlah
Sekretariat DPRD	(229.538.861,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(229.538.861,30)
Sekretariat Daerah	14.229.949,56	0,00	165.247.740,00	0,00	0,00	(48.300.956,76)	131.176.732,80
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	38.712.465.328,19	0,00	0,00	0,00	(28.719.572,95)	(42.318.155.058,21)	(3.634.409.302,97)
Dinas Perhubungan	(94.900.000,00)	0,00	3.038.294.274,03	0,00	(15.845.714,29)	0,00	2.927.548.559,74
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	18.548.246,25	0,00			0,00	0,00	18.548.246,25
Dinas Kesehatan	226.768.343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.768.343,62
Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	(541.627.773,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(541.627.773,30)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(5.768.168.027,81)	4.062.500,00	0,00	102.920.986,90	0,00	(1.216.517.910,29)	(6.877.702.451,20)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(137.987.250,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(137.987.250,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(304.390.000,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(304.390.000,03)
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.362.500,00	0,00			0,00	0,00	6.362.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(4.436.250,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.436.250,00)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	900.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.282,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(19.922.283,32)	0,00			0,00	0,00	(19.922.283,32)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.561.999,94)	0,00			0,00	0,00	(2.561.999,94)
Dinas Tanaman Pangan,	6.194.046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194.046,83

SKPD	Koreksi saldo awal	Reklasifkasi dari Ekstrakomptabel Ke Aset Tetap	Hibah Masuk	Reklasifkasi Dari KDP	Reklasifikasi Bertambah Kode Barang	Koreksi Berkurang Atribusi ke Induk	Jumlah
Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan							
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(47.721.539,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.721.539,16)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33.014.514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.014.514,32
Badan Pendapatan Daerah	86.156.733,00	0,00			0,00	0,00	86.156.733,00
Inspektorat	633.857,16	0,00			0,00	0,00	633.857,16
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(375.000,00)	0,00			0,00	0,00	(375.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	(154.969.438,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(154.969.438,63)
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	(55.066.000,00)	0,00		0,00	0,00	0,00	(55.066.000,00)
Kecamatan Mappakasunggu	162.982.800,18	0,00			0,00	(6.868.716,00)	156.114.084,18
Kecamatan Mangarabombang	7.797.425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.997.400,00)	(5.199.974,33)
Kecamatan Polombangkeng Selatan	497.739.239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.756.491,06)	479.982.748,82
Kecamatan Polombangkeng Utara	770.241.769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.241.769,79
Kecamatan Galesong Utara	(8.584.892,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.584.892,13)
Kecamatan Pattallassang	193.828.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.189.059,19)	135.639.701,89
Kecamatan Galesong	(454.478,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(454.478,95)
Jumlah	**33.367.160.002,97**	**4.062.500,00**	**3.203.542.014,03**	**102.920.986,90**	**(44.565.287,24)**	**(43.678.785.591,51)**	**(7.045.665.374,85)**

7.5.6.3.11. Selisih Revaluasi Aset Tetap

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Selisih Revaluasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022 dan Tahun 2021 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.6.3.12. Koreksi Investasi Permanen

TA 2022	TA 2021
Rp36.014.708,00	**(Rp16.213.796,78)**

Koreksi Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022 merupakan koreksi penyesuaian saldo awal Investasi Permanen pada PT. Tirta Panrannuangku (PDAM) senilai Rp36.014.708,00 dan Tahun 2021 senilai Rp16.213.796,78.

7.5.6.3.13. Lain-Lain

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	**Rp0,00**

Nilai Lain-Lain pada Laporan ini merupakan informasi perubahan ekuitas Lain-Lain Tahun 2022 dan 2021 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.6.3.14. Ekuitas Akhir

TA 2022	TA 2021
Rp1.537.779.518.232,79	**Rp1.496.474.389.188,43**

Ekuitas Akhir merupakan jumlah Ekuitas Awal Tahun 2022 ditambah Surplus/Defisit LO ditambah/(dikurangi) koreksi berdampak ke Ekuitas senilai Rp1.537.779.518.232,79. Jumlah tersebut sama dengan jumlah Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2022 senilai Rp1.537.779.518.232,79.

7.6 PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah tersebut didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah *(strategic apex)*, Sekretaris Daerah *(middle line)*, Dinas Daerah *(operating core)*, Badan/fungsi penunjang *(technostructure)*, dan staf pendukung *(supporting staf)*.

Pembentukan organisasi Pemerintah Daerah merupakan suatu keharusan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tahun 2019 dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Tanakeke, serta Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Takalar telah melaksanakan penyesuaian sesuai dengan aturan yang baru tersebut. Penataan organisasi melalui proses pemetaan urusan wajib dan urusan pilihan melalui proses verifikasi dan validasi oleh masing-masing kementerian urusan pemerintahan dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur. Dari hasil proses verifikasi dan validasi data akan menentukan tipe dari organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Takalar.

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat Perubahan dan Penambahan SKPD maka untuk menunjang tugas pokok dan fungsi organisasi perlu dilakukan pemindahan dan perubahan pencatatan aset, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Nomenklatur SKPD Lama Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, dan Perdagangan untuk bidang perdagangan mutasi ke Nomenklatur SKPD Baru Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Nomenklatur SKPD Lama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi untuk bidang transmigrasi mutasi ke Nomenklatur SKPD Baru Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Nomenklatur SKPD Lama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang peternakan mutasi ke Nomenklatur SKPD Baru Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Nomenklatur SKPD Lama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bidang pendapatan mutasi ke Nomenklatur SKPD Baru Badan Pendapatan Daerah

7.7 PENUTUP

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022, realisasi Pendapatan senilai Rp1.124.031.273.007,36 atau mengalami peningkatan senilai Rp22.339.307.382,87 jika dibandingkan dengan Pendapatan TA 2021 senilai Rp1.101.691.965.624,49, realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp115.649.286.063,36 dari jumlah anggaran senilai Rp166.206.470.195,00 atau 69,58%, Dana Perimbangan senilai Rp810.052.402.175,00 dari jumlah anggaran senilai Rp835.715.832.000,00 atau 96,93%. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya senilai Rp75.045.028.000,00 dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp75.045.028.000,00 atau 100%. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi senilai Rp81.036.918.409,00 dari jumlah anggaran senilai Rp70.669.719.932,00 atau 114,67%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah senilai Rp42.247.638.360,00 dari jumlah anggaran senilai Rp45.275.300.000,00 atau 93,31%. Jadi secara total jumlah realisasi Pendapatan senilai Rp1.124.031.273.007,36 dari jumlah anggaran Rp1.192.912.350.127,00 atau 94,23%.

Realisasi Belanja dan Transfer pada TA 2022 senilai Rp1.405.198.595.285,00 mengalami kenaikan senilai Rp277.250.629.330,80 atau 24,58% dari realisasi TA 2021 senilai Rp1.127.947.965.954,20.

Realisasi Belanja Operasi senilai Rp847.403.167.923,00 dari jumlah anggaran Rp932.689.272.270,00 atau 90,86%. Realisasi Belanja Modal senilai Rp418.424.668.486,00 dari jumlah anggaran senilai Rp459.941.802.121,00 atau 90,97%. Sedangkan realisasi Belanja Tak Terduga senilai Rp2.419.474.976,00 dari jumlah anggaran senilai Rp4.047.507.689,00 atau 59,78% serta Belanja Transfer senilai Rp136.951.283.900,00 dari jumlah anggaran senilai Rp138.212.699.900,00 atau 99,09%.

Total Aset per 31 Desember 2022 senilai Rp1.803.428.694.120,55, jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 senilai Rp1.516.088.157.962,55 mengalami kenaikan senilai Rp287.340.536.158,00. Total Kewajiban senilai Rp265.649.175.887,76. Jika dibandingkan dengan posisi tahun lalu senilai Rp19.613.768.774,12 mengalami kenaikan senilai Rp246.035.407.113,64. Ekuitas senilai Rp.1.537.779.518.232,79 jika dibandingkan dengan posisi tahun lalu senilai Rp1.496.474.389.188,43 mengalami kenaikan senilai Rp41.305.129.044,36 atau 2,76%.

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 senilai Rp54.967.766.416,73 mengalami penurunan senilai Rp39.011.165.436,64 jika dibandingkan dengan TA 2021 senilai Rp93.978.931.853.37 sedangkan Surplus (Defisit) LO TA 2022 senilai Rp11.108.429.440,13 atau mengalami kenaikan senilai Rp54.070.577.136,09 jika dibandingkan dengan TA 2021 senilai (Rp42.962.147.695,96).

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Takalar atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai selama TA 2022 sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Takalar, 28 Mei 2023

Pj. BUPATI TAKALAR

DR. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022
Lampiran 1a.	Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022
Lampiran 1b.	Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022
Lampiran 1c.	Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama per 31 Desember 2022
Lampiran 1d.	Kas di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle per 31 Desember 2022
Lampiran 1e.	Kas di Bendahara BOS Tahun 2022
Lampiran 1f.	Kas Lainnya per 31 Desember 2022
Lampiran 2a	Rincian atas piutang pajak beserta penyisihannya per 31 Desember 2022
Lampiran 2b.	Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2022
Lampiran 3	Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Denda PBB-P2) per 31 Desember 2022
Lampiran 4	Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022
Lampiran 5	Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022
Lampiran 6	Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2022
Lampiran 7	Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan perhitungan penyisihannya.
Lampiran 8	Daftar Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022
Lampiran 9	Rincian Piutang Lainya Dana Denfarm KIPPK Pemerintah kab Takalar per 31 Desember 2022
Lampiran 10	Daftar Piutang Lainya–pihak ketiga per 31 Desember 2022
Lampiran 10a.	Daftar Piutang Lainya–pihak ketiga per 31 Desember 2022
Lampiran 11	Rekapitulasi Saldo Persediaan per 31 Desember 2022
Lampiran 12	Daftar Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2022
Lampiran 12a.	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2022
Lampiran 13	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah per OPD per 31 Desember 2022

Lampiran 14	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung Ke Tanah per 31 Desember 2022
Lampiran 15	Persertifikatan Tanah per SKPD per 31 Desember 2022
Lampiran 16	Rincian Aset Tanah yang memenuhi kriteria Properti Investasi per 31 Desember 2022
Lampiran 17a	Mutasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin per OPD per 31 Desember 2022
Lampiran 17b	Mutasi Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin per OPD per 31 Desember 2022
Lampiran 18	Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya ke Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022
Lampiran 19	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin
Lampiran 20	Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Persediaan per 31 Desember 2022
Lampiran 21	Daftar yang menyerahkan dan menerima barang yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022
Lampiran 22	Daftar Aset Kendaraan Bermotor yang Digunakan/Dipinjam Pakai oleh Instansi Vertikal per 31 Desember 2022
Lampiran 23a.	Mutasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2022 per 31 Desember 2022
Lampiran 23b.	Mutasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2022 per 31 Desember 2022
Lampiran 24	Rincian Aset Gedung yang memenuhi kriteria Properti Investasi per 31 Desember 2022
Lampiran 25	Utang Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022
Lampiran 26	Daftar belanja modal gedung yang diakui sebagai pelunasan kewajiban atas pekerjaan fisik tahun sebelumnya yang dibayarkan melalui rekening belanja modal tahun berjalan Tahun Anggaran 2022
Lampiran 27	Daftar yang menyerahkan dan menerima barang yang bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022
Lampiran 28a.	Mutasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2022 per 31 Desember 2022
Lampiran 28b.	Mutasi Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2022 per 31 Desember 2022
Lampiran 29	Utang Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022
Lampiran 30	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022

Lampiran 31	Kapitalisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dari bunga pinjaman per 31 Desember 2022
Lampiran 32	Hibah Masuk Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022
Lampiran 33a.	Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2022 per 31 Desember 2022
Lampiran 33b.	Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2022 per 31 Desember 2022
Lampiran 34a.	Mutasi Konstruski Dalam Pengerjaan (KIB F) per 31 Desember 2022
Lampiran 34b.	Rincian Konstruski Dalam Pengerjaan (KIB F) per OPD Tahun 2022 per 31 Desember 2022
Lampiran 34c.	Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Definitifnya Tahun Anggaran 2022
Lampiran 35	Saldo Extra Comptable Aset Tetap per OPD per 31 Desember 2022
Lampiran 36	Tabel Progres Inventarisasi Tahun 2022 Tahun Anggaran 2022
Lampiran 37	Daftar Akumulasi Penyusutan Per OPD Tahun 2021 dan 2022 per 31 Desember 2022
Lampiran 38	Daftar Piutang Penjualan Aset Daerah (Tagihan Penjualan Angsuran) 2022 per 31 Desember 2022
Lampiran 39	Daftar Aset Lainnya Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022
Lampiran 40	Rincian Aset Tak Berwujud per OPD Tahun 2022 per 31 Desember 2022
Lampiran 41	Mutasi Aset Lain-Lain per OPD Tahun 2022 per 31 Desember 2022
Lampiran 42	Daftar Penghapusan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2022
Lampiran 43	Kriteria Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2022
Lampiran 44	Daftar Mutasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022
Lampiran 45a.	Daftar Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022
Lampiran 45b.	Daftar Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022
Lampiran 46	Daftar Utang Belanja per 31 Desember 2022

Lampiran 46

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR UTANG BELANJA
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					**2,405,785,296.27**	**5,324,870.00**			**2,330,227,306.00**	**80,882,860.27**
	Tahun 2008			**6,724,000.00**	**6,724,000.00**				**0.00**	**6,724,000.00**
1	CV. MATTOTORANG	Pembangunan TK Satria Cakura		2,310,000.00	2,310,000.00					2,310,000.00
2	CV. SAMUDRA INDONESIA	Rehabilitasi SDN Bontokadatto		2,090,000.00	2,090,000.00					2,090,000.00
3	CV. YUNITA	Rehabilitasi SMU Neg. 1 Takalar		2,324,000.00	2,324,000.00					2,324,000.00
	Tahun 2010			**789,673,184.00**	**23,000,000.00**				**0.00**	**23,000,000.00**
4	CV. DUA DELAPAN TUJUH	~ Rehabilitasi SMP Negeri 2 Galesong Utara		105,969,187.00	0.00					0.00
5	CV. NUR FITRIANI .	~ SDN No 181 Inp Pattopakang		92,000,000.00	4,600,000.00					4,600,000.00
6	CV. BINTANG SEJAHTERA .	~ SDN No 56 Lassang II		92,000,000.00	4,600,000.00					4,600,000.00
7	CV. CAHAYA TIMUR UTAMA	~ SDN No 176 Inp Lengkese II		92,000,000.00	4,600,000.00					4,600,000.00
8	CV. PALOPO	~ SDN No 222 Inp Sampulungan		92,000,000.00	4,600,000.00					4,600,000.00
9	CV. ALGAISA UTAMA	~ SDN No 219 Inp Batutaruttu		92,000,000.00	4,600,000.00					4,600,000.00
10	CV. PUSPA INDAH PERMAI	~ Rehabilitasi Gedung SMA Negeri 1 Galesong Selatan		223,703,997.00	0.00					0.00
	Tahun 2011			**65,850,000.00**	**3,292,500.00**				**0.00**	**3,292,500.00**
11	CV. MARIO	Pekerjaan Pengecetan Kantor Dinas Dikpora Kab. Takalar Tahun Anggaran 2011		8,000,000.00	400,000.00					400,000.00
12	CV. MARIO	Pekerjaan Rehabilitasi WC/KM Dikpora Kab. Takalar Tahun Anggaran 2011		20,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00
13	CV. Utama Teknik	Pekerjaan Instalasi Listrik dan Penambahan daya kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Takalar Tahun Anggaran 2011		37,850,000.00	1,892,500.00					1,892,500.00
	Tahun 2012			**295,875,000.00**	**14,793,749.67**				**0.00**	**14,793,749.67**
14	CV. CITRA RAMA LESTARI	Pembangunan Pagar TK Da'watul Islamiyah		10,000,000.00	500,000.00					500,000.00
15	CV. EKA CIPTA	Rehabilitasi Ruangan Pengawas Dikpora Takalar		23,625,000.00	1,181,250.00					1,181,250.00
16	CV. RIMA	Pembangunan Lapangan Volly dan Takraw BTN Bombong Indah		28,350,000.00	1,417,500.00					1,417,500.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
17	CV. FATNUR SEJAHTERA	Lanjutan Rehabilitasi Gedung TK. Al-Munawarah Kel. Parangluara		19,950,000.00	997,500.00					997,500.00
18	CV. GOJENGTA	Penyempurnaan Pelataran dan Lantai Gedung TK.Gembira Desa Parangmata		29,950,000.00	1,497,499.67					1,497,499.67
19	CV. CAHAYA PELITA	Pemb. Perpustakaan SDN No. 96 Kalongkong Kec. Galut		92,000,000.00	4,600,000.00					4,600,000.00
20	CV. RAHMAN PUTRA WAHID	Pemb. Perpustakaan SDN No. 132 Inp. Parasangang Beru Kec.Galesong		92,000,000.00	4,600,000.00					4,600,000.00
	Tahun 2013			**377,245,000.00**	**18,862,250.00**				**0.00**	**18,862,250.00**
21	CV. MANENG JAYA	Rehabilitasi TK Milenium		49,900,000.00	2,495,000.00					2,495,000.00
22	CV. NANANG JAYA	Pembangunan TK Barugaya		47,954,000.00	2,397,700.00					2,397,700.00
23	CV. IRZAL MAULANA KONSTRUKSI	Pembangunan TK Panrita Galesong		185,000,000.00	9,250,000.00					9,250,000.00
24	CV. ZAHRA PUTRI UTAMA	Rehabilitasi Gedung TK Bina Sejahtera 4		46,446,000.00	2,322,300.00					2,322,300.00
25	CV. ALFIAN PUTRA PRATAMA	Pembangunan TK Jabal Nur		47,945,000.00	2,397,250.00					2,397,250.00
	Tahun 2014			**213,496,666.67**	**3,371,000.00**				**0.00**	**3,371,000.00**
26	CV. Fachrul Yasfat Konstruksi	Pembangunan TK dan PAUD di Kepulauan pulau bauluang Desa Mattirobaji Kec. Mapsu		213,496,666.67	3,371,000.00					3,371,000.00
	Tahun 2016			**1,538,490.00**	**1,538,490.00**				**0.00**	**1,538,490.00**
27	CV. Aulia Mitra Sejahtera	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah Adat Accera Kalompoang Kec. Galesong		1,538,490.00	1,538,490.00					1,538,490.00
	Tahun 2017			**3,976,000.00**	**3,976,000.00**				**0.00**	**3,976,000.00**
28	**CV. ABYSEKA INDOCIPTA**	Perencanaan teknis TK. Dharma Wanita Bontolebang Galesong Utara, TK. Pertiwi Galesong Utara Kec. Galut sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pendidikan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017		3,976,000.00	3,976,000.00					3,976,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2021			**5,750,256,000.00**	**2,330,227,306.60**				**2,330,227,306.00**	**0.60**
	CV. GOLDEN CELEBES	Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya SMP Negeri 2 Takalar, Rehabilitasi Ruang Kelas SMP beserta perabotnya 2, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP beserta perabotnya	177/PPK-DISDIKBUD/VII/2021	3,085,165,000.00	1,043,711,320.00		02439/SP2D/LS-BARANG-JASA/VIII/2022	8/23/2022	1,043,711,320.00	0.00
	CV. ILHAM JAYA ABADI	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Beserta perabotnya 1, Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya SMP Nmegeri 2 Mappakasunggu, Rehabilitasi Ruang Guru SMP beserta perabotnya	177/PPK-DISDIKBUD/VII/2021	2,664,943,000.00	1,286,367,986.60		02434/SP2D/LS-BARANG-JASA/VIII/2022	8/24/2022	1,286,367,986.00	0.60
	Utang PDAM	Beban jasa air bulan Oktober s/d Desember 2021		148,000.00	148000.00				148000.00	0.00
	Utang Listrik			0.00	0.00				0.00	0.00
	Tahun 2022			**103,624,100.00**	**0.00**	**5,324,870.00**				**5,324,870.00**
	TK AMRAH	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya TK AMRAH	906/002/Disdikbud-PAUD-PNF/IV/2022	103,624,100.00		5,176,170.00				5,176,170.00
	Utang PDAM	Bulan Desember 2022				148,700.00				148,700.00
2. Dinas Kesehatan					320,898,739.00	1,661,412,900.00			2,897,100.00	1,979,414,539.00
	Tahun 2008				**81,920,059.00**				**0.00**	**81,920,059.00**
1	CV. KARYA FITRA PERKASA	Pembangunan poskesdes Panyangkalang			6,945,450.00					6,945,450.00
2	CV. ENI UTAMA	Pembangunan poskesdes Lantang			7,005,350.00					7,005,350.00
3	CV. TRY AS	Pembangunan ruang UGD dan poliklinik puskesmas Bulukunyi			51,065,280.00					51,065,280.00
4	CV. CAHAYA LUHUR KARUNIA	Rehabilitasi puskesmas pembantu Bajeng			5,144,650.00					5,144,650.00
5	CV. KUNJUNG MAE	Penyempurnaan puskesmas Galesong Utara			4,154,329.00					4,154,329.00
6	CV. MUHRARIZZAH PRIMA	Rehabilitasi rumah bidan puskesmas Mappakasunggu			2,320,000.00					2,320,000.00
7	CV. RAHMAT UTAMA	Penyempurnaan puskesmas Ko'mara Kecamatan Polobangkeng Utara			1,995,000.00					1,995,000.00
8	CV. USNUL KHATIMAH	Penyempurnaan rumah dokter puskesmas Marbo Kec. Marbo			1,645,000.00					1,645,000.00
9	MEGA MAS UTAMA	Penyempurnaan pustu Sawakong Kec. Galsel			1,645,000.00					1,645,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2009			**385,939,000.00**	**20,657,580.00**				**0.00**	**20,657,580.00**
1	CV. BONTOMATE'NE INDAH	Rehab Pustu Tamasaju Kec. Galut Kab. Takalar	038 / KTR - DINKES/ IV / 2009, 1 April 2009	43,500,000.00	2,175,000.00					2,175,000.00
2	CV. NUR FITRIANI	Rehab Pustu Bontolanra Kec. Galut Kab. Takalar	040 / KTR - DINKES/ IV / 2009, 1 April 2009	46,300,000.00	2,315,000.00					2,315,000.00
3	CV. SOLUSI KARYA MANDIRI	Rehab Puskesmas Bulukunyi Kec. Polsel Kab. Takalar	46 / KTR - DINKES/ IV / 2009, 1 April 2009	46,300,000.00	2,315,000.00					2,315,000.00
4	CV. TRI PUTRI KENCANA	Rehabilitasi Pagar Puskesmas Patoppakang	303 / KTR - DINKES/ X / 2009, 6 Oktober 2009	43,943,000.00	2,197,150.00					2,197,150.00
5	CV. ALAM KARYA	Penyempurnaan Poskesdes Lakatong	314 / KTR - DINKES/ X / 2009, 06 Oktober 2009	21,909,000.00	1,095,450.00					1,095,450.00
6	CV. CAHAYA BERINGIN	Penyempurnaan Pustu Ko'mara Jauh	307 / KTR - DINKES/ X / 2009, 06 Oktober 2009	26,343,000.00	1,317,150.00					1,317,150.00
7	CV. INDAH LESTARI	Penyempurnaan Pustu Ma'samaturu	312 / KTR - DINKES/ X / 2009, 06 Oktober 2009	24,120,000.00	1,206,000.00					1,206,000.00
8	CV. PELITA JAYA	Penyempurnaan Pustu Sabintang	309 / KTR - DINKES/ X / 2009, 06 Oktober 2009	21,943,000.00	1,097,150.00					1,097,150.00
9	CV. NUR FITRIANI	Rehabilitasi Pustu Je'ne Tallasa	306 / KTR - DINKES/ X / 2009, 06 Oktober 2009	21,943,000.00	1,097,150.00					1,097,150.00
10	CV. ARUNG MANDIRI	Penyempurnaan Pustu Patte'ne	313 / KTR - DINKES/ X / 2009, 06 Oktober 2009	21,943,000.00	1,097,150.00					1,097,150.00
11	CV. HAS FAMILY	Penyempurnaan Puskesmas Polombangkeng Utara Tahap II	311/KTR - DINKES/ X / 2009, 6 Oktober 2009	29,698,000.00	1,484,900.00					1,484,900.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
12	CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA	Perencanaan Teknis Penyempurnaan Puskesmas Parangbaddo, Penyempurnaan Ruang UGD Puskesmas Bulukunyi, Rehabilitasi Pustu Je'ne Tallasa dan Penyempurnaan Pustu Sabintang	SPMK NO. /KTR - DINKES/ VII / 2009, 8 Juli 2009	3,531,000.00	31,000.00					31,000.00
13	CV. DUTA KONSTRUKSI	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Pagar Puskesmas Pattoppkang, Rehabilitasi Pustu La'nyara,, Penyempurnaan Pustu Lakatong, Penyempurnaan Pustu Massamaturu.	SPMK NO. /KTR - DINKES/ VII / 2009, 8 Juli 2009	3,366,000.00	16,000.00					16,000.00
14	CV. TENRISAU KONSULTAN	Pengawasan teknis pembangunan Puskesmas Polut dan Penyempurnaan Puskesmas Towata	111/KTR - DINKES/ TU. 1 / VIII / 2008, 14 Juli 2008	31,100,000.00	3,213,480.00					3,213,480.00
	Tahun 2011			**76,700,000.00**	**3,835,000.00**				**0.00**	**3,835,000.00**
1	CV. PANDI TUNGGAL	Pemb.Lumbung Pangan Desa Cakura	089/KTR-DINKES/VIII/2011	35,000,000.00	1,750,000.00					1,750,000.00
2	CV. IRA UTAMA	Pemb.Pagar Kantor BPP Kec. Sanrobone	599/KTR-DINKES/APBD/V/2011	41,700,000.00	2,085,000.00					2,085,000.00
	Tahun 2019			**211,589,000.00**	**211,589,000.00**				**0.00**	**211,589,000.00**
1		Pengakuan utang belanja obat-obatan tahun 2019		211,589,000.00	211,589,000.00					211,589,000.00
	Tahun 2021			**2,897,100.00**	**2,897,100.00**	**0.00**			**2,897,100.00**	**0.00**
	Utang Non LS Tahun 2021									
1	Utang PDAM Kantor BKD			1,505,500.00	1,505,500.00				1,505,500.00	0.00
2	Utang PDAM Gudang farmasi			980,000.00	980,000.00				980,000.00	0.00
3	Utang PDAM RD Kadis Kesehatan			42,000.00	42,000.00				42,000.00	0.00
4	Utang PDAM Sekretariat PSC			112,400.00	112,400.00				112,400.00	0.00
5	Utang PDAM Puskesmas Polut			119,600.00	119,600.00				119,600.00	0.00
6	Utang PDAM Puskesmas Galut			137,600.00	137,600.00				137,600.00	0.00
7				0.00	0.00				0.00	0.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2022			**11,839,005,500.00**	**0.00**	**1,661,412,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,661,412,900.00**
	Utang LS Tahun 2022			**11,834,410,000.00**	**0.00**	**1,656,817,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,656,817,400.00**
1	CV. RAMA	Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Galesong Tahap I (DAU)	467/PPK-KTR-DK//SP/IX/2021, Tgl. 15 September 2021	11,834,410,000.00		1,656,817,400.00	0.00	0.00	0.00	1,656,817,400.00
	Utang Non LS Tahun 2022			**4,595,500.00**	**0.00**	**4,595,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,595,500.00**
1	UTANG PDAM KANTOR BKD			1,930,500.00		1,930,500.00				1,930,500.00
2	UTANG PDAM GUDANG FARMASI			1,396,900.00		1,396,900.00				1,396,900.00
3	UTANG PDAM RD KADIS KESEHATAN			50,500.00		50,500.00				50,500.00
4	UTANG PDAM SEKRETARIS PSC			233,100.00		233,100.00				233,100.00
5	UTANG PDAM PUSKESMAS POLUT			854,100.00		854,100.00				854,100.00
6	UTANG PDAM PUSKESMAS GALUT			50,500.00		50,500.00				50,500.00
	UTANG PDAM LABKESDA			79,900.00		79,900.00				79,900.00
3. Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle					**10,805,678,020.45**	**14,613,137,686.00**			**10,617,760,985.05**	**14,801,054,721.40**
	Tahun 2008			**4,264,050.00**	**4,264,050.00**				**0.00**	**4,264,050.00**
1	CV. MUHARRIZZAH PRIMA	Pembangunan Selasar Perawatan III		2,019,050.00	2,019,050.00					2,019,050.00
2	CV. SOLUSI KARYA MANDIRI	Pemeliharaan Pagar RSUD		2,245,000.00	2,245,000.00					2,245,000.00
	Tahun 2010			**126,333,000.00**	**6,316,650.00**				**0.00**	**6,316,650.00**
3	CV. INDAH LESTARI	Pembangunan Selasar		126,333,000.00	6,316,650.00					6,316,650.00
	Tahun 2012			**146,497,700.00**	**74,510,785.00**				**0.00**	**74,510,785.00**
4	CV. Nur Abdi Jaya	Rehab Ruang IGD		75,775,700.00	3,788,785.00					3,788,785.00
5	CV. Akram	Pengadaan Perlengkapan Kantor		70,722,000.00	70,722,000.00					70,722,000.00
	Tahun 2014			**2,001,771,000.00**	**99,988,550.00**				**0.00**	**99,988,550.00**
6	CV. MULYA UTAMA	Rehab Berat Gedung ICU		1,187,871,000.00	59,393,550.00					59,393,550.00
7	CV. PALANA	Pembuatan Garasi Parkir		29,700,000.00	1,485,000.00					1,485,000.00
8	CV. IRZHAL MAULANA KONSTRUKSI	Pembangunan drainase RSUD Takalar		187,500,000.00	9,275,000.00					9,275,000.00
9	CV. CITRA RATU MULIA	Pembuatan Pagar Depan RSUD Takalar		92,700,000.00	4,635,000.00					4,635,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
10	CV. NUR ABDI JAYA	Lanjutan Penimbunan Halaman Belakang RSUD Takalar		139,000,000.00	6,950,000.00					6,950,000.00
11	CV. GEMILANG UTAMA	Pembangunan Pagar dan Penimbunan Halaman belakang RSUD Takalar		215,900,000.00	10,795,000.00					10,795,000.00
12	CV. PANDI TUNGGAL	Dipdal selasar Gedung askes		99,500,000.00	4,975,000.00					4,975,000.00
13	'CV. NURUL ABADI	Rehab Selasar Penghubung Ruang Perawatan		24,800,000.00	1,240,000.00					1,240,000.00
14	CV. NANDAR JAYA	Rehab Selasar Penghubung ruang ICU		24,800,000.00	1,240,000.00					1,240,000.00
	Tahun 2017			**12,290,650.40**	**2,900,000.40**		**0.00**		**0.00**	**2,900,000.40**
15	CV. DUTA KONSTRUKSI	Pengawasan Pagar Depan RSUD.H.Padjonga Dg.Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2016		2,900,000.00	2,900,000.00		0.00			2,900,000.00
16	PT.GLOBAL SYSTECH MEDIKA	Pengadaan Alat Kesehatan		9,390,650.40	0.40		0.00			0.40
	Tahun 2018			**15,636,156,215.00**	**(63,000.00)**		**0.00**		**0.00**	**(63,000.00)**
17	CV. JAYA DININGRAT	Pengadaan Alat-Alat Bengkel (Sumber Dana DAU)	1296/445/PPK-RSUD/XI/2018	8,400,000.00	0.00					0.00
18	PT. RIDHO AGUNG UTAMA	Pengadaan Alat Kesehatan (Sumber Dana DAU)	1382/445/PPK-RSUD/XI/2018	3,795,000.00	0.00					0.00
19	PT.MURTI INDAH SENTOSA	Pengadaa Alat Kesehatan (Sumber Dana DAU)	1359/445/PPK-RSUD/XI/2018	9,329,526.00	(63,000.00)					(63,000.00)
20	PT. BOSWELL MAHAKARYA INDONESIA	Pembayaran Pengadaan Alat Kesehatan (Sumber dana DAK)	879/445/PPK.RSUD/VII/ 2018	92,131,491.00	0.00					0.00
21	PT.Kanza Sejahtera	Pembangunan Gedung Perawatan (Sumber Dana DAK)	1436/445/PPK-RSUD/XII/2018	15,472,596,449.00	0.00					0.00
22	PT. RIDHO AGUNG ABADI	Pembuatan Bak Kontrol dan Panel Listrik CSSD 2017	1239/PPK-RSUD/X/2017	49,903,749.00	0.00					0.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2021			**10,617,760,985.05**	**10,617,760,985.05**				**10,617,760,985.05**	**0.00**
	Saldo Utang Non LS 2021									
	Utang Belanja Barang dan jasa BLUD			10,617,760,985.05	10,617,760,985.05				10,617,760,985.05	0.00
	Tahun 2022			**14,613,137,686.00**	**0.00**	**14,613,137,686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,613,137,686.00**
	Utang Belanja Barang dan jasa BLUD								0.00	
	PT Enseval Putera Megatrading	Obat Obatan		823,470,946.00		823,470,946.00				823,470,946.00
	PT Parit Padang	Obat Obatan		870,575,878.00		870,575,878.00				870,575,878.00
	PT Rajawali Nusindo	Obat Obatan		677,355,269.00		677,355,269.00				677,355,269.00
	PT Mawar Pharmasindo	Obat Obatan		749,822,570.00		749,822,570.00				749,822,570.00
	PT Bina San Prima	Obat Obatan		247,045,077.00		247,045,077.00				247,045,077.00
	PT Anugrah Argon Medika	Obat Obatan		633,315,795.00		633,315,795.00				633,315,795.00
	PT Galoeh Husada Farma	Obat Obatan		254,988,250.00		254,988,250.00				254,988,250.00
	PT Merapi Utama Pharma	Obat Obatan		733,670,420.00		733,670,420.00				733,670,420.00
	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Obat Obatan		169,437,290.00		169,437,290.00				169,437,290.00
	PT Kimia Farma	Obat Obatan		626,014,774.00		626,014,774.00				626,014,774.00
	PT Ommo Makmur Jaya	Bahan Kimia		968,949,017.00		968,949,017.00				968,949,017.00
	PT Bryan Medikal	Bahan Kimia		152,508,498.00		152,508,498.00				152,508,498.00
	PT Jaya Tiga Putra Mandiri	Bahan Pakai Habis		138,341,500.00		138,341,500.00				138,341,500.00
	PT Duta Afiat	Bahan Pakai Habis		684,520,731.00		684,520,731.00				684,520,731.00
	PT Sinar Roda Utama	Bahan Pakai Habis		19,420,500.00		19,420,500.00				19,420,500.00
	PT Ismut Fito Medika	Bahan Pakai Habis		139,930,000.00		139,930,000.00				139,930,000.00
	PT Alprido Alkesindo	Bahan Pakai Habis		166,985,330.00		166,985,330.00				166,985,330.00
	PT Anugrah Salman Medika	Bahan Pakai Habis		875,788,550.00		875,788,550.00				875,788,550.00
	PT Alexa Medika	Bahan Pakai Habis		73,246,260.00		73,246,260.00				73,246,260.00
	PT Palagimata Medika Alta	Bahan Pakai Habis		402,112,359.00		402,112,359.00				402,112,359.00
	PT Sinar Panca Medika	Bahan Pakai Habis		442,354,000.00		442,354,000.00				442,354,000.00
	PT Tivan	Bahan Pakai Habis		75,867,462.00		75,867,462.00				75,867,462.00
	PT Mulya Husada Jaya	Bahan Pakai Habis		25,333,333.00		25,333,333.00				25,333,333.00
	PT Toba Medi Sarana	Bahan Pakai Habis		23,265,000.00		23,265,000.00				23,265,000.00
	PT. Primanru Jaya	Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis		133,919,866		133,919,866.00				133,919,866.00
	CV. Aksara Abadi	ATK		82,804,590		82,804,590.00				82,804,590.00
	PT Samator Gas Industri	Gas Oksigen dan LPG		253,458,000		253,458,000.00				253,458,000.00
	PT Surya Indotim Imex	Gas Oksigen dan LPG		177,299,955		177,299,955.00				177,299,955.00
	CV. Aksara Abadi	Cetakan		319,058,500		319,058,500.00				319,058,500.00
	BLUD RSUD HPDN (Pasien C	Penggantian Dana Pasien		204,227,016		204,227,016.00				204,227,016.00
	CV. Bulu Bulu	Bahan Pembersih / Chemical		27,506,000		27,506,000.00				27,506,000.00
	CV. Panrita Insan Cemerlang	Makan Minum Pasien		168,232,788		168,232,788.00				168,232,788.00
	CV. Zickha Anugerah	Makan Minum Pasien		343,150,819		343,150,819.00				343,150,819.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	CV Iftalink	Jaringan Komputer dan Display	024/445/RSUD/SPK/I/2022	15,124,800.00		15,124,800.00				15,124,800.00
	CV Aulia Mitra Sejahtera	Pemeliharaan Gedung	046/445/BLUDRSUD/I/2022	233,185,000.00		233,185,000.00				233,185,000.00
	Creative Komputer	Pemeliharaan Alat /mesin Kantor	037/445/RSUD/SPK/I/2022	33,555,240.00		33,555,240.00				33,555,240.00
	CV. Aulia Mitra Sejahtera	Alat Alat Listrik	028/445/RSUD/SPK/I/2022	43,050,000.00		43,050,000.00				43,050,000.00
	Kalampa Motor	Pemeliharaan Kendaraan	016/445/RSUD/PKS/I/2022	38,340,000.00		38,340,000.00				38,340,000.00
	PT Butta Panrannuangku Peru	Jasa Keamanan	011/445/RSUD/SPK/I/2022	90,000,000.00		90,000,000.00				90,000,000.00
	Catering Dian	Makan Minum Pertemuan	009/445/RSUD/SPK/I/2022	8,800,000.00		8,800,000.00				8,800,000.00
	PDAM Takalar	PDAM	Langganan / Tagihan Rutin	26,073,900.00		26,073,900.00				26,073,900.00
	CV. General Konsultan	General Konsultan Amdal	021/445/RSUD/PKS/I/2022	136,192,560.00		136,192,560.00				136,192,560.00
	BBLBK Makassar	Pemeriksaan Kultur dan Lab	031/445/RSUD/PKS/I/2022	5,435,000.00		5,435,000.00				5,435,000.00
	PT Granesia	Pemeriksaan Sampel	007/445/RSUD/PKS/I/2022	13,800,000.00		13,800,000.00				13,800,000.00
	CV. Iftalink	Internet	012/445/RSUD/SPK/I/2022	32,000,000.00		32,000,000.00				32,000,000.00
	UTD Rumah Sakit	Kegiatan Donor Darah		18,120,000.00		18,120,000.00				18,120,000.00
	Jasa Medik dan para Medik	Operasional BLUD/Belanja Pegawai		2,235,484,843.00		2,235,484,843.00				2,235,484,843.00
4. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman					**5,232,857,384.74**	**3,012,275,450.00**			**2,395,603,600.00**	**5,849,529,234.74**
	Tahun 2008			0.00	**409,732,370.00**				**0.00**	**409,732,370.00**
1	CV. AMIKA JOINTKONSTRUKSI	Lanjutan Pemb. Jembatan Gantung Bassara'			82,832,000.00					82,832,000.00
2	CV. LARUMANGE	Pengaspalan jalan dengan hotmix wilayah Galut			60.00					60.00
3	PT. BERIGITA SARI PERSADA	Paket 4 :			64,580,550.00					64,580,550.00
4	CV. MA'MINASATA	Pengaspalan jalan ibukota Kec. Galut (Jalan Dg. Masurung & Jl. H. Pudu)			4,372,500.00					4,372,500.00
5	CV. GILANG SARANA	Rehabilitasi deker plat ruas Malewang - Maronde			448,500.00					448,500.00
6	CV. NANDAR JAYA	Rehabilitasi Jembatan Balla Borong			2,464,050.00					2,464,050.00
7	CV. AMIKA JOINT KONSTRUKSI	Pemb. Plat Duicker Bonttokassi			553,700.00					553,700.00
8	CV. SATRIA GALESONG	Rehabilitasi Jembatan Mangindara			2,280,500.00					2,280,500.00
9	CV. HADJI CHAKEKE	Pas. Talud + Plat Duicker Lakatong			2,475,000.00					2,475,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
10	CV. FULLATI PUTRA MANDIRI	Pembauatan Duiker Plat Punaga-Salambu			820,000.00					820,000.00
11	CV. HAMDAN JAYA	Pembangunan Bendung Panaikang			9,000,250.00					9,000,250.00
12	CV. ANUGRAH	Pembangunan Bendung Sederhana Buakkang			5,406,650.00					5,406,650.00
13	CV. SYIFA UTAMA	Peningkatan Saluran Tersier			2,497,500.00					2,497,500.00
14	CV. MAHA KARYA ABADI	Rehabilitasi Bendung Pattene			4,370,800.00					4,370,800.00
15	CV. BATARA KARYA	Pembangunan Mess Pemda			14,937,500.00					14,937,500.00
16	CV. CAHAYA TIMUR UTAMA	Pembangunan Pintu Gerbang Takalar - Jeneponto			175,159,600.00					175,159,600.00
17	CV. TRIDA TAWAR PERKASA	Pembangunan Landskap Ibukota Kabupaten			-40.00					-40.00
18	CV. TUNGGAL PRATIWI	Pembangunan Taman Baca Desa Lakatong			515,000.00					515,000.00
19	CV. BUMI AKBAR PERSADA	Pembangunan Paving Blok Kel. Pallantikang			18,800,000.00					18,800,000.00
20	PT. MEGAPOLITAN NUGRAHA	Pembangunan PSAB Dusun Pandala Ds.Laikang			16,719,000.00					16,719,000.00
21	CV. MARSANIE LAW	Pembangunan MCK Ds Sawakung dan Banyuanyara			1,499,250.00					1,499,250.00
	Tahun 2009			**1,821,369,433.00**	**433,829,109.00**				**0.00**	**433,829,109.00**
22	CV. AIY ARTHA PERDANA	Pembangunan Kantor Perhubungan		171,717,000.00	8,585,850.00					8,585,850.00
23	CV. TAKALAR JAYA	Pembangunan MCK Dusun Bontosanra Kel. Maradekaya		17,500,000.00	875,000.00					875,000.00
24	CV. ADHYTIA	Pembangunan MCK Lingkungan Palemba kelurahan Pattallassang		17,500,000.00	875,000.00					875,000.00
25	CV. MANNURUKI JAYA	Pembangunan MCK lelang Ikan Ds. Gusung Desa Lakatong		17,500,000.00	875,000.00					875,000.00
26	CV. RAMAYANA	Pembangunan MCK Lelang Ikan Ongkoa Desa Laikang		17,500,000.00	875,000.00					875,000.00
27	CV. PATWA NIRWANA	Pembangunan MCK Dusun Kalukuang Desa kalukuang		17,500,000.00	875,000.00					875,000.00
28	CV. BINTANG SEJAHTERA UTAMA	Pembangunan MCK Dusun Pa'batangan Desa Patani		17,500,000.00	875,000.00					875,000.00
29	CV. CAHAYA TIMUR UTAMA	Pembangunan MCK Desa Maccinibaji		17,500,000.00	875,000.00					875,000.00
30	CV. YUNITA	Pembangunan MCK Lelang lamangkia		17,500,000.00	875,000.00					875,000.00
31	CV. ANUGRAH	Pembangunan MCK Dusun Tamajannang Desa Banyuanyara		17,500,000.00	875,000.00					875,000.00
32	CV. JAYA AGUNG	Pembangunan MCK kelurahan Pattallassang		17,500,000.00	875,000.00					875,000.00
33	CV. SYAFIRA NUR	Pembangunan MCK Desa Cikoang		14,970,000.00	748,500.00					748,500.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
34	CV. DELAPAN TUJUH	Pembangunan MCK PS. Jonggoa Desa Bila-Bilaya & Dusun Jongoa		35,000,000.00	1,750,000.00					1,750,000.00
35	CV. PROYEKSI	Pembangunan Jalan Perumahan Nelayan Desa Mangindara		37,500,000.00	25,650,000.00					25,650,000.00
36	CV. MULTI KARYA GEMILANG	Pembangunan Jalan Paving Blok Soreang Caddi		49,800,000.00	100,000.00					100,000.00
37	CV.BINTANG SEJAHTERA UTAMA	Pemasangan Paving Blok Kelurahan Palantikang		19,800,000.00	990,000.00					990,000.00
38	CV.MISNA KONSTRUKTION	Peningkatan Jalan Beton Wil.Dusun Kamp.ParangBarangmamase		186,999,000.00	121,549,350.00					121,549,350.00
39	CV.SEJATI ANUGRAH PRATAMA	Pengerasan Jalan Poros PanaikangPallantikang (Lanjutan) Kec.Pattallassang		26,090,000.00	1,304,500.00					1,304,500.00
40	CV. SEMBILAN BATE	Pengawasan Teknis		42,990,000.00	42,990,000.00					42,990,000.00
41	CV.ALENA JAYA KONSTRUKSI	Pembangunan Jembatan Gantung Bassara (Lanjutan) Kel.Sabintang Kec.Pattallassang		97,500,000.00	733,800.00					733,800.00
42	CV.RAGA UTAMA	Pembangunan/Rehab Duiker Plat Kel.Mattompodalle Kec.Polut		23,690,000.00	1,184,500.00					1,184,500.00
43	SWAKELOLA	Pemeliharaan jalan dan jembatan tersebar 9 kecamatan		342,738,113.00	28,913,313.00					28,913,313.00
44	CV. MITRA JASA MANDIRI	Rehab. Bendung Campagaya		40,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00
45	CV. CIPTA ANYGERAH MANDIRI	Rehab/Penggantian Pompa Pendorong SPAM Dusun Bontoberu Desa Cikoang		24,444,000.00	1,222,200.00					1,222,200.00
46	CV. MUNANDAR NUSANTARA	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Kapasita 1.5 Ltr/Detik SPAM Cikoang Desa Cikoang		49,983,920.00	2,499,196.00					2,499,196.00
47	CV. KARYA BERINGIN	Pengadaan Bahan Bangunan Untuk Pemeliharaan Irigasi yeng Telah terbangun		171,168,400.00	171,168,400.00					171,168,400.00
48	CV. SAMATURU MANDIRI	Pembangunan Sumur Bor Desa Lantang		20,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00
49	CV. ARYA AMALIA	Pembangunan STPDL Lantang II Desa Lantang		10,000,000.00	500,000.00					500,000.00
50	CV. ANUGRAH PELITA PERDANA	Pengadaan Bahan Material Pemasangan Paving Blok Jalan Desa Moncongkomba Kec. Polsel Kab. Takalar		38,209,000.00	1,000.00					1,000.00
51	CV. MATTOTORANG	Rehabilitasi Kantor Camat Marbo		138,770,000.00	6,938,500.00					6,938,500.00
52	CV. TRI PUTRI KENCANA	Pemeliharaan pengerasan jalan Sirtu		80,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00
53	CV. SOLUSI KARYA MANDIRI	Pemeliharaan pengerasan jalan sirtu Solonga Kec. Polut.		25,000,000.00	1,250,000.00					1,250,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2010			**1,146,670,000.00**	**55,101,150.00**				**0.00**	**55,101,150.00**
54	CV. MAROS	~Peningkatan Jalan Hotmix Panaikan-Bontorappo		593,533,000.00	29,676,650.00					29,676,650.00
55	CV. LANDI INDA KONSTRUKSI	~Pemeliharaan Jajan Sertu Ruas SMPN.3 Ko'mara Desa Ko'mara		69,850,000.00	3,492,500.00					3,492,500.00
56	CV. SATRIA GALESONG	~Pemeliharaan Jembatan Desa Mangindaran Kec.Gal.Selatan		44,987,000.00	17,000.00					17,000.00
57	CV. MARIO	~Pembayaran Tahap I 95 % Pekerjaan Pemeliharaan Plat Duiker Jalan Wilayah Ko'mara Kec.Pol.Utara		22,130,000.00	1,106,500.00					1,106,500.00
58	CV. BENTENG SANROBONE	~Rehabilitasi Jembatan Desa Boddia Kec.Galesong Selatan Kab.Takalar		24,610,000.00	1,230,500.00					1,230,500.00
59	CV. CITRA KARYA MANDIRI	~Pemeliharaan Jembatan Malolo Towa Kec.Polut.Kab.Takalar		16,950,000.00	847,500.00					847,500.00
60	CV. CITRA RATU MULIA	~Pembukaan Badan Jalan Wilayah Sabintang Kec.Pattallassang		11,677,000.00	583,850.00					583,850.00
61	CV. ARI ARTHA KENCANA	~ Rehab Bendung Sederhana DI Pa'lilangi		362,933,000.00	18,146,650.00					18,146,650.00
	Tahun 2011			**2,961,810,000.00**	**26,602,700.00**				**0.00**	**26,602,700.00**
62	PT.ATHIRA KASYLA	1 PAKET	343/KTR/11/344/SPMK/11	1,105,428,000.00	1,310,000.00					1,310,000.00
62	CV.NOOR DYAN UTAMI	~Rehabilitasi Duiker Palat Solonga - Tamasongo	.782/KTR/2011,783/SPK/11	6,433,000.00	321,650.00					321,650.00
62	CV.CITRA RAMA LESTARI	~Pengerasan Jalan Sertu Jln.Desa Kalukuang	621/ktr/2011,622/SPMK/11	66,061,000.00	3,303,050.00					3,303,050.00
63	CV.PUTRA JAYA	~Peningkatan Jalan Hotmix Palleko-Malolo (Lanjutan)	750/KTR/11, 751/SPMK/2011	1,427,808,000.00	3,864,000.00					3,864,000.00
64	CV.AIY ARTHA PERDANA	~Pekerjaan Talud Abrasi Sungai Tana Tana	735/KTR/11,736/SPMK/11	48,925,000.00	2,446,250.00					2,446,250.00
65	CV.SYAFIRAH NUR	Biaya Pemeliharaan Talud Ruas Jalan Wilayah Kel.Patte'ne Kec. Polsel Kab.Takalar	42/KTR/2011,43/SPMK/2011	33,884,000.00	1,694,200.00					1,694,200.00
66	CV.ARYA	Pemeliharaan Jembatan Desa Parangmata Kec.Galesong	101/KTR/2011,102/SPMK/2011	25,546,000.00	1,277,300.00					1,277,300.00
67	CV.SYAFIRAH NUR	Biaya Pemeliharaan Jembatan Kayu Kel.Takalar Mapsu	127/KTR/11,128/SPMK/2011	17,125,000.00	856,250.00					856,250.00
68		~Pemeliharaan Jajan Sertu Ruas SMPN.3 Ko'mara Desa Ko'mara		69,850,000.00	3,492,500.00					3,492,500.00
69	CV.ZAHRA PUTRA UTAMA	~Rehab.Kantor Desa Topejawa	738/KTR/2011,739/SPMK/11	29,950,000.00	1,497,500.00					1,497,500.00
70	CV.SURYA SAKTI	~Pemb.Pagar Kantor Kec.Polsel	182/KTR/2011,183/SPMK/11	49,950,000.00	2,497,500.00					2,497,500.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
71	CV.BULU-BULU	~Pemb.Pagar Ex Pasar Palleko	80/KTR/11,81/SPMK/11	49,950,000.00	2,497,500.00					2,497,500.00
72	CV.PARANGMATA KONSTRUKSI	~Pemb.Kamar WC.Rumah Adat Karaeng Galesong	694/KTR/2011,695/SPMK/2011	15,950,000.00	797,500.00					797,500.00
73	CV.IRA UTAMA	~Pembanunan Pagar Belakang Rumah Jabatan Sekda Yang Baru	700/KTR/2011,701/SPMK/2011	14,950,000.00	747,500.00					747,500.00
	Tahun 2012			**601,500,000.00**	**30,075,000.00**				**0.00**	**30,075,000.00**
80	CV. HAS FAMILY	~Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kab. Takalar		199,500,000.00	9,975,000.00					9,975,000.00
81	CV.WIRA	~Pembangunan Saluran Pembuang Bontokaddopepe Kec.Galut Kab.Takalar		44,900,000.00	2,245,000.00					2,245,000.00
82	CV.GUSUNG INDAH	~Pembangunan Pengaman Pantai Desa Mangindara Kec.Galsel Kab.Takalar		49,900,000.00	2,495,000.00					2,495,000.00
83	CV.FATNUR SEJAHTERA	~Pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Lakatong Kab.Takalar		39,900,000.00	1,995,000.00					1,995,000.00
84	CV.RAHMAT JAYA	~Rehabilitasi Kantor Lurah Pattallassang Kab.Takalar		44,900,000.00	2,245,000.00					2,245,000.00
85	CV.DISTRA PRATAMA	~Rehabilitasi Kantor Desa dan Pengadaan Mobiler untuk Desa Galesong Baru Kec.Galesong Kab.Takalar		27,700,000.00	1,385,000.00					1,385,000.00
86	CV.HAS FAMILY	~Penambahan Ruangan Gudang Kantor Samsat Kab.Takalar		90,650,000.00	4,532,500.00					4,532,500.00
87	CV. BUMBUNG INDAH	~ Pekerjaan Rehabilitasi Barugaya Pallantikang Karaeng Loe (Belakang SMP 1 Takalar)		27,250,000.00	1,362,500.00					1,362,500.00
88	CV.ZAHRA PUTRI UTAMA	~Rehabilitasi Balai Pertemuan Desa Panyangkalang		45,400,000.00	2,270,000.00					2,270,000.00
89	CV.AMROEL JAYA UTAMA	~Pemasangan Paving Blok dan Drainase Desa Bontolanra Kab.Takalar		31,400,000.00	1,570,000.00					1,570,000.00
	Tahun 2013			**2,465,177,000.20**	**121,833,850.01**				**0.00**	**121,833,850.01**
90	CV. AIY ARTHA PERDANA	Drainase Desa Belaka Desa Towata		44,750,000.00	2,237,500.00					2,237,500.00
91	CV. MUSKAL JAYA	Drainase Dusun Jamarang Kel. Bontolebang Kec. Galut		35,900,000.00	1,795,000.00					1,795,000.00
92	CV. MUTMAINNA UTAMA	Peningkatan Saluran Pembuang D. I. Kampung Bugisi di Canrego		49,750,000.00	2,487,500.00					2,487,500.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
93	CV. SAMATURU MANDIRI	Pembangunan Sumur Pompa Tangan Dalam Ujung Bori Kel. Bulukunyi dan Pengadaan Sumur Bor Lingkungan Kalebalang Kel. Botokadatto		32,400,000.00	1,620,000.00					1,620,000.00
94	CV. NURHALIFAH	Pembangunan Sumur Pompa Tangan Dalam Desa Lamangkia Desa Topejawa dan Dusun Bontomanai Desa Lengkese		27,000,000.00	1,350,000.00					1,350,000.00
95	CV. EKA CIPTA	Optimalisasi SPAM Kel. Parangluara		29,750,000.00	1,487,500.00					1,487,500.00
96	CV. CITRA RAMA LESTARI	Pembayaran Tahap I (Pertama) 95% Biaya Pembangunan Drainase Ballo I Kab. Takalar		92,760,000.00	4,638,000.00					4,638,000.00
97	CV. FACHRUL YASFAT KONSTRUKSI	Pembayaran Uang Muka 30% Biaya Drainase Jl. Mappajalling Daeng Kawang Kab. Takalar		120,750,000.00	6,037,500.00					6,037,500.00
98	CV. ANGGREK MERAH	Pembayaran Uang Muka 30% Biaya Perbaikan Drainase Dalam Kota		92,750,000.00	4,637,500.00					4,637,500.00
99	Direktur CV. PALANA	Pembayaran Tahap I (Pertama) 95% Biaya Penimbunan dan Peninggian Sistem Saluran Drainase Jl. Jend. Sudirman Kab. Takalar		51,800,000.00	2,590,000.00					2,590,000.00
100	CV. ALIFAH KONSTRUKSI	Pembayaran Tahap I (Pertama) 95% Biaya Pembangunan Saluran Drainase Ballo II		124,000,000.00	6,200,000.00					6,200,000.00
101	RESKYA MANDIRI (2013)	- Lanjutan Pemb. Kantor Desa Lassang Barat dan Desa Kadatong		61,000,000.00	3,050,000.00					3,050,000.00
102	CV. PALANA	Rehab. Pagar SDI Kota (Pembangunan)		29,500,000.00	1,475,000.00					1,475,000.00
103	CV. Farid Pratama	Rehab Ringan Kantor Desa Bontokanang Gal-Sel		18,400,000.00	920,000.00					920,000.00
104	CV. PALAMPANG JAYA	Pekerjaan Desain Interior Mess Pemda di Jakarta		74,800,000.00	3,740,000.00					3,740,000.00
105	CV. FACHRUL YASFAT KONSTRUKSI	Pembangunan Konstruksi Penahan Tanah (Talud) TPA Balang Kab. Takalar		41,700,000.00	2,085,000.00					2,085,000.00
106	CV. ANGGREK MERAH	Biaya Pembangunan Tempat Sampah (TPS)		13,220,000.00	661,000.00					661,000.00
107	CV. CIPTA JAYA KARYA	Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Mangadu - Jonggoa (Lanjutan)		1,165,547,000.20	58,277,350.01					58,277,350.01
108	CV. MAMMINASATA	Pembuatan Talud dan Penimbunan Jalan Desa Campagaya Kel. Galesong		69,700,000.00	3,485,000.00					3,485,000.00
109	CV. ANUGERAH INTI UTAMA	Peningkatan Jalan Sirtu Ruas Poros Pa'gentungan Desa Kp. Beru - Parangbaddo		92,700,000.00	4,635,000.00					4,635,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
110	CV. DEVANT	Pembuatan Talud Depan Kantor Kecamatan Mapsu (Lanjutan)		34,900,000.00	1,745,000.00					1,745,000.00
111	CV. ANUGERAH INTI UTAMA	Pembuatan Plat Duiker Kampung Beru		39,800,000.00	1,990,000.00					1,990,000.00
112	CV. EKA KARYA CIPTA	Pembangunan Jembatan Campagaya Kel. Pattene Kab. Takalar		89,800,000.00	4,490,000.00					4,490,000.00
113	CV. TORINDO NUSANTARA	Pembangunan Jembatan Kayu Cambaloe Ds. Balangtanaya Kec. Mapsu		32,500,000.00	200,000.00					200,000.00
	Tahun 2015			**8,703,910,000.00**	**602,797,500.00**				**0.00**	**602,797,500.00**
	A. Tahun 2015 Murni			**8,689,110,000.00**	**587,997,500.00**				**0.00**	**587,997,500.00**
114	CV. UCHY SUKSES ABADI	Pembangunan Talud Taman Palleko	1033/KTR-DAU/PUK-BM/X/2014	99,800,000.00	4,990,000.00					4,990,000.00
115	CV. IRZAL MAULANA KONSTRUKSI	Pembuatan Talud Tebing Palleko Depan Dolog	1035/KTR-DAU/PUK-BM/X/2014	69,800,000.00	3,490,000.00					3,490,000.00
116	CV. CAHAYA BUANA LINTAS	Pembuatan Trotoar	839/KTR-DAU/PUK-BM/X/2014	69,900,000.00	3,495,000.00					3,495,000.00
117	CV. ANDARICA WARGA	Peningkatan Jalan Beton Ruas Panjo'jo Lassang (Lanjutan)	497/KTR-DAUPUD-BM/VI/2014	712,603,000.00	35,630,150.00					35,630,150.00
118	CV. CITRA LESTARI MANDIRI	Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Parangbaddo-Kampungberu dan Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Malewang-Borongbaji (Lanjutan)	503/KTR-DAU/PUD-BM/VI/2014	728,422,000.00	36,421,100.00					36,421,100.00
119	CV. CIPTA JAYA KARYA	Peningkatan Jalan Kompleks Rujab Bupati dan Dinas PU Takalar	515/KTR-DAU/PUD-BM/VI/2014	774,656,000.00	38,732,800.00					38,732,800.00
120	CV. BINTANG REZKI	Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Desa Aengtowa Kec. Galut, Aeng batu-batu-Bontolanra, Bontokassi-Bontomarannu	519/KTR-DAU/PUD-BM/VII/2014	1,512,652,000.00	75,632,600.00					75,632,600.00
121	CV. UCHI SUKSES ABADI	Jalan Sirtu Bontoa Ballo II	384/KTR-DAU/PUD-BM/IV/2014	74,800,000.00	3,240,000.00					3,240,000.00
122	CV. TRIPUTRA	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung 9 Paket	418/KTR-DAU/PU-CK/III/2015	15,500,000.00	15,500,000.00					15,500,000.00
123	CV. ELANG PERKASA INDOSAKTI	Rehabilitasi Kantor Bupati	783/KTR-DAK/PU-CK/X/2014	4,489,817,000.00	224,490,850.00					224,490,850.00
124	TRIPUTRA JAYA	Pengawasan Teknis Pekerjaan Perbaikan Drainase 6 Paket Tersebar dalam Wilayah Kab. Takalar		28,700,000.00	28,700,000.00					28,700,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
125	CV. ARCHINDO KARYA PRATAMA	Perencanaan Teknis 8 Paket Pekerjaan	1507/KTR-DAU/PU-CK/X/2015	14,900,000.00	14,900,000.00					14,900,000.00
126	CV. NUR ABDI JAYA	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Massamaturu			3,600,000.00					3,600,000.00
127	CV. AUFA MULTI ARTHA	Pembangunan Saluran Air Tertutup Ds. Pa'batangang Mapsu	725/KTR-DAU/XI/2014		1,615,000.00					1,615,000.00
128	CV. CAKRAWALA SILAJA	Perencanaan Teknis Pekerjaan Talud dan Oprit Jembatan Panjarungan dan Perbaikan Jembatan Pangkarode Pattene		9,800,000.00	9,800,000.00					9,800,000.00
129	CV. GARIS BUMI CONSULTAN	Perencanaan Teknis :		43,210,000.00	43,210,000.00					43,210,000.00
130	CV. AQILLAH SEJAHTERA	Perencanaan Teknis embuatan Trotoar dalam Kota Takalar, Lanjutan Trotoar Depan Balla Lompoa Galesong dan Peningkatan Median Jalan Terminal Kalampa	075/KTR-DAU/PUK-BM/III/2015	12,900,000.00	12,900,000.00					12,900,000.00
131	CV. HOMAZ	Pengawasan Teknis	1549/KTR-DAK/PUK-BM/VIII/2015	27,200,000.00	27,200,000.00					27,200,000.00
132	PT. ARISTA CIPTA	Pengawasan Teknis Proteksi Pengaman Tanggul Sungai Sagge Bongga Galut (Lanjutan)	1709/KTR-DAU/PUK-SDA/IX/2015	4,450,000.00	4,450,000.00					4,450,000.00
	B. Koreksi Utang 2015			**14,800,000.00**	**14,800,000.00**				**0.00**	**14,800,000.00**
133		Pengawasan Teknis Rehabilitasi Bendung Jenetallasa D.I Jenetallasa		14,800,000.00	14,800,000.00					14,800,000.00
	Tahun 2018			**1,049,125,000.00**	**1,049,125,000.00**		**0.00**	**0.00**	**1,049,105,000.00**	**20,000.00**
134	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Ruas Palleko - Malolo (Lanjutan)	102/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 23 Juli 2018	150,287,500	150,287,500.00		03637/SP2D/LS-BARANG-JASA/Xii/2021	07/12/2021	150,287,500.00	-
	PT. DWINUR HASKA	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Ruas Bontonompo - Tana Tana	104/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 30 Juli 2018	203,775,000	203,775,000.00		03378/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021	19/11/2021	203,755,000.00	20,000
	CV. FIRMA KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Ruas Towata - Jenemaeja	106 \/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 30 Juli 2018	130,900,000	130,900,000.00		03326/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021	22/11/2021	130,900,000.00	-

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	PT. MAHAPANI KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Kunjung - Parappa	114/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 23 Juli 2018	110,412,500	110,412,500.00		03369/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021	19/11/2021	110,412,500.00	-
	PT. HEXA MULIA KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Ruas Bontokassi - Kalukubodo	116/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 30 Juli 2018	216,700,000	216,700,000.00		03433/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021	30/11/2021	216,700,000.00	-
	CV. WIRA KAMIL KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Ruas Julumata - Pangkajene	118/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 23 Juli 2018	99,770,000	99,770,000.00		03565/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021	30/11/2021	99,770,000.00	-
	PT. TRIKONS INDO PRATAMA	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Lantang Selatan - Lantang Utara	124/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 30 Juli 2018	137,280,000	137,280,000.00		03334/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021	22/11/2021	137,280,000.00	-
	Tahun 2019			**878,637,795.73**	**0.73**				**0.00**	**0.73**
135	CV. MULTIGUNA KONSTRUKSI	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tersebar Di 9 Kecamatan Di Kab. Takalar (DAU)	15/KTR-DAU/DPUPRPKP-PKP/XI/2019	878,637,795.73	0.73				0.00	0.73
	Utang Non LS Tahun 2019									
	Utang PDAM	Beban jasa air bulan Desember 2019		0.00	0.00				0.00	0.00
	Utang Listrik			0.00	0.00					0.00
	Tahun 2020			**451,053,800.00**	**99,584,100.00**				**0.00**	**99,584,100.00**
136	CV. NAFAS PERDANA NUSANTARA	Perencanaan Teknis Penataan dan Pengaturan RTH 1 (Perencanaan Teknis Penataan Lapangan Sepakbola Bauru Kr. Magau Bontolebang)	01/KTR-DAU/DPUPRPKP-TR/II/2020, 07 Februari 2020	9,000,000.00	0.00					0.00
137	CV. MATRA DESAIN	Pengawasan Teknis Penataan dan Pengaturan RTH 1 (Pengawasan Teknis Penataan Lapangan Sepakbola Bauru Kr. Magau Bontolebang)	03/KTR-DAU/DPUPRPKP-TR/II/2020, 18 Februari 2020	7,000,000.00	0.00					0.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
138	CV. TUJUH LIMA CONSULTANT	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase 2 (Pekerjaan Drainase Lanjutan Karaeng Manepasa, Drainase Jambua, Pekerjaan Drainase Jene Maeja, Pek. Drainase Dusun Bontowa Desa Komara Polut).	18/KTR-DAU/DPUPRPKP-CK/VIII/2020	27,940,000.00	0.00					0.00
139	KKM CAMPAGAYA	Pengadaan sarana prasarana air bersih (PAMSIMAS) Desa Campagaya Kec. Galesong Kab. Takalar	15/KTR-DAU/DPUPRPKP-CK/VII/2020, 17 Juli 2020	306,700,000.00	0.00					0.00
140	CV. DARMA CITRA UTAMA	Survei Kondisi Jalan Wilayah 1 (Daerah Pesisir Kec. Galut, Kec. Galesong, Kec. Galsel, Kec. Sanrobone, Kec. Mapsu, Dan Kec. Marbo)	15/KTR-DAU/DPUPRPKP-BM/XII/2020, 11 Desember 2020	99,584,100.00	99,584,100.00					99,584,100.00
										0.00
	Utang Non LS Tahun 2020									**0.00**
	Utang PDAM	Beban jasa air bulan Desember 2020		829,700.00	0.00					0.00
	Utang Listrik			0.00	0.00					0.00
	Tahun 2021			**7,521,511,400.00**	**2,404,176,605.00**		**0.00**	**0.00**	**1,346,498,600.00**	**1,057,678,005.00**
141	CV. NUR AQILAH PUTRI NIENIR	Pek. Jalan Lapen Kampung Baru	83/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XII/2021, 01 Desember 2021	178,208,700.00	178,208,700.00					178,208,700.00
142	CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN	- Pengawasan Teknis Pek. Jalan Lapen Kampung Baru - Pengawasan Teknis Pek. Talud Bontowa Ko,mara - Pengawasan Teknis Pek. Talud Kel. Pattene Kec. Polongbangkeng Selatan - Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Manyampa	84/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XII/2021, Tanggal 01 Desember 2021	16,962,000.00	3,392,400.00				0.00	3,392,400.00
143	CV. CAKRA RAHWANA KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pengaspalan Jalan Lapen Ujung Baji Sanrobone	99/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XII/2021, Tanggal 06 Desember 2021	22,400,000.00	11,200,000.00				0.00	11,200,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
144	CV. CAKRA RAHWANA KONSULTAN	- Pengawasan Teknis Pengaspalan Jalan Lapen Kp. Beru Kec. Polongbangkeng Utara - Pengawasan Teknis Pengaspalan Jalan Lapen Parangmata	88/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XII/2021, Tanggal 06 Desember 2021	22,700,700.00	11,350,350.00				0.00	11,350,350.00
145	CV. HS CONSULTANT	- Pengawasan teknis Pek. Rabat Beton Dusun Barangmamase - Pengawasan teknis Pek. Rabat Beton Dusun Untia - Pengawasan teknis Pek. Talud tamalate mangadu - Pengawasan Teknis Pek. Jalan Lapen di Desa Bontoparang - Pengawasan teknis Pengasapalan Jalan Lapen Samping Kantor Lurah Pattallassang	82/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XII/2021, 02 Desember 2021	20,450,000.00	20,450,000.00					20,450,000.00
146	CV. CAKRA RAHWANA KONSULTAN	- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Parangbambe - Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix SMP 3 Bontosunggu	102/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XII/2021, Tanggal 06 Desember 2021	66,600,600.00	33,300,300.00				0.00	33,300,300.00
147	CV. KARAENG PANRITAYA	- Belanja Hibah,Pengawasan Teknis Rehab Ruang Tahanan Anak, - Belanja Hibah,Pengawasan teknis Pek,Bangunan Kantor Kodim	129/SPK-DAU/PPK/DPUPRPKP-CK/XII/2021, 02 Desember 2021	8,415,000.00	8,415,000.00					8,415,000.00
148	CV. PURINA CONSULTANT ENGINEERING	Pengawasan Teknik Pemb. Paving Block (Pasar Rakyat Tepo)	130/SPK-DAU/PPK/DPUPRPKP-CK/XII/2021, Tanggal 07 Desember 2021	26,000,700.00	10,400,280.00				0.00	10,400,280.00
149	PT. NARAYANA ADICIPTA	PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)	04/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP/TR/VII/2021, Tanggal 12 Juli 2021	1,371,997,000.00	205,799,550.00				0.00	205,799,550.00
150	CV. PURINA CONSULTANT ENGINEERING	Pengawasan Pembangunan paving Block jalan masuk Rusus masyarakat Persisir Desa Bontosunggu, Kec.Galesong Utara	006/SPK/PPK-PKP/DPUPRPKP/2021, Tanggal 06 Desember 2021	3,370,000.00	3,370,000.00					3,370,000.00
151	CV. GEOMETRI KARYA	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Atap Kantor Bupati	54/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-CK/VII/2021, Tanggal 21 Juli 2021	38,197,500.00	2,673,825.00				0.00	2,673,825.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
152	CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI	Rehabilitasi Atap Kantor Bupati	51/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-CK/VII/2021, Tanggal 21 Juli 2021	1,373,638,000.00	206,045,700.00		05195/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2022	30/12/2022	206,045,700.00	0.00
153	CV. MEGA JAYA PRATAMA	Peningkatan Jalan Beton Ruas Galesong - Ta'bucini	34/KTR-DAK/DPU.PRPKP - BM/V/2019, 21 Mei 2019	786,468,000.00	550,527,600.00				0.00	550,527,600.00
154	CV. FIRMA KONSULTAN	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Beton Ruas Galesong - Ta'buncini	33/KTR-DAK/DPUPRPKP-BM/V/2019, 21 Mei 2019	18,590,000.00	18,590,000.00					18,590,000.00
155	CV. DARMA CITRA UTAMA	Survei Kondisi Jalan Wilayah 1 (Daerah Pesisir Kec. Galut, Kec. Galesong, Kec. Galsel, Kec. Sanrobone, Kec. Mapsu, Dan Kec. Marbo)	15/KTR-DAU/DPUPRPKP-BM/XII/2020, 11 Desember 2020	99,584,100.00	99,584,100.00		Dobel catat 2022		99,584,100.00	0.00
156	PT. CAHAYA SEPPANG BULUKUMBA	Peningkatan Jalan Ruas Bantinoto-Rajaya	03/SP-DAK/PPK/DPUPRPKP-BM/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021	3,467,229,000.00	1,040,168,700.00		03888/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2022	06/12/2022	1,040,168,700.00	0.00
										0.00
	Utang PDAM	Beban jasa air bulan Desember 2021		700,100.00	700,100.00		0.00		700,100.00	0.00
	Utang Listrik			0.00	0.00					0.00
	Tahun 2022			**11,666,947,200.00**	**0.00**	**3,012,275,450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,012,275,450.00**
157	CV. MEGA JAYA PRATAMA	Peningkatan Jalan Ruas Taroang - Campagayya, Peningkatan Jalan Ruas Bontoloe-Bontomangape	054/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/IX/2021, Tanggal, 30 September 2021	10,735,400,000.00	0.00	2,683,850,000.00				2,683,850,000.00
158	CV. PURINA CONSULTANT ENGINEERING	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Bontoloe - Bontomangape	56/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/IX/2021, Tanggal 30 September 2021	99,660,000.00	0.00	24,915,000.00				24,915,000.00
159	CV. KARAENG PANRITAYA	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Taroang - Campagayya	57/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/X/2021, Tanggal 01 Oktober 2021	99,495,000.00		24,783,000.00				24,783,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
160	CV. FILIA CONSULTINDO	Pengawasan Teknis Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Pembangunan Broncaptering/Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi 2	097/SPK-DAK/PPK/DPUPRPKP-CK/VII/2022 , 19 Juli 2022	31,940,000.00		31,940,000.00				31,940,000.00
161	CV. LIMA PERISAI KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pek. Drainase Anaung Pabundukang, Kec. Polongbangkeng Selatan,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Masalleng Kel. Takalar Lama,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Sawakung Beba (Lanjutan),Pengawasan Teknis Pek. Drainase Sompu,Pengawasan Teknis Drainase Kelurahan Palleko, Kec. Pol-Ut,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Kelurahan Sombalabella,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Desa Lengkese,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Kelurahan Mangadu, Kec. Mangarabombang,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Kel. Panrannuangku	5053/KONTRAK/PPK-CK/DPUTRPKP/XII/2022, 20 Desember 2022	37,407,000.00		37,407,000.00				37,407,000.00
162	CV. LIMA PERISAI KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Bontosunggu, Pa'rappunganta,Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Kel. Bulukunyi,Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Kel. Pattalassang,Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Massalongko, Desa Pa'rappunganta	5034/KONTRAK/PPK-CK/DPUTRPKP/XII/2022, 12 Desember 2022	14,985,000.00		14,985,000.00				14,985,000.00
163	CV. FILIA CONSULTINDO	Pengawasan Teknis Pemb. Pendopo Ruiab Ketua DPRD,Pengawasan Teknis Pemb. Parkiran Rujab Ketua DPRD,Pengawasan Teknis Pemeliharaan Plafond Balla Lompoa,Pengawasan Teknis Rehab Rumah Dinas Kejaksaan (Lanjutan)	5031/KONTRAK/PPK-CK/DPUTRPKP/XII/2022, 12 Desember 2022	27,972,000.00		27,972,000.00				27,972,000.00
164	CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Desa Palalakkang,Pengawasan Teknis Pek.Paving Block Pekuburan Sompu	5033/KONTRAK/PPK-PKP/DPUTRPKP/XII/2022, 13 Desember 2022	5,300,000.00		5,300,000.00				5,300,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
165	CV. ANTERA	Pengawasan Teknis Pek. Drainase BTN Balindah,Pengawasan Teknis Perbaikan Drainase Jalan Sawi	5032/KONTRAK/PPK-PKP/DPUTRPKP/XII/2022, 13 Desember 2022	7,414,000.00		7,414,000.00				7,414,000.00
166	CV. LIMA PERISAI KONSULTAN	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Alun-Alun	137/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-CK/XI/2022, 18 November 2022	30,552,000.00		30,552,000.00				30,552,000.00
167	CV. ANTERA	Perencanaan Teknis Pek. Paving Block Desa Palalakkang,Perencanaan Teknis Pek.Paving Block Pekuburan Sompu	4846/KONTRAK/PPK-PKP/DPUTRPKP/XI/2022, 23 November 2022	7,481,400.00		7,481,400.00				7,481,400.00
168	CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN	Perencanaan Teknis Pek. Drainase BTN Balindah,Perencanaan Teknis Perbaikan Drainase Jalan Sawi	4830/KONTRAK/PPK-PKP/DPUTRPKP/XI/2022, 23 November 2022	9,956,700.00		9,956,700.00				9,956,700.00
169	CV. DIFAN PRATAMA	Pek. Paving Block Jalan Pekuburan Limbungan, Pallantikang	4398/KONTRAK/PPK-PKP/DPUPRPKP/IX/2022, Tanggal 07 September 2022	87,890,000.00		17,578,000.00				17,578,000.00
170	CV. CAKRA RAHWANA KONSULTAN	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Sombala Bella - Tala (PEN)	3939/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/IV/2022 Tanggal 11 April 2022	92,400,000.00		23,100,000.00				23,100,000.00
171	CV TRI NUR HASGA	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Tepo - Cikoang (PEN)	3897/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/IV/2022, Tanggal 11 April 2022	125,620,000.00		12,562,000.00				12,562,000.00
172	PT. INOVASI KONSULINDO RAYA	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Bantinoto - Rajayya (PEN)	3893/SPK-PEN/PPK/DPUPRPKP-BM/IV/2022, Tanggal 11 April 2022	223,327,500.00		22,332,750.00				22,332,750.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
173	CV. ZIKRA UNIVERSAL KONSULTAN	Perencanaan Teknis Perintisan Jalan Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kec. Galut	4801/SP-DAU/PPK/DPUPRP KP-BM/XI/2022, Tanggal 18 November 2022	22,022,400.00		22,022,400.00				22,022,400.00
174	CV. LIMA PERISAI KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pek. Parkiran Polres (Samping BRI) dan Pek. Pagar Kuburan, Pariangan, Ballo	60/SPK-DAU/PPK/DPUPRP KP-CK/VIII/2021, 21 Agustus 2021	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00				6,580,000.00
						0.00				0.00
	Utang PDAM	Beban jasa air bulan Desember 2021		1,544,200.00	0.00	1,544,200.00	0.00			1,544,200.00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					**22,259,400.00**	**118,900.00**			**1,109,400.00**	**21,268,900.00**
1	Utang Belanja Modal				21,150,000.00				0.00	21,150,000.00
	Utang PDAM 2021			1,109,400.00	1,109,400.00				1,109,400.00	0.00
	Utang PDAM 2022			118,900.00	0.00	118,900.00			0.00	118,900.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					**1,244,000.00**	**141,100.00**			**1,244,000.00**	**141,100.00**
	Utang Tagihan Internet 2021			1,244,000.00	1,244,000.00				1,244,000.00	0.00
	Utang PDAM 2022			141,100.00	0.00	141,100.00			0.00	141,100.00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					**44,500.00**	**94,900.00**			**44,500.00**	**94,900.00**
	Utang PDAM 2021			44,500.00	44,500.00				44,500.00	0.00
	Utang PDAM 2022			94,900.00	0.00	94,900.00			0.00	94,900.00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan					**299,412,134.00**	**0.00**			**90,000,000.00**	**209,412,134.00**
	Tahun 2008			**0.00**	**2,435,000.00**				**0.00**	**2,435,000.00**
1	CV. PRIMA UTAMA	Pembangunan Pos IB (Pemeliharaan)			2,435,000.00					2,435,000.00
	Tahun 2009			**497,405,000.00**	**24,870,250.00**				**0.00**	**24,870,250.00**
1	CV. HATI MULIA	Jaringan Irigasi Desa	521.1497.KTR.PK.10.09 08-Okt-2009	262,148,000.00	13,107,400.00					13,107,400.00
2	CV. USNUL KHATIMAH	Jalan Usaha Tani bt.kadatto	521.1555.KTR.PK.11.09 09-Nov-2009	48,821,000.00	2,441,050.00					2,441,050.00
3	CV. BONTOMATE'NE INDAH	Jalan Usaha Tani	521.1556.KTR.PK.11.09 09-Nov-2009	46,686,000.00	2,334,300.00					2,334,300.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
4	CV. RAHMAN PUTRA WAHID	Jalan Usaha Tani	521.1554.a.KTR.PK .11.09 09-Nov-2009	49,900,000.00	2,495,000.00					2,495,000.00
5	CV. SOLUSI KARYA MANDIRI	Jalan Usaha Tani	521.1556.a.KTR.PK .11.09 09-Nov-2009	49,900,000.00	2,495,000.00					2,495,000.00
6	CV. NURFITRIANI	Talud Jalan Usaha Tani	521.1663.a.KTR.PK .11.09 09-Nov-2009	39,950,000.00	1,997,500.00					1,997,500.00
	Tahun 2010			**136,304,875.00**	**6,815,244.00**				**0.00**	**6,815,244.00**
	Dinas Ketahanan Pangan									
1	CV. INDAH LESTARI	Pemb.Lumbung Pangan Desa Cakura		94,500,000.00	4,725,000.00					4,725,000.00
2	CV. GOJENTA	Pemb.Pagar Kantor BPP Kec. Sanrobone		34,588,875.00	1,729,444.00					1,729,444.00
3	CV. PATTALLASSANG PUTRA	Pemb.WC BPP Kec. Galesong		7,216,000.00	360,800.00					360,800.00
	Tahun 2011			**47,800,000.00**	**2,390,000.00**				**0.00**	**2,390,000.00**
1	PT.ATHIRA KASYLA	~ Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesmavet		47,800,000.00	2,390,000.00					2,390,000.00
	Tahun 2013			**60,400,000.00**	**3,020,000.00**				**0.00**	**3,020,000.00**
1	CV. Sinar Mentari	Pembangunan Embung Desa Bontoparang		60,400,000.00	3,020,000.00					3,020,000.00
	Tahun 2014			**504,749,500.00**	**19,623,000.00**				**0.00**	**19,623,000.00**
A.	**Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Talud**	Drainase Desa Belaka Desa Towata								0.00
1	CV. Benteng Sanrobone	Jalan Usaha Tani dan Talud Desa Panrannuangku		64,717,500.00	3,235,875.00					3,235,875.00
2	CV. Annisa Pratama	Jalan Usaha Tani dan Talud Kel. Bulukunyi		48,575,000.00	2,428,750.00					2,428,750.00
3	CV. Bulu-Bulu	Jalan Usaha Tani dan Talud Kel. Pappa		48,575,000.00	2,428,750.00					2,428,750.00
4	CV. Jabal Nur	Jalan Usaha Tani dan Talud Desa Bonto Lebang		48,575,000.00	2,428,750.00					2,428,750.00
5	CV. Distra Pratama	Jalan Usaha Tani dan Talud Desa Bonto Kassi		64,717,500.00	3,235,875.00					3,235,875.00
B.	**Pembangunan Gedung dan Bangunan**									
6	CV. Samaturu Mandiri	Pembuatan Pintu Pagar Besi RPH Polut		4,950,000.00	247,500.00					247,500.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
C.	**Dinas Ketahanan Pangan**									
7	CV SYAFIRA NUR	Pembangunan Cadangan Lumbung Pangan DesaKabupaten		56,140,000.00	2,807,000.00					2,807,000.00
8	CV SAMATURU MANDIRI	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Lagaruda Kec. Sanrobone, Pada Kegiatan Pembangunan Cadangan Lumbung Pangan Desa Kabupaten		56,159,500.00	2,807,500.00					2,807,500.00
9	CV HEFAISTOS CONTRCTION	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Kec.Galesong Pada Kegiatan Pembangunan Cadangan Lumbung Pangan Desa Kabupaten		56,190,000.00	500.00					500.00
10	CV BULU-BULU	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Ko'mara Kec.Polut Pada Kegiatan Pembangunan Cadangan Lumbung Pangan Desa Kabupaten		56,150,000.00	2,500.00					2,500.00
	Tahun 2015			**174,800,000.00**	**30,000.00**				**0.00**	**30,000.00**
1	CV. Sinar Cenrana	Rehabilitasi Irigasi tersier bontolebang Kec. Galut		174,800,000.00	30,000.00					30,000.00
	Tahun 2016			**1,877,858,000.00**	**150,228,640.00**				**0.00**	**150,228,640.00**
1	CV. Ashindo Nusa Persada	Pemb. Jalan Usaha Tani (DAK)		1,877,858,000.00	150,228,640.00					150,228,640.00
	Tahun 2019			**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0.00**
	Utang Non LS Tahun 2019									
1	Utang PDAM	Beban jasa air bulan Desember 2019			0.00				0.00	0.00
2	Utang Linstrik				0.00				0.00	0.00
	Tahun 2021			**120,000,000.00**	**90,000,000.00**				**90,000,000.00**	**0.00**
	KT. SIKOMPA	Pembangunan Dam Parit Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara (DAK)	75/SPK/DAK/DPKP-PSP/2021	120,000,000.00	90,000,000.00		05118/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2022	12/28/2022	90,000,000.00	0.00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan					**35,430,800.00**	**771,400.00**			**438,800.00**	**35,763,400.00**
	Tahun 2009			**41,319,600.00**	**1,487,200.00**				**0.00**	**1,487,200.00**
1	CV. MAHA KARYA ABADI	Penyempyrnaan jaringan dan tambah daya listrik		29,744,000.00	1,487,200.00					1,487,200.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
										0.00
	Tahun 2015			**5,787,800.00**	**5,787,800.00**				**0.00**	**5,787,800.00**
2	CV. Aulifa	Pengawasan Pembuatan WC Permanen taman kota		5,787,800.00	5,787,800.00					5,787,800.00
	Tahun 2016			**324,717,000.00**	**27,717,000.00**				**0.00**	**27,717,000.00**
3	CV. SULFA ABADI SEJAHTERA	- Pengadaan Pembangunan Instalasi Pipa Air Limbah (IPAL) Kecamatan Pattallassang.		197,200,000.00	0.00					0.00
4	CV. TUJUH TIGA PUTRA	- Pengadaan Taman Hijau Segitiga Canrego		99,800,000.00	0.00					0.00
5	CV. MULTILINE TATA RANCANA	- Perencanaan Taman Alun-alun Makkatang Dg. Sibali		3,960,000.00	3,960,000.00					3,960,000.00
6	CV. KARAENG PANRITAYA	- Perencanaan Taman Pedestrian Depan Kantor Depag		3,955,000.00	3,955,000.00					3,955,000.00
7	CV. MATRA DESAIN KONSULTAN	- Perencanaan Taman Hijau Segitiga Canrego		3,954,000.00	3,954,000.00					3,954,000.00
8	CV. KARAENG PANRITAYA	- Pengawasan Taman Alun-alun Makkatang Dg. Sibali		2,970,000.00	2,970,000.00					2,970,000.00
9	CV. MATRA DESAIN KONSULTAN	- Pengawasan Taman Pedestrian Depan Kantor Depag		2,992,000.00	2,992,000.00					2,992,000.00
10	CV. MULTILINE TATA RANCANA	- Pengawasan Taman Hijau Segitiga Canrego		2,986,000.00	2,986,000.00					2,986,000.00
11	CV. SERIGALA JAYA	- Perencanaan Taman Hijau Kompleks Ruko Pasar Sentral		3,950,000.00	3,950,000.00					3,950,000.00
12	CV. PUTRA ADITYA PERKASA	- Pengawasan Taman Hijau Kompleks Ruko Pasar Sentral		2,950,000.00	2,950,000.00					2,950,000.00
	Tahun 2021			**438,800.00**	**438,800.00**				**438,800.00**	**0.00**
	Utang PDAM			438,800.00	438,800.00				438,800.00	0.00
	Tahun 2022			**332,600.00**	**0.00**	**771,400.00**			**0.00**	**771,400.00**
	Utang PDAM			771,400.00		771,400.00				771,400.00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					**7,543,350.00**	**0.00**			**0.00**	**7,543,350.00**
	Tahun 2012				**4,473,150.00**					**4,473,150.00**
	CV.NURFITRIANI	Lanjutan Saluran Samping Ruas Punaga SP 1 - Ongkoa		89,463,000.00	4,473,150.00					4,473,150.00
	Tahun 2019				**898,800.00**					**898,800.00**
	PDAM	Utang air PDAM selama 6 bulan 2019			898,800.00					898,800.00
	Tahun 2020				**2,171,400.00**					**2,171,400.00**
	PDAM				2,171,400.00					2,171,400.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
Dinas Perhubungan					**77,777,500.00**	**169,400.00**			**0.00**	**77,946,900.00**
	Tahun 2008				**900,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
1	CV. PUTRA JAYA	Pemeliharaan Traffic Light/Warning Light		18,700,000.00	900,000.00					900,000.00
	Tahun 2009				**500,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2	CV. AIRSYAN	Pembuatan Papan Nama Kantor		10,000,000.00	500,000.00					500,000.00
	Tahun 2010				**70,792,500.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,792,500.00**
3	CV. RIFKA JAYA	Pengadaan/Pembangunan Kapal Penyeberangan		1,405,850,000.00	70,292,500.00					70,292,500.00
4	CV. SYAFIRA NUR	Pembangunan rumah tunggu		10,000,000.00	500,000.00					500,000.00
	Tahun 2015				**5,585,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,000.00**
5	CV. AMANDA BERSAUDARA	Pemeliharaan Marka Jalan		26,400,000.00	1,320,000.00					1,320,000.00
6	CV. AMANDA BERSAUDARA	Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan		85,300,000.00	4,265,000.00					4,265,000.00
	Tahun 2022				**0.00**	**169,400.00**				**169,400.00**
	PDAM			169,400.00		169,400.00				169,400.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					**236,723,275.00**	**0.00**			**654,400.00**	**236,068,875.00**
	Tahun 2013			**57,500,000.00**	**2,875,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,875,000.00**
1	CV. ANUGRAH	Rehabilitasi wc pasar lengkese		37,500,000.00	1,875,000.00					1,875,000.00
2	CV. MUSKAL JAYA	Renovasi Psr Galesong		20,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00
	Tahun 2014			**4,706,415,000.00**	**198,537,475.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,537,475.00**
3	-	Pengawasan Teknis renovasi WC Pasar Aeng towa		7,350,000.00	7,350,000.00					7,350,000.00
4	-	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Metrologi Legal		2,035,000,000.00	101,750,000.00					101,750,000.00
5	-	Pembangunan Pelataran Parkir Pasar Bulukunyi		62,000,000.00	31,000,000.00					31,000,000.00
6	-	Pembangunan Pelataran Gedung Kantor UPTD Metrologi Legal		153,000,000.00	-25,000.00					-25,000.00
7	-	~ Renovasi WC dan Pembuatan Tempat Sampah Pasar Aeng Towa Kab.Takalar		31,600,000.00	1,580,000.00					1,580,000.00
8	-	Pembangunan PLTS Terpusat 15 KW		2,114,865,000.00	-25.00					-25.00
9	-	Perencanaan Teknis Pembangunan PLTS		43,950,000.00	43,950,000.00					43,950,000.00
10	-	Penimbunan Peralatan Showroom Produk IKM		38,250,000.00	1,912,500.00					1,912,500.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
11	-	Pembangunan Lapak Barang Campuran		55,500,000.00	2,775,000.00					2,775,000.00
12	-	Penimbunan Lapak Kuliner		13,500,000.00	675,000.00					675,000.00
13	-	Pembangunan Lantai Jemur		85,000,000.00	4,250,000.00					4,250,000.00
14		Pembangunan /Peningkatan Akses Jalan Gudang Silo		51,500,000.00	2,575,000.00					2,575,000.00
15		Pemeliharaan Kantor Silo		14,900,000.00	745,000.00					745,000.00
	Tahun 2015			**34,448,000.00**	**34,448,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,448,000.00**
16	CV. Suar konsultan	perencanaan pemasangan kanopi pasar sentral		5,600,000.00	5,600,000.00					5,600,000.00
17	CV. Suar konsultan	perencanaan pembangunan plaza pasar sentral		5,950,000.00	5,950,000.00					5,950,000.00
18	CV. Suar konsultan	perencanaan pembangunan taman gedung showroom		2,400,000.00	2,400,000.00					2,400,000.00
19	CV. Atikah	pengawasan pembangunan taman gedung showroom		1,800,000.00	1,800,000.00					1,800,000.00
20	CV. Atikah	pengadaan alat pertukangan		9,898,000.00	9,898,000.00					9,898,000.00
21	CV. Atikah	pengawasan pembangunan Kanopi pasar sentral		4,450,000.00	4,450,000.00					4,450,000.00
22	CV. Atikah	pengawasan pembangunan Plaza Pasar Sentral		4,350,000.00	4,350,000.00					4,350,000.00
	Tahun 2020			**0.00**	**208,400.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,400.00**
23		Utang Non LS (PDAM)			208,400.00				0.00	208,400.00
	Tahun 2021				**654,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**654,400.00**	**0.00**
24		Utang Non LS (PDAM)			654,400.00	0.00			654,400.00	0.00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga					**170,000.00**	**50,200.00**			**170,000.00**	**50,200.00**
	Tahun 2021			**0.00**	**170,000.00**		**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**0.00**
		PDAM			170,000.00				170,000.00	0.00
	Tahun 2022				**0.00**	**50,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,200.00**
		PDAM		50,200.00		50,200.00				50,200.00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan					**100,700.00**	**54,345,500.00**			**100,700.00**	**54,345,500.00**
	Tahun 2021			**0.00**	**100,700.00**		**0.00**	**0.00**	**100,700.00**	**0.00**
		PDAM			100,700.00				100,700.00	0.00
	Tahun 2022				**0.00**	**54,345,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,345,500.00**
	CV. Karya Sepakat Consultan	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Takalar	11/SP/PPK-DPK/XI/2021			54,345,500.00			0.00	54,345,500.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
Dinas Perikanan					**71,877,157.00**	**0.00**			**224,900.00**	**71,652,257.00**
	Tahun 2009			**809,339,000.00**	**8,184,657.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,184,657.00**
1	CV. VIKARYA UTAMA	Pembangunan Pemecah Ombak	523/KONTRAK/316/X/2009, 16-10-2009	645,645,789.00	-4.00					-4.00
2	CV. HATI MULIA	Pembangunan TPI Marbo (ST)	523/SPK/304.F/IX/2009, 30-09-2009	28,243,211.00	1,412,161.00					1,412,161.00
3	CV. PARISKAMANDIRI CORP	rehabilitasi TPI Topejawa	523/KONTRAK/323.a/X/2009, 23-10-2009	68,000,000.00	3,400,000.00					3,400,000.00
4	CV. TUTARRUSUNA GROUP	Pembangunan Pos Jaga 3 Unit	523/KONTRAK/109.a/IV/2009, 24-04-2009	67,450,000.00	3,372,500.00					3,372,500.00
	Tahun 2011			**269,423,000.00**	**4,542,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,542,500.00**
5	CV.Parangmata Konstruksi	Pembuatasajun Jalan Nelayan Galesong Kota		89,414,000.00	0.00					0.00
6	CV.Intan Mandiri	Pembuatasajun Jalan Nelayan Tamalate		89,159,000.00	0.00					0.00
7	CV.Sinar Surya	Rehabilitasi Tambatan Perahu		71,000,000.00	3,550,000.00					3,550,000.00
8	CV.Puspa Indah Permai	Pemeliharaan parkir Mobil Dinas		19,850,000.00	992,500.00					992,500.00
	Tahun 2012			**97,990,000.00**	**4,899,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,899,500.00**
9	Cv. Amar Jaya	Pembuatan Jalan Nelayan Bontokanang		97,990,000.00	4,899,500.00					4,899,500.00
	Tahun 2013			**41,660,000.00**	**2,083,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,083,000.00**
10	CV. IRA UTAMA	Pembangunan Embung Desa Bontoparang		41,660,000.00	2,083,000.00					2,083,000.00
	Tahun 2014			**636,052,000.00**	**51,942,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**51,942,600.00**
11	CV ARINA KONSULTAN	Perencanaan Penyediaan Tambatan Perahu dan Pembangunan Pemecah Ombak		10,250,000.00	10,250,000.00					10,250,000.00
12	PT ARISTA CIPTA	Pengawasan Saluran Irigasi Tambak Sanrobone		1,900,000.00	1,900,000.00					1,900,000.00
13	PT ARISTA CIPTA	Pengawasan UPR dan Pengawasan Unit Percontohan Bibit Rumput Laut		5,900,000.00	5,900,000.00					5,900,000.00
14	CV TRI PUTRA JAYA KONSULTAN	Pengawasan Pemecah Ombak		2,950,000.00	2,950,000.00					2,950,000.00
15	CV. MURDA JAIBATU	Pembangunan jalan Nelayan Boddia		46,600,000.00	2,520,000.00					2,520,000.00
16	CV ZICKHA ANUGERAH	Pembangunan jalan Nelayan Ujung Baji		131,752,000.00	6,587,600.00					6,587,600.00
17	CV AMANAH BUNDA	Pembuatan Tambatan Perahu		46,300,000.00	2,315,000.00					2,315,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
18	CV. MURDA JAIBATU	Pembangunan Pelataran TPI Soreang		46,400,000.00	2,320,000.00					2,320,000.00
19	CV IRZHAL MAULANA	Pembangunan Pemecah Ombak		149,500,000.00	7,475,000.00					7,475,000.00
20	CV UCHI SUKSES ABADI	Penyediaan Tambatan Perahu		194,500,000.00	9,725,000.00					9,725,000.00
	Tahun 2021				**224,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,900.00**	**0.00**
21		Utang Non LS (PDAM)			224,900.00				224,900.00	0.00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan					0.00	320,500.00			0.00	320,500.00
	Tahun 2022				**0.00**	**320,500.00**	**0.00**	**0.00**		**320,500.00**
1		PDAM				320,500.00				320,500.00
Sekretariat Daerah					**18,726,200.00**	**65,899,404.00**	**0**		**12,826,200.00**	**71,799,404.00**
	Tahun 2016			**5,900,000.00**	**5,900,000.00**	**0.00**			**0.00**	**5,900,000.00**
1	CV. &I_GRADASI GARISARCH	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Perbaikan Pintu Utama Kantor Bupati Hutang Tahun Anggaran 2016 (DAU)	098/SPK-IX/Setda/2016	5,900,000.00	5,900,000.00					5,900,000.00
	Tahun 2021			**12,826,200.00**	**12,826,200.00**				**12,826,200.00**	**0.00**
	- Tagihan PDAM Takalar			12,826,200.00	12,826,200.00				12,826,200.00	0.00
	Tahun 2022				**-**	**65,899,404.00**			**-**	**65,899,404.00**
	PDAM			18,893,200.00		18,893,200.00				18,893,200.00
	Listrik			47,006,204.00		47,006,204.00				47,006,204.00
Sekretariat DPRD					**6,191,200.00**	**6,164,000.00**			**6,191,200.00**	**6,164,000.00**
	Tahun 2021				**6,191,200.00**	**0.00**			**6,191,200.00**	**0.00**
	PDAM				6,191,200.00				6,191,200.00	0.00
	Tahun 2022				**0.00**	**6,164,000.00**			**0.00**	**6,164,000.00**
	PDAM					6,164,000.00			0.00	6,164,000.00

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					**21,495,000.00**	**0.00**			**0.00**	**21,495,000.00**
	Tahun 2012			**32,900,000.00**	**1,645,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,645,000.00**
1	CV.Putra Dadeko	Pembangunan Ruangan, Perencanaan Pembangunan Ruangan danPengawasan Pembangunan Ruangan (CV.Ulfa Consultant)		32,900,000.00	1,645,000.00					1,645,000.00
	Tahun 2016			**19,850,000.00**	**19,850,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,850,000.00**
2	CV. SERIGALA JAYA	Pengawasan Rehab. Sedang /Berat Gedung Kantor	050/143/REK/IX/2016	19,850,000.00	19,850,000.00					19,850,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	MOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2021	Bertambah	Pembayaran 2022			SALDO AKHIR
							NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
Badan Keuangan dan Aset Daerah					**11,426,135.00**	**0.00**			**10,498,635.00**	**927,500.00**
	Tahun 2008			**927,500.00**	**927,500.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**927,500.00**
1	CV. NUR RAHMATULLAH	Rehabilitasi Pasar Bulukunyi		927,500.00	927,500.00					927,500.00
	Tahun 2021			**10,498,635.00**	**10,498,635.00**		**0.00**	**0.00**	**10,498,635.00**	**0.00**
	2	LISTRIK		10,498,635.00	10,498,635.00		0.00		10,498,635.00	0.00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					**3,183,729.00**	**0.00**			**3,183,729.00**	**0.00**
	Tahun 2021				**3,183,729.00**		**0.00**	**0.00**	**3,183,729.00**	**0.00**
1		PDAM			3,183,729.00				3,183,729.00	0.00
Inspektorat					**5,698,477.00**	**322,600.00**			**5,698,477.00**	**322,600.00**
	Tahun 2021				**5,698,477.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,698,477.00**	**0.00**
1		PDAM			49,700.00				49,700.00	0.00
		Listrik			5,648,777.00				5,648,777.00	0.00
	Tahun 2022				**0.00**	**322,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322,600.00**
		PDAM				322,600.00				322,600.00
Kecamatan Pattallassang					574,100.00	0.00			574,100.00	0.00
	Tahun 2021				**574,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574,100.00**	**0.00**
1		PDAM			574,100.00				574,100.00	0.00
Kecamatan Polongbangkeng Selatan					813,506.00	0.00			813,506.00	0.00
	Tahun 2021				**813,506.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,506.00**	**0.00**
1		PDAM			813,506.00				813,506.00	0.00
Kecamatan Mangarabombang					47,500.00	48,500.00			47,500.00	48,500.00
	Tahun 2021				**47,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,500.00**	**0.00**
1		PDAM			47,500.00				47,500.00	0.00
	Tahun 2022				**0.00**	**48,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,500.00**
1		PDAM			0.00	48,500.00			0.00	48,500.00
Kecamatan Sanrobone					214,100.00	1,377,200.00			214,100.00	1,377,200.00
	Tahun 2021				**214,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,100.00**	**0.00**
1		PDAM			214,100.00				214,100.00	0.00
	Tahun 2022				**0.00**	**1,377,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,377,200.00**
1		PDAM Bulan Okt, Nov, Des 2022			0.00	1,377,200.00			0.00	1,377,200.00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik					3,497,500.00	0.00			0.00	3,497,500.00
	Tahun 2017				**3,497,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,497,500.00**
1	CV. Intan mandiri	Utang Retensi Belanja Modal Gedung dan Bangunan			3,497,500.00				0.00	3,497,500.00
	Jumlah				**19,589,669,703.46**	**19,421,974,510.00**	**-**	**-**	**15,480,523,138.05**	**23,531,121,075.41**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Takalar....20
Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Takalar....21
Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Takalar....21
Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Takalar....22
Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Takalar....23
Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia....24
Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar....25
Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Takalar....26
Tabel 9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha....26
Tabel 10 Kondisi Komoditi Pertanian Tahun 2018-2020....28
Tabel 11 Kondisi Luas Kawasan Hutan Kabupaten Takalar Tahun 2015-2016....29
Tabel 12 Potensi Investasi Kabupaten Takalar....30
Tabel 13 Rekapitulasi Keragaman Koperasi Kabupaten Takalar Tahun 2021....32
Tabel 14 Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan Pemerintah Daerah....37
Tabel 15 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah TA. 2022....38
Tabel 16 Rincian Penambahan dan Perubahan Nomenklatur SKPD....43
Tabel 17 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Kab. Takalar....44
Tabel 18 Penyisihan investasi non permanen....61
Tabel 19 Komponen Biaya Perolehan....63
Tabel 20 Batasan minimal kapitalisasi aset tetap....66
Tabel 21 Masa manfaat aset tetap....67
Tabel 22 Masa manfaat Aset Tidak Berwujud....86
Tabel 23 Rincian Penerimaan PAD per Jenis Per 31 Desember 2022 dan 2021....109
Tabel 24 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022....110
Tabel 25 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Per 31 Desember 2022 dan 2021....111
Tabel 26 Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022....112
Tabel 27 Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022....113
Tabel 28 Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu....114
Tabel 29 Realisasi Bagi Hasil atas Penyertaan Modal TA 2022 dan TA 2021....115
Tabel 30 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021....116

Tabel 31 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021 117
Tabel 32 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2022 dan 2021 117
Tabel 33 Rincian Realisasi DAK TA 2022 119
Tabel 34 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 121
Tabel 35 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 121
Tabel 36 Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 122
Tabel 37 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2022 123
Tabel 38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA. 2022 124
Tabel 39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 124
Tabel 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pegawai TA 2022 125
Tabel 41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa 129
Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 131
Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 132
Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 133
Tabel 45 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2022 135
Tabel 46 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 135
Tabel 47 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 136
Tabel 48 Rincian pengunaan dana Belanja Tidak Terduga 137
Tabel 49 Transfer ke Desa/Bantuan Keuangan Parpol TA. 2022 138
Tabel 50 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 145
Tabel 51 Rekapitulasi Aset TA 2022 dan 2021 147
Tabel 52 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 147
Tabel 53 Saldo Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 148
Tabel 54 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 149
Tabel 55 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022 150
Tabel 56 Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 151
Tabel 57 Saldo Kas di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle per 31 Desember 2022 151
Tabel 58 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 153
Tabel 59 Rincian Piutang Pajak dan Penyisihan per 31 Desember 2022 154
Tabel 60 Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022 154

Tabel 61 Rincian Piutang Retribusi Daerah dan Penyisihan Per 31 Desember 2022 ...155
Tabel 62 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah ...156
Tabel 63 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dan Penyisihan ...156
Tabel 64 Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya ...157
Tabel 65 Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya ...157
Tabel 66 Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 ...160
Tabel 67 Saldo Investasi per 31 Desember 2022 ...161
Tabel 68 Rekapitulasi Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2022 ...162
Tabel 69 Rincian Saldo Dana Kukesrata, PEP2T, Kuperta dan Dana Bergulir di Bank per 31 Desember 2022 ...163
Tabel 70 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 ...164
Tabel 71 Rincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 ...166
Tabel 72 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah ...166
Tabel 73 Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Takalar ...168
Tabel 74 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ...171
Tabel 75 Tabel Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ...173
Tabel 76 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ...177
Tabel 77 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya ...179
Tabel 78 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ...181
Tabel 79 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ...182
Tabel 80 Rincian Aset Lainnya ...183
Tabel 81 Mutasi Tagihan Penjualan Angsuran ...184
Tabel 82 Mutasi Tuntutan Ganti Rugi ...184
Tabel 83 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud ...185
Tabel 84 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain ...186
Tabel 85 Penjualan Barang Milik Daerah ...187
Tabel 86 Kas yang dibatasi penggunaannya ...188
Tabel 87 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021 ...188
Tabel 88 Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 ...189
Tabel 89 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022 dan 2021 ...192
Tabel 90 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2022 dan 2021 ...192
Tabel 91 Realisasi Penerimaan Deviden Pada Kas Daerah Tahun 2022 ...193

Tabel 92 Realisasi Pendapatan hasil Pengelolaan.....194
Tabel 93 Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LO TA 2022 dan 2021.....194
Tabel 94 Realisasi Dana Bagi Hasil-LO TA 2022 dan 2021.....195
Tabel 95 Realisasi Bagi Hasil SDA –LO TA 2022 dan 2021.....196
Tabel 96 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2022 dan 2021.....198
Tabel 97 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO TA 2022 dan 2021 198
Tabel 98 Realisasi Pendapatan Hibah-LO TA 2022 dan 2021.....199
Tabel 99 Realisasi Beban-LO TA 2022 dan 2021.....199
Tabel 100 Realisasi Beban Operasi TA 2022 dan 2021.....200
Tabel 101 Realisasi Beban Pegawai TA 2022 dan 2021.....201
Tabel 102 Realisasi Beban Persediaan TA 2022 dan 2021.....201
Tabel 103 Realisasi Beban Jasa TA 2022 dan 2021.....202
Tabel 104 Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021.....203
Tabel 105 Realisasi Beban Hibah TA 2022 dan 2021.....203
Tabel 106 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021.....204
Tabel 107 Realisasi Beban Transfer TA 2022 dan 2021.....205
Tabel 108 Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021.....207
Tabel 109 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi.....207
Tabel 110 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi.....208
Tabel 111 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset.....209
Tabel 112 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.....209
Tabel 113 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan.....210
Tabel 114 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.....211
Tabel 115 Saldo akhir kas TA 2022 dan 2021.....212
Tabel 116 Rincian Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022.....213
Tabel 117 Rincian Koreksi Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2022.....215
Tabel 118 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022.....218

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	50.236.582.395,00	23.417.169.232,00	46,61	24.785.643.748,50
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	7.901.100.000,00	3.129.372.144,00	39,61	1.899.627.570,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	14.563.787.800,00	10.178.141.839,00	69,89	8.238.598.134,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.1.4	93.505.000.000,00	78.924.602.848,36	84,41	86.964.753.511,99
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		166.206.470.195,00	115.649.286.063,36	69,58	121.888.622.964,49
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak		24.916.050.000,00	15.858.558.847,00	63,64	17.475.180.893,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		5.692.997.000,00	12.567.831.065,00	220,76	7.700.344.503,00
12	Dana Alokasi Umum		564.598.728.000,00	559.979.921.190,00	99,18	564.934.568.000,00
13	Dana Alokasi Khusus		240.506.057.000,00	221.646.091.073,00	92,16	198.365.000.034,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		835.715.832.000,00	810.052.402.175,00	96,93	788.475.093.430,00
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.5.1.1.2.2				
16	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Penyesuaian		75.045.028.000,00	75.045.028.000,00	100,00	84.350.371.400,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya		75.045.028.000,00	75.045.028.000,00	100,00	84.350.371.400,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		47.979.267.216,00	56.985.815.409,00	118,77	32.450.407.628,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bantuan Keuangan		22.690.452.716,00	24.051.103.000,00	106,00	28.739.103.960,00
23	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		70.669.719.932,00	81.036.918.409,00	114,67	61.189.511.588,00
24	Total Pendapatan Transfer		981.430.579.932,00	966.134.348.584,00	98,44	934.014.976.418,00
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
26	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	3.750.000.000,00
27	Pendapatan Dana Darurat	7.5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.3.3	45.275.300.000,00	42.247.638.360,00	93,31	42.038.366.242,00
29	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		45.275.300.000,00	42.247.638.360,00	93,31	45.788.366.242,00
30	JUMLAH PENDAPATAN		1.192.912.350.127,00	1.124.031.273.007,36	94,23	1.101.691.965.624,49
31						
32	BELANJA	7.5.1.2				
33	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
34	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	599.110.854.496,00	523.629.243.269,00	87,40	547.131.893.166,00
35	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	316.341.822.589,00	308.182.707.004,00	97,42	289.118.163.860,10
36	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.5	17.236.595.185,00	15.591.217.650,00	90,45	4.783.640.600,00
39	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Jumlah Belanja Operasi		932.689.272.270,00	847.403.167.923,00	90,86	841.033.697.626,10
41	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
42	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	4.621.467.838,00	4.576.325.420,00	99,02	8.577.959.400,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	89.077.186.249,00	77.491.881.979,00	86,99	29.661.741.430,00
44	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	188.808.174.077,00	180.038.642.251,00	95,36	50.781.476.803,72
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	172.932.782.056,00	155.024.484.196,00	89,64	47.170.806.203,38
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	4.502.191.901,00	1.293.334.640,00	28,73	3.590.120.350,00
47	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Jumlah Belanja Modal		459.941.802.121,00	418.424.668.486,00	90,97	139.782.104.187,10
49	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.3				
50	Belanja Tak Terduga		4.047.507.689,00	2.419.474.976,00	59,78	123.652.909,00
51	Jumlah Belanja Tak Terduga		4.047.507.689,00	2.419.474.976,00	59,78	123.652.909,00

NO	URAIAN	Ref	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6	7
52	TRANSFER	7.5.1.3				
53	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	7.5.1.3.1				
54	Bagi Hasil Pajak		3.646.694.400,00	3.646.694.400,00	100,00	0,00
55	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	4.557.695.125,00
56	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa		3.646.694.400,00	3.646.694.400,00	100,00	4.557.695.125,00
58	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.3.2				
59	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	7.5.1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Provinsi	7.5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	11.450.000,00
61	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kp J Desa	7.5.1.3.2.3	134.566.005.500,00	133.304.589.500,00	99,06	142.439.366.107,00
62	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		134.566.005.500,00	133.304.589.500,00	99,06	142.450.816.107,00
63	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.534.691.261.980,00	1.405.198.595.285,00	91,55	1.127.947.965.954,20
64	SURPLUS/DEFISIT		(341.978.931.853,00)	(281.167.322.277,64)	82,22	(26.256.000.329,71)
65	PEMBIAYAAN	7.5.1.4				
66	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.1				
67	Penggunaan SiLPA	7.5.1.4.1.1	93.978.931.853,00	94.187.591.053,37	100,22	121.234.932.183,08
68	Pencairan Dana Cadangan	7.5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.4.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	7.5.1.4.1.4	250.000.000.000,00	241.947.497.641,00	96,78	0,00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.1.4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	7.5.1.4.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.5.1.4.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	7.5.1.4.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	7.5.1.4.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	7.5.1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Piutang Daerah	7.5.1.4.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.1.4.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		343.978.931.853,00	336.135.088.694,37	97,72	121.234.932.183,08
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.2				
81	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.1.4.2.2	2.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	7.5.1.4.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.1.4.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	7.5.1.4.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.5.1.4.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	7.5.1.4.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	7.5.1.4.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	7.5.1.4.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	7.5.1.4.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.1.4.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		2.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
93	PEMBIAYAAN NETTO		341.978.931.853,00	336.135.088.694,37	98,29	120.234.932.183,08
94	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		0,00	54.967.766.416,73	0,00	93.978.931.853,37

Takalar, 28 Mei 2023

Pj. BUPATI TAKALAR

DR. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam ruplah)

NO	URAIAN	Ref	SALDO 2022	SALDO 2021
1	2	3	4	5
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	7.5.2.1	93.978.931.853,37	125.460.203.203,08
2	PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	7.5.2.2	94.187.591.053,37	121.234.932.183,08
3	SUBTOTAL (1-2)		(208.659.200,00)	4.225.271.020,00
4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN(SILPA/SIKPA	7.5.2.3	54.967.766.416,73	93.978.931.853,37
5	SUBTOTAL (3+4)		54.759.107.216,73	98.204.202.873,37
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUUAN TAHUN SEBELUMNYA	7.5.2.4	208.659.200,00	(4.225.271.020,00)
7	- Pendapatan Dana BOS yang belum dicatat Tahun 2020		0,00	42.896.665.343,00
8	- Belanja Dana BOS yang belum dicatat Tahun 2020		0,00	(47.141.169.343,00)
9	- Belanja JKN lebih catat Tahun 2020		0,00	19.232.980,00
10	- Sisa Kas Non Kapitasi belum dicatat Tahun 2021		208.659.200,00	0,00
11	LAIN-LAIN		0,00	0,00
12	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+10)	7.5.2.5	54.967.766.416,73	93.978.931.853,37

Takalar, 28 Mei 2023

Pj. BUPATI TAKALAR

DR. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
1	2	3	4	5
1	ASET	7.5.3.1		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1	44.504.956.103,05	79.050.248.880,09
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.2	1.516.402.645,00	23.392.738,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.3	0,00	700.000,00
6	Kas di Bendahara FKTP	7.5.3.1.1.4	0,00	1.121.196,00
7	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.5	8.440.642.883,71	14.887.478.979,28
8	Kas Dana BOS	7.5.3.1.1.6	58.920.342,00	15.990.060,00
9	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.7	535.571.669,00	0,00
10	Investasi jangka pendek	7.5.3.1.1.8	0,00	0,00
11	Piutang Pajak	7.5.3.1.1 9	11.195.070.930,00	10.531.839.726,99
12	Penyisihan Piutang Pajak		(8.669.322.707,50)	(8.184.147.937,88)
13	Piutang Pajak netto		2.525.748.222,50	2.347.691.789,11
14	Piutang Retribusi	7.5.3.1.1.10	3.071.712.273,00	3.138.166.773,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi		(1.892.136.728,00)	(1.625.002.923,00)
16	Piutang Retribusi Netto		1.179.575.545,00	1.513.163.850,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.11	9.352.195.188,20	3.634.159.475,00
18	Penyisian Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(4.147.618.711,67)	(36.341.594,75)
19	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		5.204.576.476,53	3.597.817.880,25
20	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.5.3.1.1.12	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0,00	0,00
22	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		0,00	0,00
23	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.3.1.1.13	22.133.103.639,00	19.943.565.916,00
24	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
25	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya netto		22.133.103.639,00	19.943.565.916,00
26	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.5.3.1.1.14	0,00	0,00
27	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
28	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto		0,00	0,00
29	Piutang Pendapatan Lainnya	7.5.3.1.1.15	0,00	0,00
30	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
31	Piutang Pendapatan Lainnya Netto		0,00	0,00
32	Belanja di Bayar di muka	7.5.3.1.1.16	61.006.104,66	28.523.253,90
33	Penyisihan Belanja di Bayar di muka		0,00	0,00
34	Belanja di Bayar di muka Netto		61.006.104,66	28.523.253,90
35	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	7.5.3.1.1.17	0,00	0,00
36	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
37	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Netto		0,00	0,00
38	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	7.5.3.1.1.18	0,00	0,00
39	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
40	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Netto		0,00	0,00
41	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	7.5.3.1.1.19	0,00	0,00
42	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
43	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Netto		0,00	0,00
44	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.3.1.1.20	0,00	0,00

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
1	2	3	4	5
45	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
46	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Netto		0,00	0,00
47	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.1.1.21	0,00	72.646.000,00
48	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	(72.646.000,00)
49	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		0,00	0,00
50	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.1.1.22	10.302.983,33	1.318.803.184,59
51	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0,00	(1.307.385.529,59)
52	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		10.302.983,33	11.417.655,00
53	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.23	193.168.754,00	155.861.000,00
54	Penyisihan Piutang Lainnya		(159.587.412,95)	(155.861.000,00)
55	Piutang Lainnya Netto		33.581.341,05	0,00
56	Persediaan	7.5.3.1.1.24	18.158.310.385,38	11.276.817.233,74
57	**Jumlah Aset Lancar**		**104.362.698.340,21**	**132.697.929.431,37**
58	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**7.5.3.1.2**		
59	**Investasi Nonpermanen**	**7.5.3.1.2.1**		
60	Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
61	Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
62	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
63	Dana Bergulir		8.016.548.129,00	8.016.548.129,00
64	Penyisihan Piutang Dana Bergulir		(8.016.548.129,00)	(8.016.548.129,00)
65	Dana Bergulir Netto		0,00	0,00
66	Investasi Nonpermanen Lainnya		0,00	0,00
67	**Jumlah Investasi Nonpermanen**		**0,00**	**0,00**
68	**Investasi Permanen**	**7.5.3.1.2.2**		
69	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		95.567.956.883,07	71.886.257.289,91
70	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
71	**Jumlah Investasi Permanen**		**95.567.956.883,07**	**71.886.257.289,91**
72	**Jumlah Investasi Jangka Panjang**		**95.567.956.883,07**	**71.886.257.289,91**
73	**ASET TETAP**	**7.5.3.1.3**		
74	Tanah	7.5.3.1.3.1	367.161.561.470,50	359.089.439.109,36
75	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	346.136.966.264,62	291.787.791.480,95
76	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	771.416.523.925,30	713.778.904.371,69
77	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	1.321.076.581.945,96	1.172.656.989.637,65
78	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	13.662.769.973,61	13.281.591.169,36
79	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	136.113.915.612,52	28.976.874.144,18
80	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(1.429.125.682.379,04)	(1.319.173.660.930,79)
81	**Jumlah Aset Tetap**		**1.526.442.636.813,47**	**1.260.397.928.982,40**
82	**DANA CADANGAN**	**7.5.3.1.4**		
83	Dana Cadangan	7.5.3.1.4.1	0,00	0,00
84	**Jumlah Dana Cadangan**		**0,00**	**0,00**
85	**ASET LAINNYA**	**7.5.3.1.5**		
86	Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.1.5.1	70.126.000,00	0,00
87	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		(70.126.000,00)	0,00
88	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		0,00	0,00
89	Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.1.5.2	2.329.391.660,63	965.309.034,00
90	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		(1.253.404.673,77)	0,00
91	Tuntutan Ganti Rugi Netto		1.075.986.986,86	965.309.034,00
92	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.3.1.5.3	0,00	0,00
93	Aset Tak Berwujud	7.5.3.1.5.4	4.678.626.435,76	4.678.626.435,76
94	Akumulasi Amortisasi		(4.521.201.685,76)	(4.329.471.826,82)
95	Aset Tak Berwujud Netto		157.424.750,00	349.154.608,94
96	Aset Lain-lain	7.5.3.1.5.5	75.821.990.346,94	49.791.578.615,93
97	Aset Lain-lain		188.559.831.217,64	152.096.305.063,21
98	Penyisihan Aset Lain-lain		(113.746.819.944,70)	(103.249.108.327,28)
99	Aset Lain-lain Netto		74.813.011.272,94	48.847.196.735,93
100	Ketekoran Kas Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.5.6	0,00	0,00

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
1	2	3	4	5
101	Kas yang dibatasi Penggunaannya	7.5.3.1.5.7	1.008.979.074,00	944.381.880,00
102	**Jumlah Aset Lainnya**		**77.055.402.083,80**	**51.106.042.258,87**
103	**JUMLAH ASET**		**1.803.428.694.120,55**	**1.516.088.157.962,55**
104	**KEWAJIBAN**	7.5.3.2		
105	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	7.5.3.2.1		
106	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1	88.727.226,03	0,00
107	Utang Bunga	7.5.3.2.1.2	0,00	0,00
108	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.3.2.1.3	0,00	0,00
109	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.1.4	81.829.945,32	24.099.070,66
110	Utang Belanja	7.5.3.2.1.5	23.531.121.075,41	19.589.669.703,46
111	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.6	0,00	0,00
112	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		**23.701.678.246,76**	**19.613.768.774,12**
113	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	7.5.3.2.2		
114	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	7.5.3.2.2.1	0,00	0,00
115	Utang Dalam Negeri - Obligasi	7.5.3.2.2.2	0,00	0,00
116	Premium (Diskonto) Obligasi	7.5.3.2.2.3	0,00	0,00
117	Utang Jangka Panjang Lainnya	7.5.3.2.2.4	241.947.497.641,00	0,00
118	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**		**241.947.497.641,00**	**0,00**
119	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**265.649.175.887,76**	**19.613.768.774,12**
120	**EKUITAS**			
121	Ekuitas	7.5.3.3	1.537.779.518.232,79	1.496.474.389.188,43
122	**JUMLAH EKUITAS**		**1.537.779.518.232,79**	**1.496.474.389.188,43**
123	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**		**1.803.428.694.120,55**	**1.516.088.157.962,55**

Takalar, 28 Mei 2023

Pj. BUPATI TAKALAR

DR. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	2022	2021	Penaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6	7
1	**Kegiatan Operasional**					
2	**Pendapatan**	7.5.4.1				
3	**Pendapatan Asli Daerah**	7.5.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.4.1.1.1	23.722.627.822,01	25.268.615.295,92	(1.545.987.473,91)	(6,12)
5	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.4.1.1.2	3.062.917.644,00	2.445.497.570,00	617.420.074,00	25,25
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.4.1.1.3	39.758.583.043,16	8.238.598.134,00	31.519.984.909,16	382,59
7	Lain-lain PAD yang sah	7.5.4.1.1.4	80.323.314.558,57	83.355.026.486,99	(3.031.711.928,42)	(3,64)
8	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**		**146.867.443.067,74**	**119.307.737.486,91**	**27.559.705.580,83**	**23,10**
9	**Pendapatan Transfer**	7.5.4.1.2				
10	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	7.5.4.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil		28.426.389.912,00	25.175.525.396,00	3.250.864.516,00	12,91
12	Dana Alokasi Umum		564.065.751.328,00	564.934.568.000,00	(868.816.672,00)	(0,15)
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik		118.673.244.604,00	76.846.239.056,00	41.827.005.548,00	54,43
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		102.972.846.469,00	121.518.760.978,00	(18.545.914.509,00)	(15,26)
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**		**814.138.232.313,00**	**788.475.093.430,00**	**25.663.138.883,00**	**3,25**
16	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	7.5.4.1.2.2				
17	Dana Insentif Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	7.5.4.1.2.3				
23	Pendapatan Bagi Hasil		59.175.353.132,00	40.527.088.689,00	18.648.264.443,00	46,01
24	Bantuan Keuangan		24.051.103.000,00	28.739.103.960,00	(4.688.000.960,00)	(16,31)
25	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah**		**83.226.456.132,00**	**69.266.192.649,00**	**13.960.263.483,00**	**20,15**
26	**Total Pendapatan Transfer**		**897.364.688.445,00**	**857.741.286.079,00**	**39.623.402.366,00**	**4,62**
27	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	7.5.4.1.3				
28	Pendapatan Hibah	7.5.4.1.3.1	10.575.120.526,00	6.009.790.069,00	4.565.330.457,00	75,96
29	Pendapatan Dana Darurat	7.5.4.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan Lainnya	7.5.4.1.3.3	42.247.638.360,00	42.478.366.242,00	(230.727.882,00)	(0,54)
31	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**		**52.822.758.886,00**	**48.488.156.311,00**	**4.334.602.575,00**	**8,94**
32	**Jumlah Pendapatan**		**1.097.054.890.398,74**	**1.025.537.179.876,91**	**71.517.710.521,83**	**6,97**
33	**Beban**	7.5.4.2				
34	**Beban Operasi**	7.5.4.2.1				
35	Beban Pegawai	7.5.4.2.1.1	522.448.266.192,00	550.548.355.086,00	(28.100.088.894,00)	(5,10)
36	Beban Persediaan	7.5.4.2.1.2	86.969.298.935,96	88.816.319.645,06	(1.847.020.709,10)	(2,08)
37	Beban Jasa	7.5.4.2.1.3	153.032.206.716,59	139.933.629.005,51	13.098.577.711,08	9,36
38	Beban Pemeliharaan	7.5.4.2.1.4	11.659.936.106,00	11.274.618.299,00	385.317.807,00	3,42
39	Beban Perjalanan Dinas	7.5.4.2.1.5	60.120.662.841,00	55.328.621.628,00	4.792.041.213,00	8,66
40	Beban Bunga	7.5.4.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Beban Subsidi	7.5.4.2.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Hibah	7.5.4.2.1.8	18.728.380.305,00	4.758.932.000,00	13.969.448.305,00	293,54
43	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.1.10	893.500.349,10	808.106.294,08	85.394.055,02	10,57
45	Beban Lain-lain	7.5.4.2.1.11	7.805.280.244,96	5.999.962.839,95	1.805.317.405,01	30,09
46	**Jumlah Beban Operasi**		**861.657.531.690,61**	**857.468.544.797,60**	**4.188.986.893,01**	**0,49**

No	Uraian	Ref	2022	2021	Penaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6	7
47	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	7.5.4.2.2				
48	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		34.836.504.746,12	24.597.786.081,89	10.238.718.664,23	41,62
49	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		19.069.935.570,84	17.991.041.447,77	1.078.894.123,07	6,00
50	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		98.385.074.429,42	96.168.881.999,81	2.216.192.429,61	2,30
51	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		4.046.000,00	1.139.220.525,00	(1.135.174.525,00)	(99,64)
52	Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	4.908.738.028,44	(4.908.738.028,44)	(100,00)
53	Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud		191.729.858,94	290.454.858,94	(98.725.000,00)	(33,99)
54	**Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi**		**152.487.290.605,32**	**145.096.122.941,85**	**7.391.167.663,47**	**5,09**
55	**Beban Transfer**	7.5.4.2.3				
56	Beban Bagi Hasil		3.646.604.400,00	4.557.695.125,00	(911.000.725,00)	(19,99)
57	Beban Bantuan Keuangan		58.259.561.500,00	58.100.444.707,00	159.116.793,00	0,27
58	**Jumlah Beban Transfer**		**61.906.255.900,00**	**62.658.139.832,00**	**(751.883.932,00)**	**(1,20)**
59	**Beban Tak Terduga**	7.5.4.2.4				
60	Beban Tak Terduga		2.515.835.983,00	123.652.909,00	2.392.183.074,00	1.934,60
61	**Jumlah Beban Tak Terduga**		**2.515.835.983,00**	**123.652.909,00**	**2.392.183.074,00**	**1.934,60**
62	**Jumlah Beban**		**1.078.566.914.178,93**	**1.065.346.460.480,45**	**13.220.453.698,48**	**1,24**
63	**Surplus/Defisit dari Operasi**		**18.487.976.219,81**	**(39.809.280.603,54)**	**58.297.256.823,35**	**(146,44)**
64	**Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**	7.5.4.3				
65	**Surplus Non Operasional**	7.5.4.4				
66	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		36.346.594,75	906.916.468,32	(870.569.873,57)	(95,99)
69	**Jumlah Surpus Non Operasional**		**36.346.594,75**	**906.916.468,32**	**(870.569.873,57)**	**(95,99)**
70	**Defisit Non Operasional**	7.5.4.5				
71	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		68.868.589,20	346.593.370,32	(277.724.781,12)	(80,13)
72	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		7.347.024.785,23	3.713.190.190,42	3.633.834.594,81	97,86
74	**Jumlah Defisit Non Operasional**		**7.415.893.374,43**	**4.059.783.560,74**	**3.356.109.813,69**	**82,67**
75	**Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**		**(7.379.546.779,68)**	**(3.152.867.092,42)**	**(4.226.679.687,26)**	**134,06**
76	**Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**		**11.108.429.440,13**	**(42.962.147.695,96)**	**54.070.577.136,09**	**(125,86)**
77	**Pos Luar Biasa**	7.5.4.6				
78	**Pendapatan Luar Biasa**					
79	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
80	**Jumlah Pendapatan Luar Biasa**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81	**Beban Luar Biasa**					
82	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
83	**Jumlah Beban Luar Biasa**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	**Pos Luar Biasa**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	**SURPLUS/DEFISIT LO**	7.5.4.7	**11.108.429.440,13**	**(42.962.147.695,96)**	**54.070.577.136,09**	**(125,86)**

Takalar, 28 Mei 2023

Pj. BUPATI TAKALAR

DR. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	SALDO 2022	SALDO 2021
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI	7.5.5.1		
ARUS MASUK KAS	7.5.5.1.1		
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		23.417.169.232,00	24.785.643.748,50
Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		3.129.372.144,00	1.899.627.570,00
Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekaayaan Daerah yang dipisahkan		10.178.141.839,00	8.238.598.134,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		78.068.258.599,36	86.864.690.121,99
Penerimaan Dana Bagi Hasil		28.426.389.912,00	25.175.525.396,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		559.979.921.190,00	564.934.568.000,00
Penerimaan Dana Alokasi - Fisik		118.673.244.604,00	76.846.239.056,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		102.972.846.469,00	121.518.760.978,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		75.045.028.000,00	84.350.371.400,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi		56.985.815.409,00	32.450.407.628,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		24.051.103.000,00	28.739.103.960,00
Penerimaan Hibah		0,00	3.750.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		42.247.638.360,00	42.038.366.242,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**1.123.174.928.758,36**	**1.101.591.902.234,49**
ARUS KELUAR KAS	7.5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		523.629.243.269,00	547.131.893.166,00
Pembayaran Barang dan Jasa		308.182.707.004,00	289.118.163.860,10
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah		15.591.217.650,00	4.783.640.600,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga		2.419.474.976,00	123.652.909,00
Pembayaran Bagi Hasil		3.646.694.400,00	4.557.695.125,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		0,00	11.450.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		133.304.589.500,00	142.439.366.107,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**986.773.926.799,00**	**988.165.861.767,10**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		**136.401.001.959,36**	**113.426.040.467,39**
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	7.5.5.2		
ARUS MASUK KAS	7.5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		98.000.000,00	100.063.390,00
Penjualan Aset Lainnya		758.344.249,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**856.344.249,00**	**100.063.390,00**

URAIAN	Ref	SALDO 2022	SALDO 2021
1	2	3	4
ARUS KELUAR KAS	7.5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		4.576.325.420,00	8.577.959.400,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		77.491.881.979,00	29.661.741.430,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		180.038.642.251,00	50.781.476.803,72
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		155.024.484.196,00	47.170.806.203,38
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.293.334.640,00	3.590.120.350,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	1.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**418.424.668.486,00**	**140.782.104.187,10**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi		**(417.568.324.237,00)**	**(140.682.040.797,10)**
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	7.5.5.3		
ARUS MASUK KAS	7.5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		241.947.497.641,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**241.947.497.641,00**	**0,00**
ARUS KELUAR KAS	7.5.5.3.2		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan		**241.947.497.641,00**	**0,00**
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
ARUS MASUK KAS	7.5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fisik Ketiga (PFK)		112.935.776.305,06	73.136.342.451,00
Penerimaan (Pendapatan) Dana BOS		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**112.935.776.305,06**	**73.136.342.451,00**
ARUS KELUAR KAS	7.5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fisik Ketiga (PFK)		112.847.049.079,03	73.136.342.451,00
Pengeluaran (Belanja) Dana BOS		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**112.847.049.079,03**	**73.136.342.451,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris		**88.727.226,03**	**0,00**
Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5	**(39.131.097.410,61)**	**(27.256.000.329,71)**
Saldo Awal Kas	7.5.5.6	**94.187.591.053,37**	**121.234.932.183,08**
Saldo Akhir Kas	7.5.5.7	**55.056.493.642,76**	**93.978.931.853,37**
Terdiri dari :			
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		44.504.956.103,05	79.050.248.880,09
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		1.516.402.645,00	23.392.738,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	700.000,00
- Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya-Dana BOS		58.920.342,00	15.990.060,00
- Saldo Akhir Kas JKN		0,00	1.121.196,00
- Saldo di BLUD		8.440.642.883,71	14.887.478.979,28
- Saldo Kas Lainnya		535.571.669,00	0,00
Jumlah		**55.056.493.642,76**	**93.978.931.853,37**

Takalar, 28 Mei 2023

Pj. BUPATI TAKALAR

DR. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	SALDO 2022	SALDO 2021
1	2	3	4	5
1	**EKUITAS AWAL**	7.5.6.1	**1.496.474.389.188,43**	**1.600.078.268.416,46**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	7.5.6.2	**11.108.429.440,13**	**(42.962.147.695,96)**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :**	7.5.6.3	**30.196.699.604,23**	**(60.641.731.532,07)**
4	KOREKSI SALDO AWAL KAS	7.5.6.3.1	208.659.200,00	19.232.980,00
5	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	7.5.6.3.2	0,00	0,00
6	KOREKSI NILAI PIUTANG	7.5.6.3.3	4.656.673.495,33	211.368.975,00
7	KOREKSI NILAI PENYISIHAN PIUTANG	7.5.6.3.4	(4.021.576.005,14)	(500,00)
8	KOREKSI NILAI UTANG BELANJA	7.5.6.3.5	1.148.689.100,00	(1.098.769.100,00)
9	KOREKSI NILAI ASET TETAP	7.5.6.3.6	20.936.995.601,00	12.890.089.529,00
10	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	7.5.6.3.7	185.578.130,19	68.887.459,00
11	KOREKSI INVESTASI NON PERMANEN	7.5.6.3.8	0,00	0,00
12	KOREKSI NILAI PENYISIHAN INVESTASI	7.5.6.3.9	0,00	0,00
13	KOREKSI NILAI PENYUSUTAN	7.5.6.3.10	7.045.665.374,85	(72.716.327.078,29)
14	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	7.5.6.3.11	0,00	0,00
15	KOREKSI INVESTASI PERMANEN	7.5.6.3.12	36.014.708,00	(16.213.796,78)
16	LAIN-LAIN	7.5.6.3.13	0,00	0,00
17	**EKUITAS AKHIR**	7.5.6.3.14	**1.537.779.518.232,79**	**1.496.474.389.188,43**

Takalar, 28 Mei 2023

Pj. BUPATI TAKALAR

DR. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg